



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- 5 Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga yang ada pada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Lombok Tengah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan untuk periode anggaran 2023.

BAB II
KAIDAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, diimplementasikan dalam periode satu tahunan memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan.

Pasal 3

RKPD berisi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah dikompilasi dengan hasil-hasil usulan pembangunan dari masyarakat melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa hingga Kabupaten.

Pasal 4

RKPD merupakan dokumen indikator kinerja perangkat daerah yang terukur dan terbagi dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai fungsi.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

(2) Sistematika penyusunan RKPD:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tema Pembangunan Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.3 Kerangka Kebijakan Strategis Daerah

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB IV

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan target capaian kinerja.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari RKPD menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,



[Handwritten signature]

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus menjadi satu kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hirarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang akan memasuki tahun kedua dalam pelaksanaannya. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2023 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2023 berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Perumusan RKPD merupakan proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun Rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.

Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Demikian juga dengan dimasukkannya indikator kinerja utama pada SKPD yang kesemuanya itu berkaitan erat dengan penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah. Rancangan RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023.

1.1.1 Proses Penyusunan RKPD

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD

- a. Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal RKPD yang bersumber dari :
 - Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
 - Capaian kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari hasil monitoring dan evaluasi;
 - Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan.
- b. Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan;

- c. Merumuskan indikasi program/kegiatan;
- d. Pra Musrenbang Kabupaten untuk sinkronisasi usulan wilayah dan SKPD

2. Penyusunan Rancangan RKPD

- a. Menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD;
- b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD;
- c. Mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- d. Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- e. Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
- f. Musrenbang untuk menyempurnakan rancangan RKPD.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

- a. Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang;
- b. Penyusunan rancangan akhir RKPD dengan memperhatikan naskah RKP Nasional dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Menyusun naskah rancangan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

- a. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dari Kepala Bappeda;
- b. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD;

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum diselenggarakannya penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai sebuah dokumen arahan, RKPD tidak berdiri sendiri namun merupakan dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Hubungan antara RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023, dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2023.
3. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun

- yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
4. Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Lombok Tengah ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. **Latar Belakang**, memuat pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2023 dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. **Dasar Hukum Penyusunan**, menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.
- 1.3. **Hubungan Antar Dokumen**, menggambarkan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
- 1.4. **Maksud dan Tujuan**, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2023 dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 1.5. **Sistematika RKPD**, mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan peraturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. **Kondisi Umum Kondisi Daerah**, mengemukakan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2.2. **Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**, menguraikan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

- 2.3. **Permasalahan Pembangunan Daerah**, mengemukakan permasalahan yang termuat dalam RPJMD dengan kondisi aktual Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil musrenbang Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten. Dalam rangka sinergitas, sinkronisasi, dan integritas, juga menguraikan keterkaitan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan skala provinsi dan nasional.

Bab III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. **Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**, memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektoral, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya serta tantangan perekonomian daerah tahun 2023.
- 3.2. **Arah Kebijakan Keuangan Daerah**, menjelaskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

- 4.1. **Tujuan dan Sasaran Pembangunan**, memuat penjelasan tentang hubungan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun yang diambil dari dokumen RPJMD.
- 4.2. **Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023**, menjelaskan tentang prioritas pembangunan tahun 2023 yang dikaitkan dengan prioritas nasional dan provinsi dan pengalokasian pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan.

Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguh sungguh dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun 2023.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD tahun 2023 dan

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD;
- c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- d. Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dibandingkan 10 kabupaten dan kota lainnya di NTB, Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Pulau Lombok setelah Kabupaten Lombok Timur. Menurut data BPS Lombok Tengah (2021), luas wilayah kabupaten Lombok Tengah adalah 1.208,39 km² (120.839 ha) atau hampir seperempat luas daratan pulau Lombok secara umum.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Tengah
Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Secara administratif, wilayah Kabupaten Lombok Tengah berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah Selatan terbentang Samudra Hindia, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Lombok Timur.

1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara absolut lokasi wilayah kabupaten Lombok Tengah adalah dari 116°05' Bujur Timur sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' Lintang selatan sampai 8°57' Lintang Selatan. Dari lokasi absolut tersebut, dapat diketahui Kabupaten Lombok Tengah berada di tengah-tengah Pulau Lombok. Keberadaan Bandara Internasional Lombok (Lombok International Airport) menjadikan Lombok Tengah sebagai gerbang Provinsi Nusa

Tenggara Barat melalui jalur udara. Disamping itu, keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Awang yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk lalu lintas komoditas perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya terbagi menjadi tiga. Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Pringgarata dan sebagian Kecamatan Jonggat dan sebagian termasuk areal Taman Nasional Gunung Rinjani. Curah hujan pada wilayah ini relatif tinggi dan merupakan wilayah tangkapan air yang menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain kawasan hutan, wilayah ini merupakan wilayah potensial pengembangan hortikultura dan wisata alam pegunungan dengan air terjun dan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk.

Bagian tengah merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi oleh hamparan lahan persawahan dengan potensi komoditas pertanian padi dan palawija meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat. Bagian selatan merupakan daerah perbukitan kapur yang berbatasan dengan Samudera Hindia, meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang laut yang cukup fantastik, dan merupakan kawasan strategis pengembangan wisata bahari.

1.1.3 Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lombok Tengah di setiap kecamatan tidak merata dengan ketinggian dan kemiringan lereng yang variatif. Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah dan kedalaman air tanah serta mempengaruhi besar erosi. Secara umum letak ketinggian Kabupaten Lombok Tengah adalah seperti yang disajikan pada tabel 2.1 dan kelas kemiringan lahan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah menurut ketinggian (Ha) di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Ketinggian (dpl)				Jumlah (Ha)
		0-100	100- 500	500-1000	1000+	
1	Praya Barat	5.421	5.715	4.296	1.841	17.273
2	Praya Barat Daya	3.614	3.810	2.864	1.226	11.514
3	Pujut	9.643	6.325	5.305	2.082	23.355
4	Praya Timur	7.679	825	-	-	8.504
5	Janapria	5.064	1.100	293	-	6.457
6	Ko pa n g	763	2.919	1.049	621	5.352
7	Praya	3.971	1.273	124	-	5.368
8	Praya Tengah	5.435	1.743	172	-	7.350
9	Jonggat	6.826	94	235	-	7.155
10	Pringgarata	2.118	1.460	1.700	-	5.278
11	Batukliang	215	2.480	1.717	1.195	5.607
12	Batukliang Utara	673	7.797	5.399	3.757	17.626
	Jumlah	51.422	35.541	23.154	10.722	120.839

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2022

Tabel 2. 2 Luas Wilayah menurut Kemiringan (Ha) di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Kelas kemiringan (%)				Jumlah (Ha)
		0 – 2	2 – 15	15 – 40	> 40	
1	Praya Barat	7.274	9.587	412	0	17.273
2	Praya Barat Daya	4.915	6.478	121	0	11.514
3	Pujut	9.733	13.622	0	0	23.355
4	Praya Timur	3.436	5.068	0	0	8.504
5	Janapria	0	6.457	0	0	6.457
6	Kopang	0	4.760	592	0	5.352
7	Praya	719	4.649	0	0	5.368
8	Praya Tengah	1.004	6.346	0	0	7.350
9	Jonggat	3.388	3.767	0	0	7.155
10	Pringgarata	673	4.575	30	0	5.278
11	Batukliang	0	2.623	1.379	1.605	5.607
12	Batukliang Utara	0	8.247	4.336	5.043	17.626
	Jumlah	31.142	76.179	6.870	6.648	120.839

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2022

Seperti gambaran data yang disajikan pada tabel di atas, kemiringan lereng Kabupaten Lombok Tengah dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:

- 1) Kemiringan lereng 0 – 2%, merupakan daerah datar, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali Kecamatan Janapria, Kopang, Batukliang dan Batukliang Utara) dengan luas daerah \pm 31.142 Ha atau 25,77% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 9.733 Ha atau 31,25% dari luas daerah dengan kemiringan 0 – 2%.
- 2) Kemiringan lereng 2 - 15%, merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas daerah \pm 76.179 Ha atau 63,04% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 13.522 Ha atau 17,88% dari luas daerah dengan kemiringan 2 - 15%.
- 3) Kemiringan lereng 15 - 40%, merupakan daerah agak miring sampai miring, penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali Kecamatan Pujut, Praya Timur, Janapria, Praya, Praya Tengah dan Jonggat) dengan luas daerah \pm 6.870 Ha atau 5,69% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 4.336 Ha atau 63,11% dari luas daerah dengan kemiringan 15 - 40%.

Kemiringan lereng >40% merupakan daerah sangat miring sampai curam, penyebarannya meliputi Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara dengan luas daerah \pm 6.648 Ha atau 5,50% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 5.043 Ha atau 75,86% dari luas daerah dengan kemiringan > 40%.

1.1.4 Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari kondisi geologi regional Pulau Lombok yang termasuk ke dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda dalam gunung api sebelah barat. Kondisi ini mengakibatkan secara umum Kabupaten Lombok Tengah rentan terhadap bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Khusus di bagian selatan juga rentan terhadap bencana tsunami.

Berdasarkan sejarah pembentukan geologi Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasir dan endapan lahar dengan materi tersusun dari material lepas berukuran pasir hingga bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh jenis Komplek Mediteran Coklat, Gromosol Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol yang pada kondisi tertentu labil dan berpotensi mengalami pergerakan tanah.

1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Lombok Tengah berada dalam wilayah SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan. Sebagian besar sungai terutama yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah hanya berair pada musim hujan saja. Adapun air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah bendungan atau waduk serta embung yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Keberadaan dua bendungan besar yaitu Bendungan Batujai dan Bendungan Pengga memiliki peran penting bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah secara umum. Selain berfungsi sebagai penampungan air, kedua bendungan ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai sentra budidaya perikanan air tawar dan sebagai obyek wisata. Sedangkan sebaran air tanah di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditemukan hampir di setiap wilayah namun sumber mata air terdapat di bagian utara.

Kemampuan Lombok Tengah untuk memenuhi kebutuhan air dapat dilihat dari analisis neraca air. Penentuan status daya dukung lingkungan berbasis neraca air ini dihitung berdasarkan selisih antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Menurut Rustiadi, *et.al.* (2010), jika $SA > DA$, daya dukung air dinyatakan belum terlampaui (surplus) dan sebaliknya jika $SA < DA$, daya dukung air dinyatakan terlampaui (defisit). Selain itu perhitungan juga didasarkan pada nilai rasio SA dan DA. Jika rasio $SA/DA > 2$, maka daya dukung lingkungan aman (*sustain*), jika $SA/DA = 1-2$, daya dukung lingkungan aman bersyarat (*conditional sustain*), dan jika $SA/DA < 1$, daya dukung lingkungan dianggap terlampaui (*overshoot*).

Tabel 2. 3
Analisis Kebutuhan Air Kabupaten Lombok Tengah
dan Daya Dukung Air (DDA) Tahun Proyeksi 2040

No	Kecamatan	Potensi Sumberdaya Air (SA) (m ³ /th)	Kebutuhan Air (DA) (m ³ /th)		DDA	
			2019	2040	2019	2040
1	Praya Barat	6.207.725	120.546.469	149.307.200	0,05	0,04
2	Praya Barat Daya	4.804.949	88.753.428	111.883.200	0,05	0,04
3	Praya Tengah	8.675.903	104.097.947	148.148.800	0,08	0,06
4	Praya Timur	11.899.554	107.772.370	128.323.200	0.11	0,09
5	Pringgarata	6.139.138	112.093.717	157.665.600	0,05	0,04
6	Pujut	32.885.615	167.793.064	215.614.400	0.20	0.15
7	Batukliang	7.231.664	122.236.305	156.491.200	0,06	0,05
8	Batukliang Utara	22.130.233	83.296.783	118.424.000	0.27	0.19
9	Janapria	9.067.439	122.216.940	113.595.200	0,07	0,08
10	Jonggat	9.362.597	152.873.127	194.555.200	0,06	0,05
11	Kopang	8.271.854	128.881.937	156.072.000	0,06	0,05
12	Praya	7.210.942	180.891.861	250.384.000	0,04	0,03
Jumlah		133.887.613	1.491.455.968	1.900.466.040	0,09	0,07

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2019

Berdasarkan hasil analisis, total kebutuhan air (DA) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 1.491.455.968 m³/tahun dengan potensi Sumber Daya Air (SA) sebesar 133.887.613 m³/tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah mengalami defisit terhadap daya dukung air. Adapun untuk proyeksi selama 20 tahun kedepan, dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2040 sebesar 1.187.790 jiwa dan kebutuhan air per kapita adalah 1.600 m³/tahun, angka kebutuhan air Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2040 diperkirakan sebesar 1.900.466.040 m³/tahun. Jika potensi sumber daya air di Kabupaten Lombok Tengah tetap yakni sebesar 133.887.613 m³/tahun, maka untuk 20 tahun kedepan Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Lombok Tengah tetap mengalami defisit dan akan mengalami penurunan sebesar 0,02 jika dibandingkan kondisi tahun 2019.

1.1.6 Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim D dan E yaitu hujan tropis dengan musim kemarau kering. Musim hujan mulai sekitar Bulan November sampai dengan Bulan April/Mei dengan curah hujan rata-rata tertinggi di tahun 2020 adalah pada bulan Maret dan terendah pada Bulan Juli/Agustus.

Tabel 2. 4 Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan
1	Januari	25	458
2	Februari	22	327
3	Maret	14	199
4	April	7	50
5	Mei	3	29
6	Juni	8	189
7	Juli	2	4
8	Agustus	8	27
9	September	5	71
10	Oktober	10	142
11	November	15	334
12	Desember	16	208

Sumber : Lombok Tengah dalam Angka 2022

Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering. Musim hujan yang cukup tinggi di sepanjang tahun. Jumlah hari hujan per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 2 hingga 25 hari dengan curah hujan berkisar antara 4 mm hingga 458 mm. Dilihat menurut bulan yang memiliki hari hujan terbanyak yakni bulan Januari dan Februari, sebaliknya bulan Juli paling sedikit..

1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Tengah secara umum dibagi menjadi dua yaitu tanah sawah dan tanah bukan sawah (tanah kering) yang terdiri dari pekarangan rumah (permukiman), tegal/kebun, tambak, kolam/empang, tanah sementara tidak diusahakan, hutan lebat, hutan belukar, tanah perkebunan dan tanah lainnya. Adapun perbandingan penggunaan lahan antara tanah sawah dan tanah kering adalah 45%:55%. Berdasarkan perkembangannya, luas wilayah budidaya yang dimanfaatkan di Lombok Tengah selalu dinamis. Luas wilayah budidaya yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian, permukiman dan sektor-sektor yang menghasilkan produksi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 5 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Luas Wil Produktif	72.929,00	77.289	79.968	77.424
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	102.650,55	102.650,5 5	100.990,2 7	100.990,2 7
3	Rasio [(1)/(2)]	0,710	0,753	0,813	0,767

Sumber: Dinas Pertanian Lombok Tengah dan Analisis Data Citra Landsat 2018 (Data diolah, 2020)

Dari tabel di atas diperoleh gambaran rata-rata penggunaan wilayah produktif dalam 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami perubahan meskipun tidak terlalu signifikan dengan ratio luas wilayah budidaya rata-rata 0,788 dari luas wilayah produktif secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang

selama ini masih bertumpu pada pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam belum mempengaruhi kapasitas keruangan yang tersedia atau dapat dikatakan bahwa proyeksi penyediaan lahan untuk aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masih memadai.

Tabel 2. 6 Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2019

No	Jenis Lahan	2016	2017	2018	2019
1	Sawah (Ha)	54.353	54.355	49.253	50.282
2	Tegal/kebun (Ha)	22.336	22.257	24.319	11.664
3	Ladang/huma (Ha)	371	321	1.062	11.243
4	Lahan sementara tidak diusahakan (Ha)	70	70	70	0
	Total	77130	77003	74704	73189

Sumber: Kementerian Pertanian (2020)

Jika dilihat berdasarkan peruntukannya untuk lahan pertanian, luas wilayah produktif di Lombok Tengah masih didominasi oleh sawah. Berdasarkan tabel di atas, penggunaan lahan untuk sawah masih paling dominan meskipun cenderung mengalami penurunan sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir. Selama kurun waktu 2017 hingga 2019 setidaknya terjadi alih fungsi lahan sawah ke non sawah seluas 47 Ha atau rata-rata 23,5 Ha per tahun dengan laju penyusutan sebesar 0,022% per tahun. Alih fungsi lahan sawah tersebut paling besar terjadi di Kecamatan Praya sebesar 19 Ha, selanjutnya Praya Tengah 18 Ha dan Praya Barat Daya 9 Ha.

Penyusutan luas sawah ini menunjukkan adanya perubahan preferensi masyarakat dalam memanfaatkan lahan mereka dari sektor pertanian ke non pertanian. Dinamika ini perlu disikapi oleh semua pihak mengingat berdasarkan hasil sinkronisasi dan integrasi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lombok Tengah ke dalam revisi RTRW Provinsi NTB tanggal 12 November 2019, deliniasi kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B di Kabupaten Lombok Tengah seluas 52.957,17 Ha dengan sebaran per kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Sebaran KP2B Per Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Luas KP2B (Ha)
1	Praya	2.710,290
2	Praya Tengah	4.528,085
3	Praya Barat	6.339,228
4	Praya Barat Daya	6.022,105
5	Pujut	7.357,057
6	Praya Timur	6.246,423
7	Janapria	5.511,473
8	Kopang	2.683,631
9	Batukliang	2.348,052
10	Batukliang Utara	2.024,187
11	Pringgarata	2.415,016
12	Jonggat	4.717,623
	Total	52.957,170

Sumber: Bappeda Kab Lombok Tengah, 2020

1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan terhadap kejadian bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Terdapat 12 (dua belas) potensi bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Lombok Tengah yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang ekstrem dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, dan bencana lainnya. Semua potensi tersebut setidaknya pernah terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari, sehingga diperlukan pencegahan atau mitigasi bencana.

Tabel 2. 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Resiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Gempa bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Cuaca ekstrem	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Letusan Gunungapi Rinjani	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang
10	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Lombok Tengah, 2017

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 diketahui dari 10 jenis bahaya di Kabupaten Lombok Tengah, 6 jenis bahaya tergolong memiliki tingkat bahaya yang tinggi, 3 jenis bahaya pada tingkatan bahaya sedang dan 1 jenis bahaya dengan tingkat rendah. Dari hasil pengkajian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dihasilkan tingkat risiko setiap bencana sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 yang menunjukkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi untuk pada 9 jenis bencana dari 10 jenis bencana yang ada.

a. Bencana Letusan Gunung Rinjani

Secara keseluruhan bahaya letusan Gunungapi Rinjani memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Lombok Tengah dengan total 3.882 Ha yang berada pada kelas rendah. Kelas bahaya rendah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terpapar bahaya letusan Gunungapi Rinjani yaitu Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang dan Pringgabaya.

b. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Potensi bahaya tanah longsor mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luasan mencapai 26.814 hektar dan tergolong kelas tinggi. Kecamatan yang memiliki kawasan rawan longsor terluas adalah Pujut, Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya.

c. Kawasan Rawan Tsunami

Berdasarkan peta geologi Indonesia wilayah Lombok terletak sangat dekat dengan zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia (utara). Kondisi tersebut menyebabkan pesisir selatan Lombok Tengah sepanjang 97 km rawan dilanda tsunami meliputi Pantai Awang, Bumbang, Gerupuk, Kawasan Pantai Putri Mandalika (Pantai Aan, Sunut, Seger, Serenting dan Kuta), Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok dan Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang-Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur (Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya).

d. Kawasan Rawan Kekeringan

Dari data historis, kekeringan di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Tengah sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (*El-Nino Southern Oscillation*). Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan. Data Lombok Tengah Dalam Angka menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan yaitu Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Janapria, Jonggat, Kopang, Batukliang, Praya, dan Kecamatan Praya Barat.

e. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lombok Tengah berada di beberapa lokasi yaitu wilayah perkotaan Praya, Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur dan Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut. Kedua dusun ini terletak di dekat bantaran sungai dari DAS Renggung dan dekat dengan muara sungai.

f. Gempa Bumi

Propinsi NTB terletak di jalur gunung api dunia (*ring of fire*) yang merupakan pertemuan 3 lempeng besar (India Australia, Eurasia dan Pasifik) yang menimbulkan potensi gempa bumi. Disamping itu di sebelah utara pulau Lombok terdapat patahan Flores yang merupakan salah satu patahan yang aktif. Kejadian gempa bumi mulai tanggal 29 Juli s/d Agustus 2018 telah terjadi sekitar 814 kali gempa yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal 27.039 unit, jaringan jalan 7.045 meter, 52 unit fasilitas kesehatan, 1.093 unit bangunan fasilitas pendidikan, 47 unit bangunan fasilitas peribadatan dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum

lainnya dengan nilai kerusakan diperkirakan sebesar Rp.934,002,280,000,- dengan nilai kerugian sebesar Rp.177,741,523,639,- dan total kerugian dan kerusakan Rp.1,111,743,803,639,-.

g. Kawasan Rawan Kebakaran

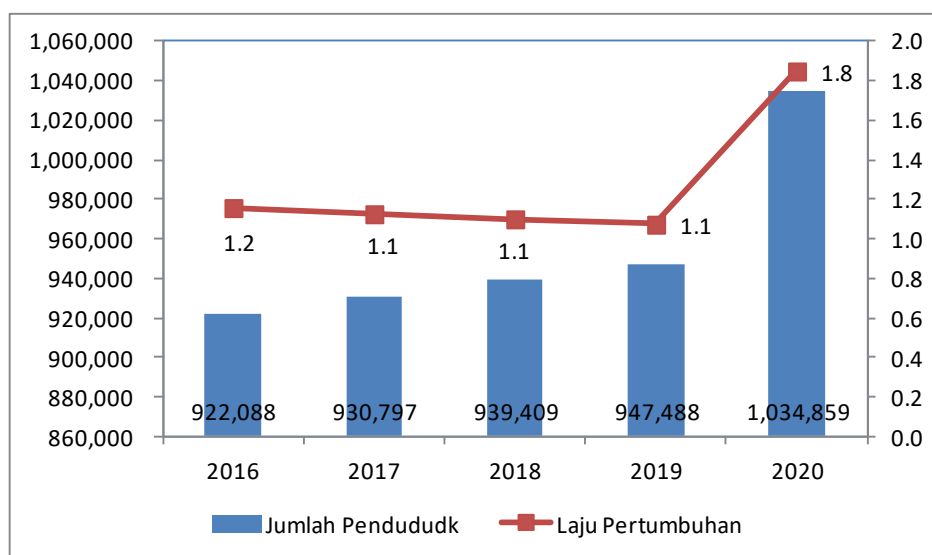
Kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah berada pada kawasan permukiman terutama kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan-kawasan pusat perekonomian.

1.1.9 Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 sebanyak 1.049.708 jiwa yang terdiri atas 522.596 jiwa penduduk laki-laki dan 527.112 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,68 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 mencapai 869 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Praya dengan kepadatan sebesar 2.084 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Batukliang Utara sebesar 335 jiwa/Km². Pada Gambar 2.2 disajikan grafik yang menggambarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021.

Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Lombok Tengah rentang waktu tahun 2017-2021 masih didominasi oleh kelompok usia 15-64 tahun. Fenomena ini dapat diilustrasikan melalui gambar piramida penduduk Lombok Tengah yang termasuk piramida stasioner seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3. Besarnya jumlah populasi penduduk usia produktif ini merupakan bonus demografi yang diprediksi akan terus diterima hingga tahun 2030.



Gambar 2. 2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2020 (data diolah)

Sebagai konsekuensi adanya bonus demografi tersebut, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kelompok usia kerja memiliki proporsi terbesar sebesar 65,53 persen dengan kecenderungan besaran yang tidak berubah jika dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Lombok Tengah karena memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup sehingga kebutuhan akan tenaga kerja dapat terpenuhi. Namun disisi yang lain pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja justru menimbulkan dampak meningkatnya angka pengangguran.

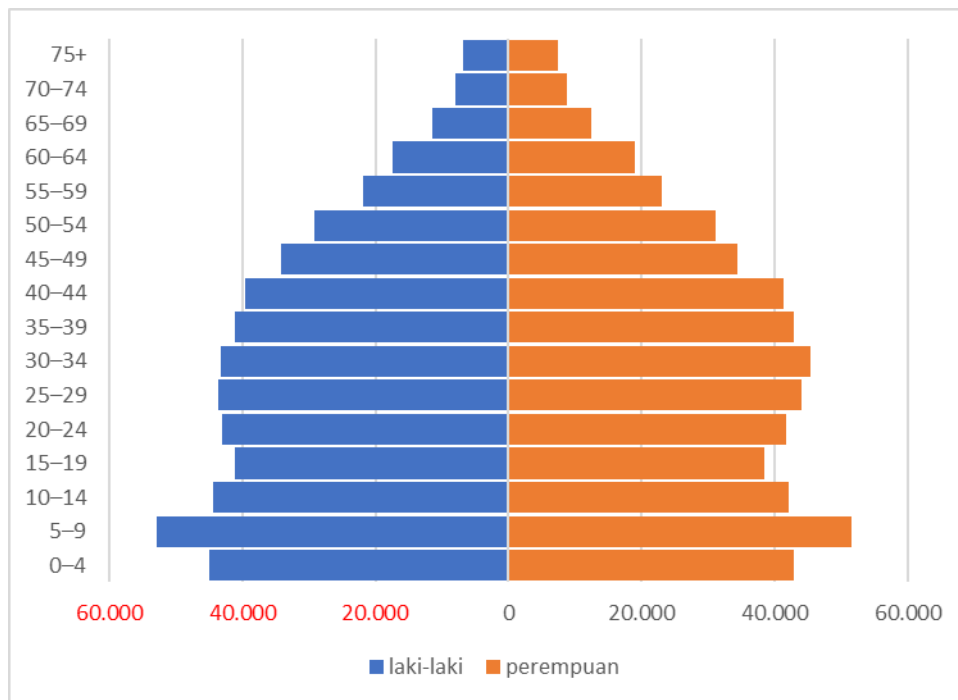
Tabel 2. 9 Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Usia

Usia	2017	2018	2019	2020	2021
0-4	94,454	93,653	92,828	88.77	87.939
05-09	89,525	89,597	89,371	103.514	104.403
01-10	85,626	86,659	87,713	84.471	86.447
15-19	81,434	81,311	81,317	80.196	79.669
20-24	72,403	72,698	72,871	85.181	84.786
25-29	74,464	74,788	75,076	87.172	87.624
30-34	70,781	70,636	70,563	88.155	88.720
35-39	71,628	71,998	72,255	82.617	84.025
40-44	64,116	64,908	65,557	79.346	80.839
45-49	57,910	59,386	60,708	66.555	68.600
50-54	48,756	50,075	51,431	58.147	60.276
55-59	39,765	40,827	41,901	43.337	44.911
60-64	31,452	32,935	34,330	35.021	36.538
65-69	21,197	21,878	22,690	22.945	23.973
70-74	14,018	14,518	15,056	15.724	16.710
75+	13,268	13,542	13,821	13.708	14.248
Jumlah	930,797	939,409	947,488	1.034.859	1.049.708
Dependency Ratio (%)	51.92	51.62	51.35	46,64	46,61%

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2021

Nilai rasio ketergantungan atau *dependency ratio* Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari semula 51,92% di tahun 2017 menjadi 46,61% di tahun 2021. Rasio ketergantungan ini mengisyaratkan setiap 100 orang penduduk usia produktif bekerja menanggung 47 yang belum produktif dan dianggap tidak produktif

lagi di tahun 2020. Berikut disajikan penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan kelompok usia tahun 2021.



Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2021

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2022 (diolah)

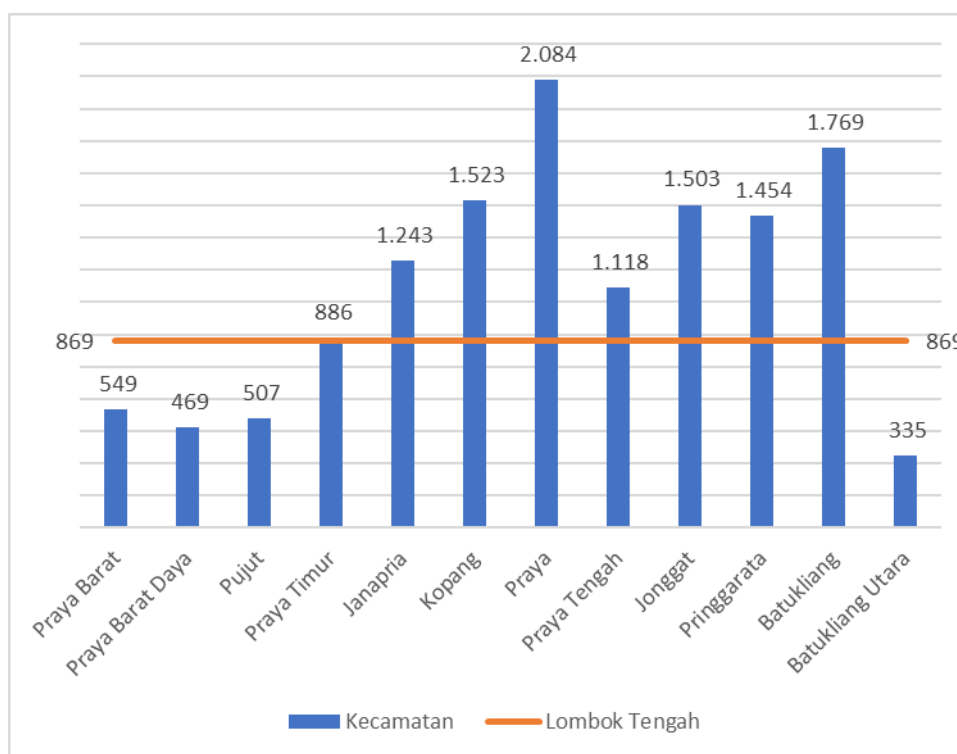
Sex ratio menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lombok Tengah didominasi perempuan dengan sex ratio pada tahun 2021 sebesar 99,14% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Persebaran penduduk jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, maka persebaran penduduk di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2021 tingkat kepadatan penduduk sebesar 869 jiwa/km² dengan tingkat kepadatan tertinggi ada di Kecamatan Praya. Dengan semakin tingginya kepadatan penduduk maka penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah daerah harus semakin ditingkatkan melalui antara lain instrumen penataan ruang dan wilayah sehingga kedepannya mampu mewujudkan tingkat kepadatan penduduk yang proporsional. Berikut disajikan perkembangan sex ratio dan kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021.

Tabel 2. 10 Perkembangan Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk

Tahun	Jumlah		Total	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Km ²)
	Laki-Laki	Perempuan			
2017	440.292	490.505	930.797	89,76	770
2018	444,480	494,929	939.409	89,8	777
2019	448,270	499,218	947,488	90	791
2020	514.355	520.504	1.034.859	98,8	856
2021	522.596	527.112	1.049.708	99,14	869

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2022



Gambar 2. 4 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan 2021

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2022

1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk mendapatkan gambaran kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam aktivitas ekonomi adalah dengan melihat Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi di suatu daerah dalam satu tahun tertentu sehingga nilai ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta, masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010, kecuali di tahun 2020 terjadi kontraksi yang cukup dalam akibat pandemi covid-19. Menurut data tahun 2019, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp.17,85 Triliun sedangkan PDRB

atas dasar harga konstan mencapai Rp.12,40 Triliun. Nilai PDRB turun kembali di tahun 2020 dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 16,67 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 11,57 Triliun. Di tahun 2021, PDRB atas dasar harga konstan meningkat menjadi 12,03 Triliun.

Tabel 2. 11
Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2016-2021

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	14.423.751,17	9,89	10.854.980,04	5,65
2017	15.789.214,15	9,40	11.551.693,67	6,43
2018	16.702.136,71	5,93	11.916.532,02	3,16
2019	17.853.805,79	6,98	12.400.273,33	4,07
2020*	16.670.395,40	-6,62	11.571.990,69	- 6,68
2021**	17.689.609,49	6.14	12.037.664,55	4,03

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2022

Jika dilihat dari pertumbuhan pertahunnya, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2016-2021 mengalami fluktuasi dengan laju pertumbuhan terendah pada tahun 2020 dan 2018. Rendahnya pertumbuhan PDRB di tahun 2018 adalah dampak gempa bumi yang melanda pulau Lombok pada Juli hingga Agustus 2018. Adapun di tahun 2020, pertumbuhan PDRB berada pada posisi minus 6,68 sebagai capaian terendah dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat resesi ekonomi yang melanda dunia sejak berlangsungnya pandemi global Covid-19 di sepanjang tahun 2020 dan pada tahun 2021 perekonomian Lombok Tengah mampu tumbuh positif sebesar 4,03%.

Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi sektor primer yakni sektor pertanian dengan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 26,01% (ADHK). Kontribusi sektor ini turun jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 26,79% (ADHK). Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas panen akibat alih fungsi lahan sawah serta perubahan cuaca pada beberapa tahun terakhir sehingga berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian.

Sektor kedua yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sektor konstruksi sebesar 18,11% (ADHK). Sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya berkisar antara 0,09% - 11,60%. Berikut adalah kontribusi masing-masing sektor dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lombok Tengah.

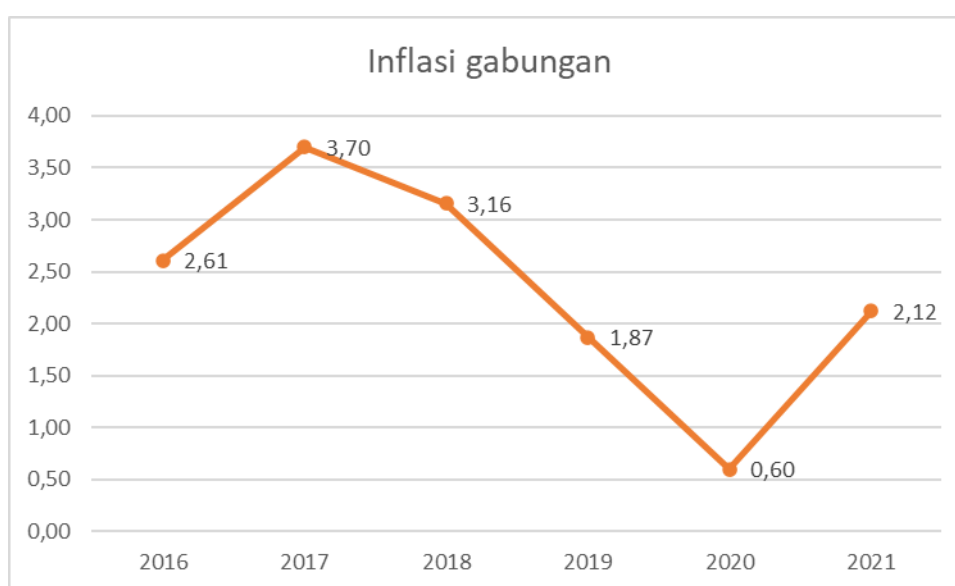
Tabel 2. 12
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2021

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	25,96	25.97	25.75	25.16	26.8	26,01
2	Pertambangan dan Penggalian	4,34	4.37	4.48	4.86	5.31	5,44
3	Industri Pengolahan	5,73	5.63	5.54	5.51	5.74	5,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0.07	0.07	0.08	0.09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0.12	0.12	0.11	0.12	0,12
6	Konstruksi	12,71	12.8	13.09	14.45	16	18,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,95	11.09	11.37	11.61	11.75	11,60
8	Transportasi dan Pengangkutan	17,25	17.19	16.5	14.97	8.82	7,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,07	1.08	1.07	1.05	0.89	0,87
10	Informasi dan Komunikasi	1,80	1.82	1.86	1.86	2.25	2,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,00	2.1	2.17	2.12	2.59	2,66
12	Real Estate	3,44	3.45	3.51	3.54	3.85	3,75
13	Jasa Perusahaan	0,15	0.14	0.15	0.15	0.15	0,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5.05	4.93	4.9	5.41	5,34
15	Jasa Pendidikan	4,38	4.35	4.46	4.59	4.98	4,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,49	2.48	2.59	2.65	2.84	2,95
17	Jasa Lainnya	2,29	2.29	2.34	2.38	2.4	2,36
	Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Lombok Tengah, 2022

1.2.1.2 Laju Inflasi

Besaran laju inflasi Kabupaten Lombok Tengah menggunakan besaran inflasi gabungan Kota Mataram dan kota Bima karena perhitungan inflasi oleh BPS di Nusa Tenggara Barat hanya dilakukan di dua kota yaitu Mataram dan Bima. Berdasarkan pendekatan tersebut, inflasi pada kurun waktu tahun 2016-2021 diketahui mengalami fluktuasi sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah.



Gambar 2. 5 Inflasi Gabungan Tahun 2016 – 2021

Sumber : BPS NTB, 2022

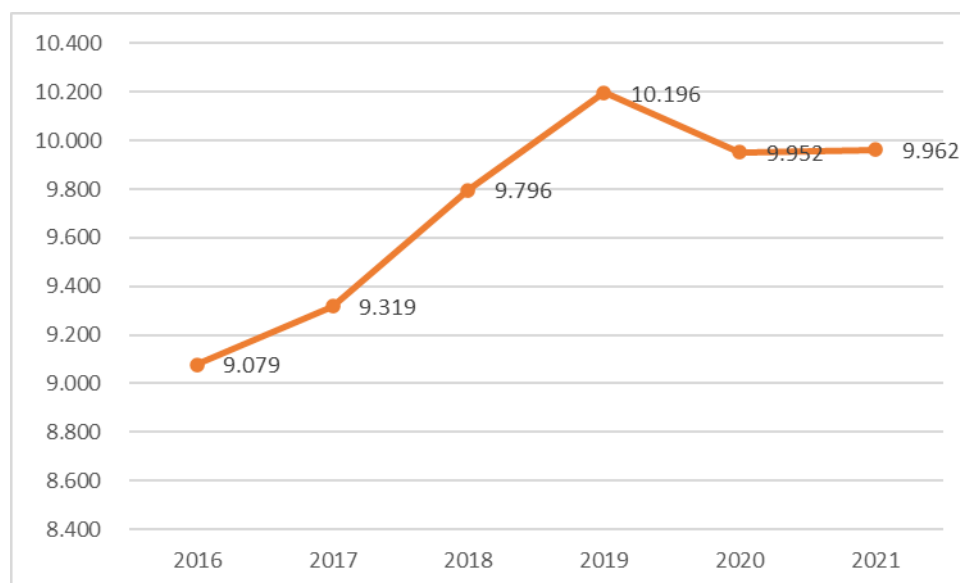
Fluktuasi angka laju inflasi daerah ini telah disikapi oleh pemerintah daerah dengan upaya pengendalian agar inflasi yang terjadi tetap berada dalam batas aman .

Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan OPD terkait, pemerintah daerah menerapkan kebijakan 4K yaitu menjaga [K]etersediaan pasokan, menjamin [K]elancaran distribusi komoditas, menjalin [K]omunikasi yang efektif, dan menjamin [K]eterjangkauan harga di tingkat konsumen salah satunya dengan pelaksanaan operasi pasar.

1.2.1.3 Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Daya beli juga menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi penduduk.

Berdasarkan kajian BPS (2019), daya beli masyarakat Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2021. Pada tahun 2016, daya beli masyarakat berkisar pada angka Rp. 9,07 Juta sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp. 9,96 juta. Peningkatan daya beli masyarakat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Berikut ditampilkan perkembangan daya beli masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.



Gambar 2. 6 Perkembangan Daya Beli Masyarakat Pertahun Selama Kurun Waktu 2016-2019 (Ribuan Rupiah)

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2022

1.2.1.4 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 2016-2021 dari Rp.11.771.000 pada tahun 2016 menjadi Rp 12.112.000 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 turun menjadi Rp.11.467.000. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

Tahun	PDRB Perkapita (Ribu Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2016	15,915	11,771
2017	17,440	12,415
2018	17,779	12.685
2019	18,843	13.088
2020*)	17.448	12.112
2021**)	16.851	11.467

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2022

1.2.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2016-2020 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase	P1 (Kedalaman)	P2 (Keparahan)
2016	145.370	15,80	2,74	0,64
2017	142.412	15,31	2,81	0,75
2018	130.000	13,87	2,31	0,54
2019	128.820	13,63	1,56	0,23
2020	128.100	13,44	1,42	0,26
2021	131.940	13,44	1,69	0,35

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2022

Penurunan jumlah penduduk miskin Lombok Tengah sebesar 2,36% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Indikator kemiskinan lainnya juga menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masing-masing menurun rata-rata sebesar -0,33 per tahun dan rata-rata -0,095 per tahun dalam kurun waktu terakhir. Namun sebagai dampak dari pandemi covid-19 telah mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di tahun 2021 meskipun secara presentase penduduk miskin masih tetap sama dengan angka tahun 2020.

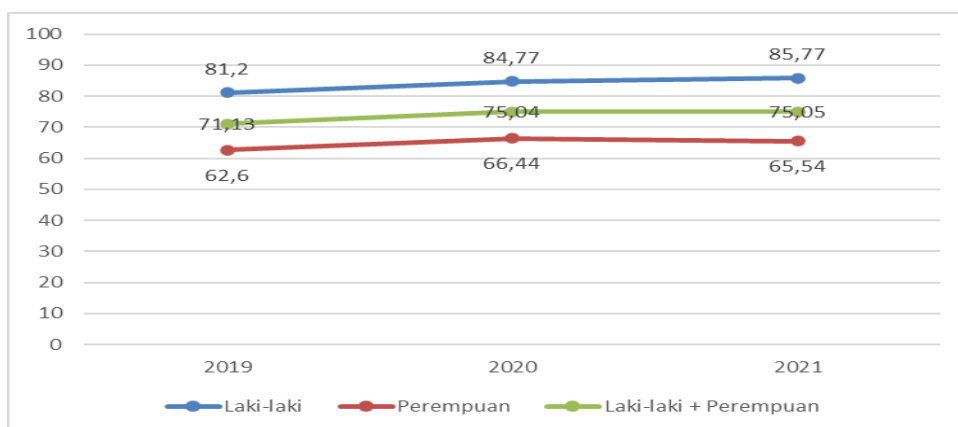
Tabel 2. 15 Garis Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.)
2016	357.337
2017	369.645
2018	386.676
2019	404.633
2020	421.439
2021	447.200

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2022

1.2.1.6 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

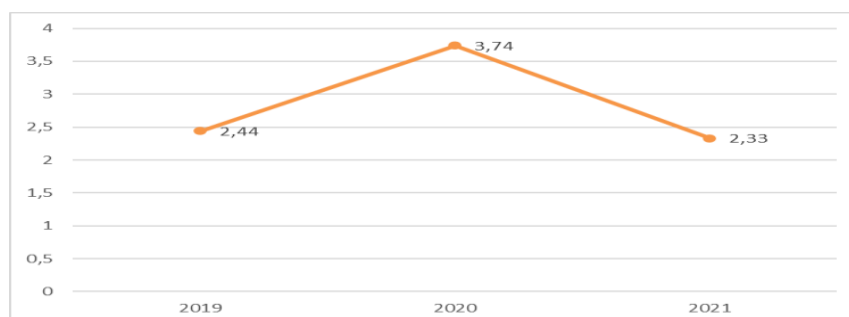
Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang menggambarkan besaran persentase penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi baik bekerja maupun mencari kerja atau mempersiapkan usaha. Jika melihat perkembangannya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Lombok Tengah dari tahun 2019 ke tahun 2021 berfluktuatif. TPAK perempuan mengalami penurunan dari 66,44% di tahun 2020 menjadi 65,54% di tahun 2021.



Gambar 2. 7 Perkembangan TPAK di Kabupaten Lombok Tengah

Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, Tahun 2022

Angka pengangguran terbuka dalam tiga tahun terakhir kurun waktu 2019-2021 mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 3,74% seiring dengan kontraksi ekonomi yang terjadi ppada thaun tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada tahun 2021 sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan sehingga menjadi 2,33%..



Gambar 2. 8 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021

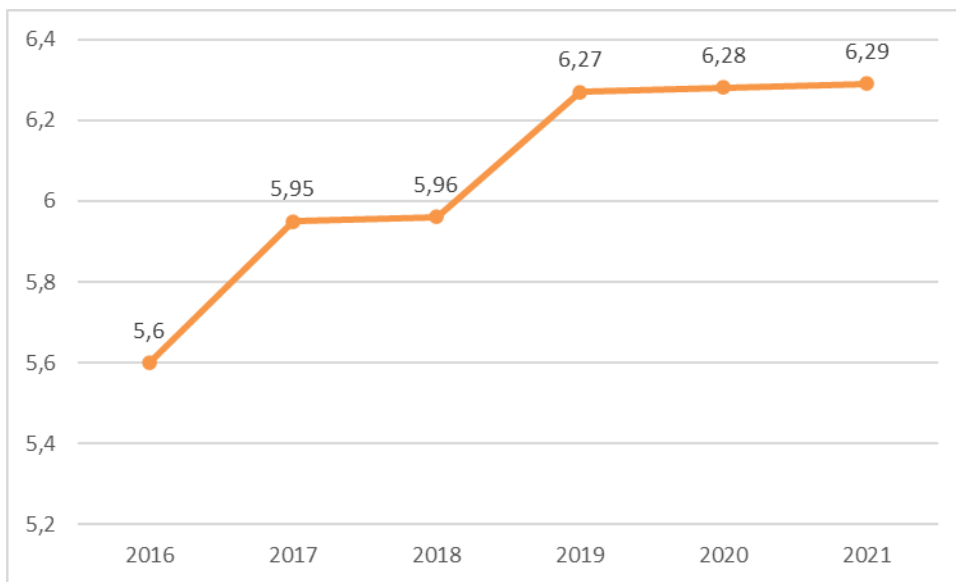
Sumber: BPS Lombok Tengah Tahun 2022

1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1.2.2.1 Pendidikan

(a) Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting dalam pendidikan lainnya yakni rata-rata lama sekolah. Selama periode 2016-2021, rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah naik dari 5,56 tahun pada tahun 2016 menjadi 6,29 tahun pada tahun 2021.

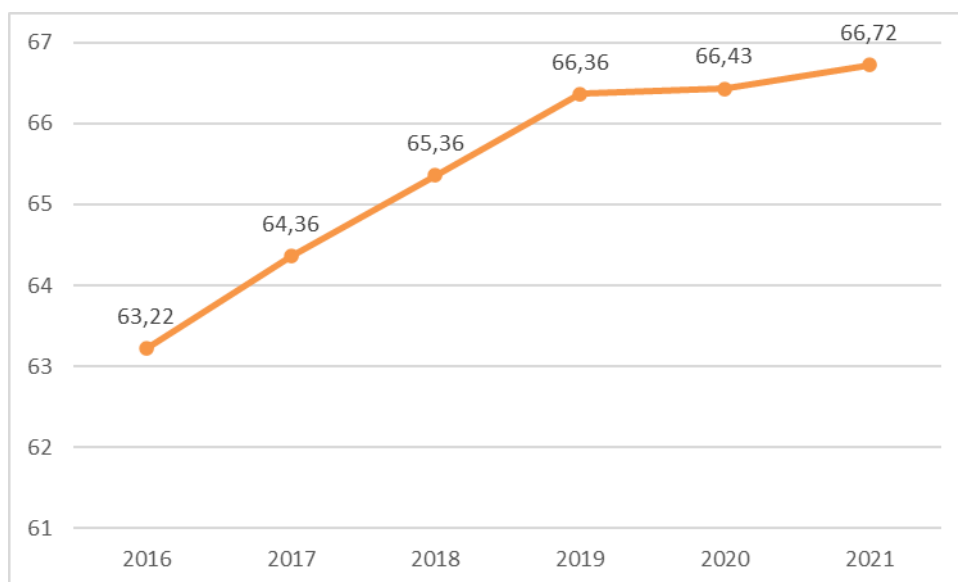


Gambar 2. 9 Rata-rata Lama sekolah Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Lombok Tengah, 2022

1.2.2.2 IPM

Secara umum pembangunan manusia di Lombok Tengah selama periode 2016-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IPM Lombok Tengah tercatat sebesar 63,22 dan terus meningkat hingga mencapai 66,43 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 66,72 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk Lombok Tengah semakin membaik.

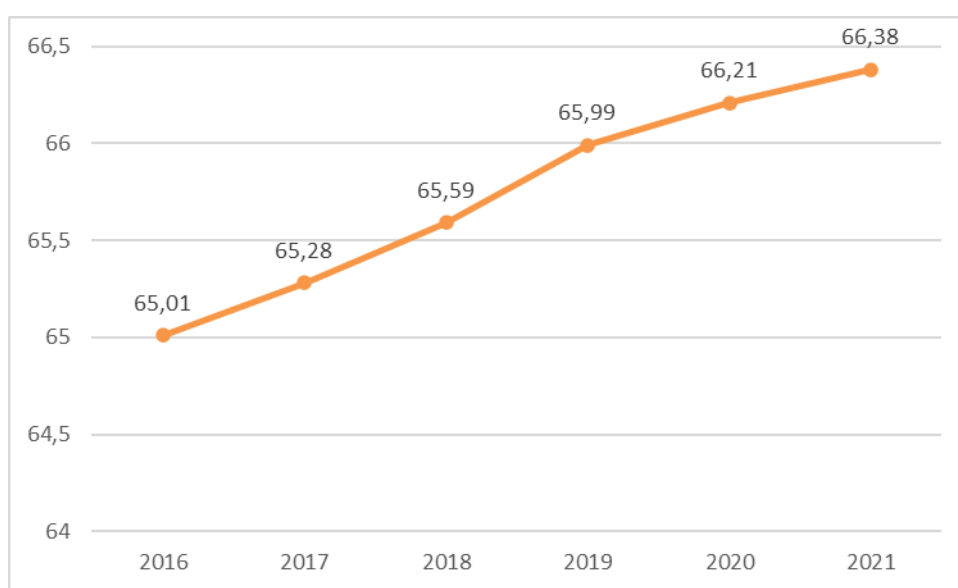


Gambar 2. 10 IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

1.2.2.3 Kesehatan

(a) Angka Harapan Hidup

Dalam kurun waktu 2016-2021, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup Lombok Tengah mencapai 65,01 tahun yang berarti anak yang lahir di Lombok Tengah berpeluang untuk hidup hingga berusia 65,01 tahun. Angka harapan hidup tersebut terus meningkat hingga mencapai 65,28 pada tahun 2017. Peningkatan terendah terlihat pada periode 2016 – 2017 dimana angka harapan hidup hanya bertambah 0,17 poin. Pada tahun 2020 angka harapan hidup tercatat 66,21 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,22 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021, angka harapan hidup mencapai 66,38.



Gambar 2. 11 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, Tahun 2021

Angka harapan hidup ini sangat berkaitan dengan angka kematian bayi, dikarenakan penghitungannya menggunakan pendekatan tidak langsung melalui metode *trusse*/dengan model *West*, dimana salah satu indikator kunci adalah angka anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Dengan demikian untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat ini harus diupayakan dengan cara menekan angka kematian bayi.

1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Lombok Tengah tetap menjadi penekanan oleh pemerintah sebab merupakan sektor pendukung untuk fokus-fokus pembangunan utama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16 Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah atraksi budaya yang memadukan keanekaragaman	5	10	12	10	10
2	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16	16	16	16	10
3	Sanggar seni yang aktif	11	21	27	21	10

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, 2022

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Lombok Tengah telah mengembangkan pembinaan terhadap kesenian/budaya daerah yang meliputi atraksi budaya, pelestarian situs dan cagar budaya serta sanggar seni yang aktif. Atraksi budaya dan sanggar seni yang aktif mengalami peningkatan kuantitas yang ditunjukkan dengan tumbuhnya sanggar-sanggar seni. Sedangkan untuk benda situs dan kawasan cagar budaya mengalami peningkatan kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan terus menerus secara bertahap.

Pada fokus pembangunan bidang keolahragaan Pemerintah Daerah telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1). Pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten melalui kegiatan olimpiade olahraga dan seni nasional (O2SN); (2). Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. (3). Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; (4). Pembinaan dan pengembangan organisasi olahragatingkat kabupaten. Untuk pelaksanaan point 2, 3 dan 4 melalui program kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Tengah.

1.3 Aspek Pelayanan Umum

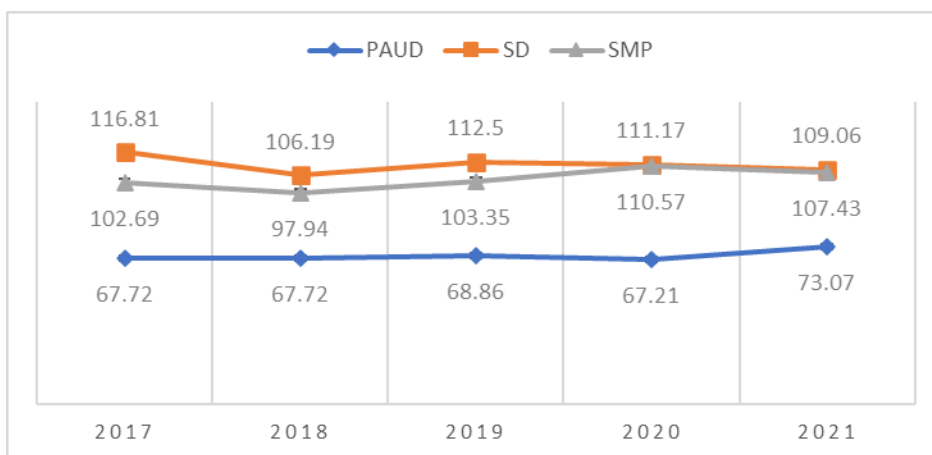
1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1.3.1.1 Pendidikan

Hasil penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan jumlah siswa putus sekolah.

(a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar menunjukkan tren fluktuatif selama kurun waktu 2016-2019. APK PAUD mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu dari 67,72% hingga 73,07%. Sedangkan APK SD/MI/MTs dari tahun 2017-2021 lebih bergerak fluktuatif karena mengalami penurunan di tahun 2018 dan bergerak naik lagi di tahun 2019 serta bergerak fluktuatif hingga tahun 2021.

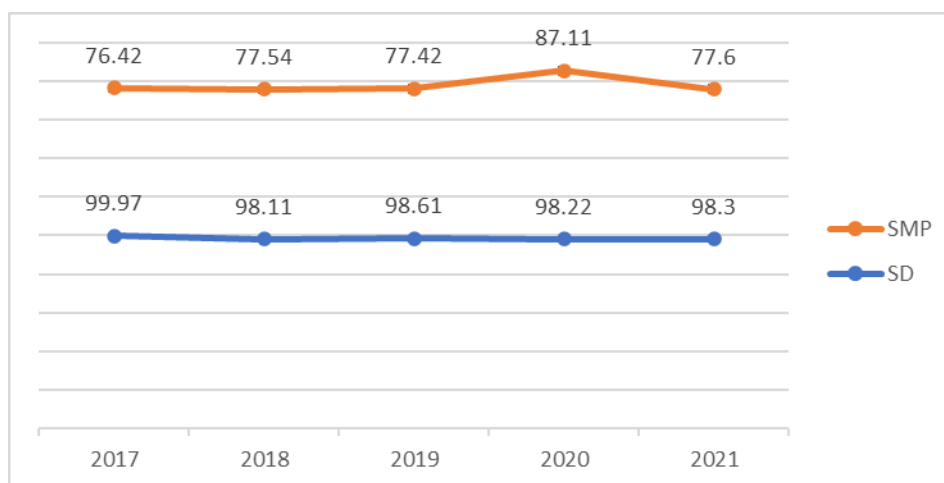


Gambar 2. 12 APK PAUD dan Pendidikan Dasar Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah, 2022

(b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2017-2021. APM SMP/MTs mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 76,42 pada tahun 2019 menjadi 87,11 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan pencapaian provinsi NTB, APM SMP/MTs di Lombok Tengah masih rendah. Nilai APM Kembali turun untuk SD dan SMP/MTs pada tahun 2021.



Gambar 2. 13 APM Pendidikan Dasar Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

(c) Jumlah Siswa Putus Sekolah

Jumlah siswa putus sekolah SD meningkat dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 9 orang dan kembali turun tahun 2019 dengan jumlah 109 orang siswa. Mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 229. Jumlah siswa putus sekolah SMP menunjukkan tren meningkat tajam dari 68 siswa di tahun 2017 menjadi 327 siswa di tahun 2019. Jumlah siswa SMP putus sekolah dengan demikian meningkat hingga 4 kali

lipat hanya dalam waktu 3 tahun terakhir. Berikut disajikan perkembangan angka putus sekolah tahun 2016-2020.

Tabel 2. 17
Jumlah Siswa Putus Sekolah Tahun 2016-2020

Jenjang	2017	2018	2019	2020
SD	126	135	109	229
SMP	68	313	327	222

Sumber: Neraca Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Lombok Tengah patut diduga berkaitan dengan beberapa hal. Dari sisi ekonomi, persoalan kemiskinan masih menjadi penghalang anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Kultur kebiasaan pada masyarakat miskin menyebabkan mereka meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, tingginya kasus pernikahan anak juga menyumbang tingginya angka putus sekolah. Penanganan angka putus sekolah ini membutuhkan kebijakan yang bersifat multidimensi dan harus bebas dari bias sektoral.

Tingginya angka putus sekolah tidak berkaitan dengan ketersediaan sarana pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah ataupun swasta dikarenakan ketersediaan sarana pendidikan di Lombok Tengah sudah cukup baik dan hanya perlu meningkatkan kualitas pelayanan saja. Pada tahun 2019 terdapat 1.732 unit sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMA/SMK yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi untuk menampung 180.934 orang siswa.

Tabel 2. 18
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Guru : Murid
	2020	1.834	148.663	17.819	1:8
	2019	1.732	180.934	12.952	1:14
	2018	1.965	180.452	10.896	1:17
	2017	1.66	172.279	12.958	1:13
	2016	1.176	154.359	11.988	1:13

Sumber: Lombok Tengah Dalam Angka, 2022

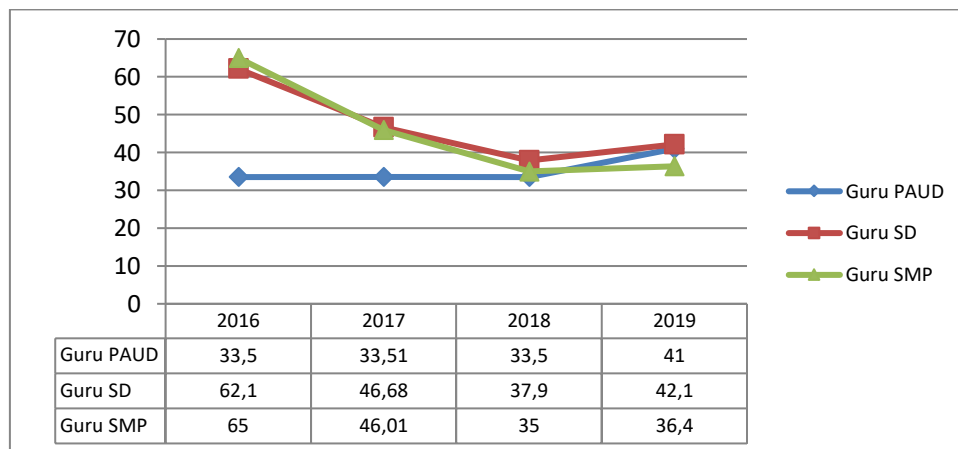
Nilai rasio guru murid digunakan untuk melihat kapasitas guru berdasarkan jumlah murid yang tersedia. Berdasarkan standar Permendikbud 23 Tahun 2013, untuk satu guru SD mengampu tidak lebih dari 32 murid dan satu guru di tingkat SMP diharapkan dapat mengampu tidak lebih dari 36 murid. Adapun berdasarkan Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, satu guru mengampu tidak lebih dari 15 murid PAUD yang berusia 4-6 tahun. Di jenjang SMA dan SMK, standar yang berlaku satu orang guru memiliki beban tidak lebih dari 20 murid. Dengan melihat standar yang berlaku, dapat disimpulkan rasio guru murid di Lombok Tengah telah memenuhi standar kelayakan.

Namun jika melihat distribusi guru PNS di lembaga-lembaga sekolah yang ada, perlu dilakukan pemerataan guru PNS baik di lembaga SD maupun SMP. Berdasarkan

data Neraca Pendidikan Daerah 2019, indeks pemerataan guru kelas SD sebesar 0,24 sedangkan indeks pemerataan guru mata pelajaran SD sebesar 0,46. Pada tingkat SMP, indeks pemerataan guru mata pelajaran yang di-UN-kan sebesar 0,38 sementara pemerataan guru mata pelajaran yang tidak di-UN-kan memiliki indeks sebesar 0,57. Nilai indeks pemerataan guru yang lebih besar dari 0 menunjukkan distribusi guru PNS belum merata.

(d) Sertifikasi Guru

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah adalah dengan melihat kualitas pendidiknya. Kualitas pendidik dapat diukur salah satunya dengan pendekatan sertifikasi guru. Sertifikasi guru secara umum bertujuan meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik dalam segala aspek atas bidang profesinya dalam kependidikan.



Gambar 2. 14 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah, 2020

Persentase guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru untuk jenjang PAUD terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019 dari semula 33,5 persen di tahun 2016 menjadi 41 persen di tahun 2019. Adapun jumlah guru yang tersertifikasi untuk jenjang SD dan SMP mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2018 namun kembali meningkat di tahun 2019. Di tahun 2019, persentase guru SD yang tersertifikasi adalah 42,1 persen sedangkan guru SMP yang bersertifikat sebanyak 42,1 persen.

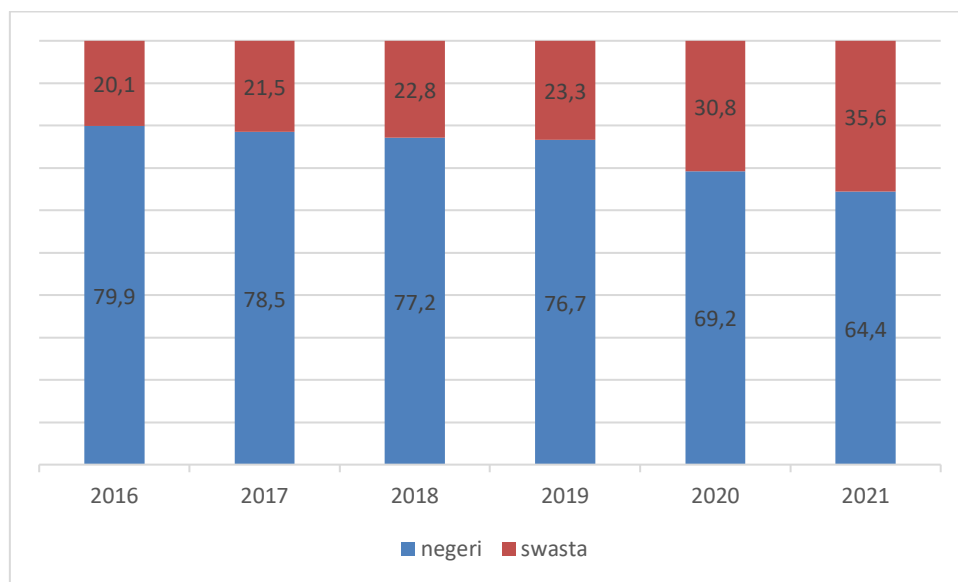
Masih rendahnya persentase guru bersertifikat di jenjang TK, SD dan SMP menunjukkan masih tingginya jumlah guru yang belum memperoleh sertifikasi guru dalam mengemban tugas mulianya. Untuk menjamin kualitas pendidikan yang semakin baik, jumlah dan sebaran guru bersertifikasi ini harus ditingkatkan untuk pengembangan profesi pendidik dan kependidikan di Kabupaten Lombok Tengah.

(e) Kualifikasi Lembaga Pendidikan

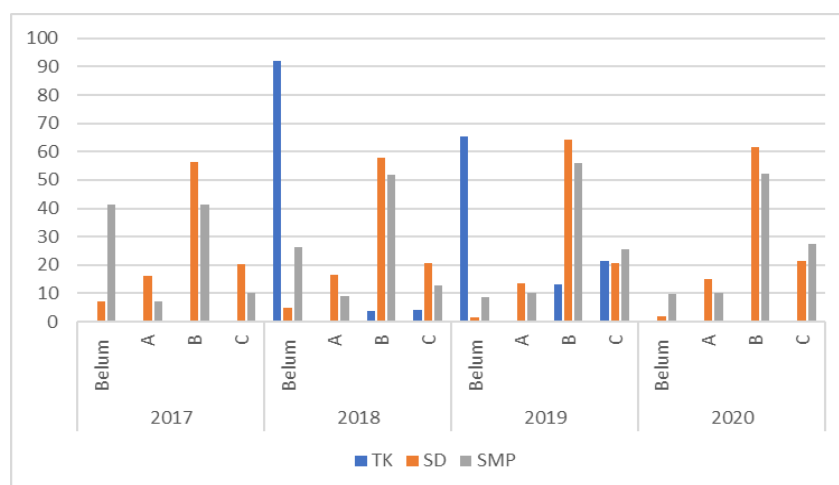
Sampai dengan tahun 2020 terdapat 1.162 unit sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut 1.004 unit sekolah

merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah untuk jenjang TK, SD dan SMP baik negeri maupun swasta.

Jumlah lembaga pendidikan berupa sekolah swasta di Lombok Tengah terus mengalami peningkatan bahkan melampaui peningkatan yang dialami sekolah negeri. Di tahun 2016, dari 870 lembaga mulai TK hingga SMA/SMK sebanyak 79,9 persen merupakan sekolah negeri sisanya 20,1 persen adalah swasta. Kondisi ini menunjukkan peningkatan di tahun 2020 dimana dari 1.162 lembaga yang ada sebanyak 69,2 persen adalah sekolah negeri dan 30,8 persen adalah swasta. Semakin besarnya kontribusi yang disumbangkan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan menunjukkan makin tingginya animo masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya pembangunan SDM di kabupaten ini. Pihak swasta yang banyak terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Lombok Tengah mencakup beberapa lembaga yayasan baik berupa yayasan keagamaan, sosial ataupun kemanusiaan.



Gambar 2. 15 Persentase Jumlah Sekolah Berdasarkan Status di Kabupaten Lombok Tengah 2016 – 2021
 Sumber : dapo.kemdikbud.go.id, 2022, diolah



Gambar 2. 16 Persentase Sekolah Berdasarkan Akreditasi di Kabupaten Lombok Tengah 2017-2020
 Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, 2020

Sampai dengan tahun 2019, masih terdapat 65,4 persen TK/PAUD yang belum terakreditasi dan belum ada yang memperoleh predikat akreditasi A di tahun 2019. Pada jenjang SD, baru 13,6 persen yang sudah terakreditasi A dan sebagian besar masih pada level akreditasi B. Hanya 1,5 persen lembaga pendidikan SD di Kabupaten Lombok Tengah yang belum terakreditasi. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan akreditasi A sebesar 14,9 persen dibandingkan pada tahun 2019

Jumlah lembaga SMP yang terakreditasi di Lombok Tengah lebih sedikit dari capaian akreditasi pada jenjang SD. Masih terdapat 8,5 persen SMP yang belum terakreditasi sampai tahun 2019. Hanya 10,2 persen SMP yang memperoleh akreditasi A dan lebih didominasi oleh SMP terakreditasi B dan C dengan jumlah mencapai 55,9 persen dan 25,4 persen. Jika melihat tren yang terjadi dari tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup baik dalam capaian akreditasi sekolah di kabupaten Lombok Tengah.

1.3.1.2 Kesehatan

Posyandu adalah wadah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita pada khususnya. Peran posyandu sangat penting dalam upaya pemantauan tumbuh kembang balita. Dengan adanya pemantauan perkembangan bayi dan balita ini diharapkan mampu mengidentifikasi adanya gangguan pertumbuhan sejak dini bagi anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 19 Rasio Posyandu Per 100 Balita Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021

No	Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu per 100 balita
1	2016	1.624	61.324	2,65
2	2017	1.653	56.507	2,93
3	2018	1.682	57.271	2,94
4	2019	1.686	59.271	2,84
5	2020	1697	-	1.9
6	2021	1697	-	1.9

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2021

Standar rasio posyandu menurut Kementerian Kesehatan adalah 1 posyandu untuk 50 balita atau dengan persamaan lain minimal ada 2 posyandu untuk 100 balita. Dengan melihat tren rasio posyandu per 100 balita di Kabupaten Lombok Tengah, dapat diketahui di tahun 2016 terdapat 1,65 unit posyandu untuk menangani 100 balita dan sampai tahun 2019 tercatat 2,84 posyandu yang menangani 100 balita. Rasio ini menunjukkan jumlah posyandu di Lombok Tengah

sudah memenuhi standar rasio sebagaimana dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan.

Rasio ketersediaan puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2020 menurut aturan dari Kementerian Kesehatan masih belum memadai. Idealnya, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah adalah 1:30.000. Saat ini Kabupaten Lombok Tengah memiliki 28 Puskesmas, jumlah ini diharapkan dapat meningkat menjadi 35 puskesmas untuk dapat memenuhi rasio ideal. Peningkatan jumlah puskesmas diharapkan akan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Keberadaan Puskemas selain memiliki fungsi kuratif juga berperan dalam menjalankan fungsi preventif. Peningkatan jumlah puskesmas diharapkan akan dapat berimplikasi pada optimalisasi implementasi fungsi puskesmas tersebut, apalagi saat ini tren atau kecenderungan perkembangan penyakit yang terjadi di kalangan masyarakat adalah penyakit tidak menular.

Disamping intervensi terhadap puskesmas, peningkatan kualitas layanan RSUD menjadi hal penting sebagai wujud dukungan pelayanan kesehatan di tingkat rujukan. Layanan Puskesmas dan RSUD bersifat saling melengkapi sehingga keberadaan puskesmas yang ada harus pula ditopang oleh peningkatan layanan tingkat rujukan di rumah sakit. Tuntutan ini menjadi penting mengingat sejumlah fasilitas kesehatan telah mengalami peningkatan di tahun 2019 baik berupa pukesmas pembantu, polindes dan posyandu. Berikut disajikan perkembangan jumlah sarana kesehatan tahun 2016-2021.

Tabel 2. 20
Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016-2021

Kecamatan	Puskesmas*	Puskesmas Pembantu	Polindes*	Posyandu**
1. Praya Barat	3	7	8	131
2. Praya Barat Daya	2	9	9	129
3. P u j u t	3	11	15	204
4. Praya Timur	2	8	8	175
5. Janapria	2	7	11	143
6. K o p a n g	3	8	8	135
7. P r a y a	3	6	15	150
8. Praya Tengah	2	6	12	117
9. Jonggat	3	9	12	148
10. Pringgarata	2	4	10	124
11. Batukliang	2	7	8	150
12. Batukliang Utara	2	5	7	91
Jumlah 2021	29	87	123	1.697
2020	28	86	123	1.686
2019	28	89	123	1.686
2018	28	95	123	1.668
2017	28	95	124	1.586
2016	28	97	124	1.624

Sumber: *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, 2020

** BPS Lombok Tengah, 2022

Unsur penunjang fasilitas kesehatan lainnya yang tidak kalah penting adalah tenaga kesehatan. Pada tahun 2019 jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 44 orang tenaga medis/dokter, 511 orang tenaga perawat dan 313 orang tenaga kebidanan.

Tabel 2. 21 Jumlah Tenaga Medis Yang Tersebar di Puskesmas Tahun 2016-2021

Tahun	Tenaga Medis/Dokter	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan
2016	44	491	272
2017	44	491	271
2018	132	830	431
2019	132	830	431
2020	44	511	313
2021	69	866	697

Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, 2022

1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator antara lain panjang jalan mantap, irigasi, rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi dan tata ruang.

(a) Panjang Jalan Mantap

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2016 sepanjang 477,31 Km atau 64,55% dari total panjang jalan kabupaten. Di tahun 2017 terjadi peningkatan jalan mantap menjadi 535,85 Km atau 72,5%. Terjadi penambahan panjang jalan kabupaten di tahun 2018 sepanjang 70,44 km dari beberapa ruas jalan desa sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Bupati Lombok Tengah Nomer 208 tahun 2017. Dengan adanya tambahan panjang jalan ini maka total panjang jalan kabupaten menjadi 809,88 Km sehingga persentase jalan mantap di tahun tersebut turun menjadi 67,68% seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

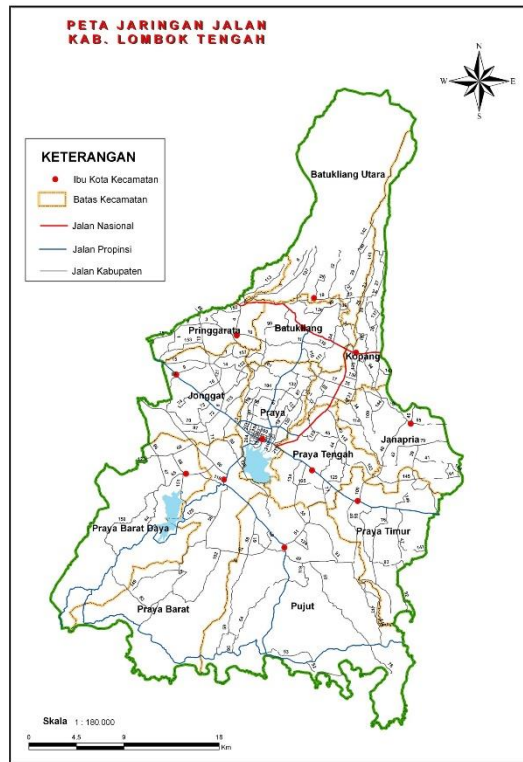
Tabel 2. 22 Perkembangan Jalan Mantap Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jalan Mantap	Jalan Tidak Mantap	Panjang jalan Kabupaten		
	Km	%	Km	%	Km
2016	477,31	64,55	262,13	35,45	739,44
2017	535,85	72,5	203,59	27,5	739,44
2018	571,94	70,62	237,94	29,38	809,88
2019	548,09	67,68	261,79	32,32	809,88
2020	526,66	65,03	283,21	34,97	809,88

Sumber: Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2021

Tantangan bidang kebinamargaan adalah mempertahankan umur teknis jalan agar tetap dalam kondisi mantap dan memenuhi target kondisi mantap 100 persen untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian harus dilakukan peningkatan jalan setiap

tahunnya minimal sepanjang 647,9 Km disamping tetap melakukan rehabilitasi jalan minimal sepanjang 50 Km setiap tahunnya.



Gambar 2. 17 Peta Jaringan Jalan Kab. Lombok Tengah
Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2020

Untuk memenuhi kondisi jalan yang mantap 100% maka perlu pemeliharaan sepanjang 90,91 Km terdiri dari jalan aspal hotmix kondisi sedang 73,07 km dan jalan aspal lapen kondisi sedang 17,84 km yang jika tidak dilakukan pemeliharaan maka akan menjadi kondisi rusak berat. Adapun kondisi jalan yang belum mantap dan perlu ditingkatkan adalah sepanjang 261,79 Km dengan kriteria rusak berat aspal hotmix 90,75 Km, aspal lapen 59,54 Km, jalan kerikil 59,84 Km dan jalan tanah 51,66 Km.

(b) Irigasi

Salah satu capaian kinerja bidang Sumber Daya Air adalah persentase panjang jaringan saluran irigasi induk dan sekunder dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan saluran irigasi induk dalam kondisi baik adalah panjang saluran irigasi Induk dalam kondisi baik dibagi dengan saluran irigasi induk jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal tersebut mengindikasikan kualitas saluran irigasi Induk dari keseluruhan panjang saluran irigasi Induk. Secara umum panjang jaringan saluran irigasi Induk dalam kondisi baik di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 proporsi panjang saluran irigasi Induk dengan kondisi baik sebesar 71,1 persen dari total panjang saluran irigasi Induk keseluruhan,

kemudian mengalami peningkatan menjadi 89,38 persen di tahun 2019, namun terjadi penurunan 85,68 persen di tahun 2020.

Indikator kedua di bidang Sumber Daya Air ini adalah cakupan luas layanan daerah irigasi sebesar 49.517 Ha dan dapat dipertahankan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 namun terjadi kenaikan cakupan luas areal 3.440,17 Ha sehingga menjadi 52.957,17 Ha sesuai luas penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lombok Tengah oleh pihak Provinsi.

Indikator ketiga adalah penyediaan debit air irigasi yang tersedia sebesar 23.108 liter/detik. Capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2019 namun ditahun 2020 turun 10% menjadi 20.797,2 liter/detik yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pasokan air (SA) yang secara hidrologis terus berkurang sementara beban areal yang ditangani semakin bertambah.

Tabel 2. 23 Perkembangan Capaian Indikator Layanan di Bidang Irigasi Kabupaten 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Panjang Saluran irigasi Induk dan sekunder dalam kondisi baik (%)	71,1	85,15	87,78	89,38	85,68
Luas Layanan Daerah Irigasi Kabupaten (Ha)	49.517	50.806	49.517	49.517	49.517
Debit air irigasi yang tersedia (lt/det.)	23.108	23.153	23.108	21.995	20.797

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2021

Tabel di atas menunjukkan di akhir tahun terjadi penurunan kinerja sistem irigasi. Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan meskipun masih tetap di atas ambang minimal 80 persen. Untuk mengukur kinerja bidang irigasi digunakan Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). IKSI adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Ada 6 aspek yang diukur dalam Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) antara lain Prasarana Fisik (45%), Produktifitas (15%), Sarana Penunjang (15%), Organisasi Personalia (15%), Dokumentasi (5%), dan P3A (10%) sehingga total indikator menjadi 100%. Data IKSI Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 24 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kab. Lombok Tengah

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Standar Kinerja Sistem Irigasi	60	60	60	60	60	60
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	61,5	61,5	66,3	69,0	63,0	56,1

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2021

Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebagai berikut: 80-100 : kinerja

sangat baik; 70-79 : kinerja baik; 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian; <55 : kinerja jelek dan perlu perhatian. Penggunaan nilai indikator 60 persen berdasarkan kemampuan pemda dan pusat dalam penyediaan APBD maupun APBN.

(c) **Sanitasi dan Air Bersih**

Salah satu capaian kinerja bidang air minum adalah persentase cakupan layanan air minum. Persentase cakupan layanan air minum adalah persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang dimaksud adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % secara rata-rata oleh masyarakat sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhan air bersih minimal 60 liter atau 0,06 m³ setiap harinya. Kondisi cakupan layanan air minum dari tahun 2016 sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 25 Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Layanan Air Minum	67,5	74,5	76	78	80
2	Cakupan Layanan Air Minum	67,5	74,6	76	77,28	77,28

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2021

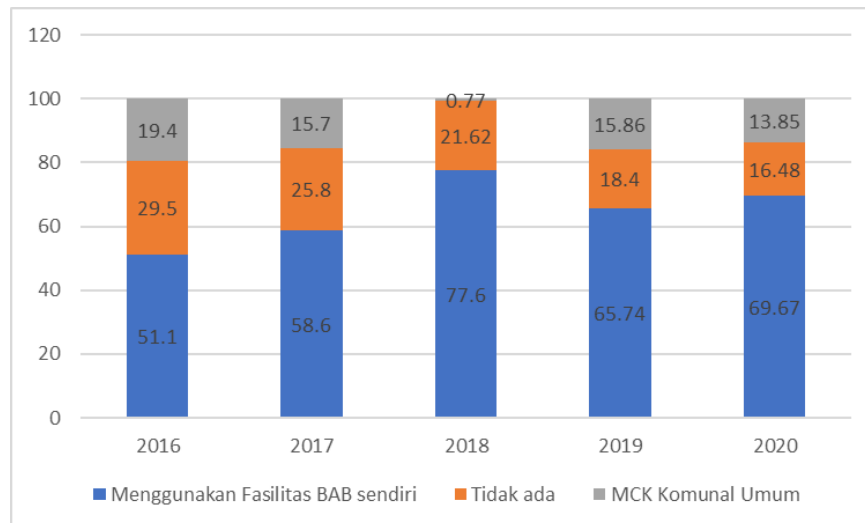
Dari tabel di atas dapat dilihat tren pencapaian layanan air minum sudah mencapai target sampai dengan tahun 2018 dan turun di tahun 2019 dan 2020 karena kegiatan pendukung dari APBN dan DAK tidak terealisasi di tahun tersebut dan pertumbuhan penduduk juga menambah beban layanan secara keseluruhan.

Setelah pemenuhan target MDGs di tahun 2019 berakhir, target tersebut dituangkan kembali dalam SDGs meskipun mengalami perubahan redaksi indikator menjadi cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan. Istilah aman ini adalah indikator pemenuhan terhadap air minum untuk kebutuhan sehari-hari tersedia setiap saat atau aman.

Indikator cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan adalah dengan membagi jumlah penduduk atau KK yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman dengan penduduk atau kk secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persen (%). Di tahun 2017, akses air minum terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang terlayani oleh sumber air minum dari PDAM baru mencapai 37,28 persen dengan total penduduk 912.879 jiwa dan jumlah penduduk terlayani hanya 340.312 jiwa.

Selain air bersih, ketersediaan fasilitas buang air besar (BAB) merupakan salah satu syarat penting yang dapat menjamin kesehatan lingkungan masyarakat sampai level

rumah tangga. Tidak adanya fasilitas buang air besar terutama milik sendiri akan menyebabkan ketidaknyamanan, karena kebutuhan akan fasilitas ini datangnya tak terduga. Untuk bisa memiliki fasilitas BAB sendiri di rumah memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu selain penting bagi kesehatan, fasilitas BAB juga menjadi indikasi kesejahteraan rumah tangga.



Gambar 2. 18 Persentase Jumlah KK Berdasarkan Jenis Fasilitas BAB di Kabupaten Lombok Tengah

Sumber : Inskesra Kab. Lombok Tengah, 2020

Kesadaran penduduk akan pentingnya keberadaan fasilitas BAB sepertinya sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri. Pada tahun 2019, sebesar 65,74 persen rumah tangga di Kabupaten Lombok Tengah sudah memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri/bersama. Meskipun demikian, masih terdapat 18,4 persen rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak punya fasilitas BAB. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena kebersihan lingkungan sangat menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020 persentase jumlah KK berdasarkan fasilitas BAB meningkat di mana yang memiliki BAB meningkat menjadi 69.67 persen dan yang tidak memiliki fasilitas BAB turun menjadi 16.48 persen

Capaian penanganan sanitasi di Kabupaten Lombok Tengah dapat diukur pula dari peningkatan jumlah desa ODF. Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) adalah Desa/ kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban. Untuk tahun 2020, jumlah desa ODF adalah 81 desa yang tersebar di seluruh Kecamatan, hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan perubahan perilaku dan pola hidup bersih yang sehat di tengah masyarakat.

(d) Tata Ruang

Perencanaan spasial wilayah terdiri dari rencana umum berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan rencana rinci berupa Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai rencana umum tata ruang telah ditetapkan pada tahun 2011 sebagai pijakan umum pembangunan spasial di kabupaten. Sebagai tindak lanjut operasionalnya diamanatkan untuk menyusun rencana rinci berupa kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten. Tahun 2015 Pemerintah Lombok Tengah telah menetapkan sejumlah dokumen rencana tata ruang antara lain RTRW yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2011; RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2006; Rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Praya dan Rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Kopang. Selain itu telah disusun pula RTBL Kawasan Strategis Perkotaan Praya berdasarkan Perbup Nomor 80 Tahun 2015 dan RTBL Kawasan Strategis Kuta melalui Perbup Nomor 81 Tahun 2015.

Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Tengah No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu : (i) Kawasan Kuta dsk; (ii) Kawasan Selong Belanak dsk; (iii) Kawasan Sade dsk; (iv) Kawasan Perkotaan Praya; dan (v) Kawasan Agropolitan Aik Meneng; (vi) Kawasan Minapolitan Gerupuk dan Awang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 386 Tahun 2019, BWP Kawasan sekitar KEK Mandalika seluas 3.778,83 Ha yang berada di Kecamatan Pujut, meliputi :

1. Desa Kuta dengan luas 1604,08 hektar;
2. Desa Prabu dengan luas 576,84 hektar;
3. Desa Mertak dengan luas 529,37 hektar;
4. Desa Sengkol dengan luas 170,94 hektar;
5. Desa Rambitan dengan luas 419,80 hektar; dan
6. Desa Sukadana dengan luas 306,94 hektar.

Hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang, baik RTR Kawasan Strategis maupun RDTR, yang menjadi acuan pembangunan di Kawasan Sekitar KEK Mandalika. Sampai dengan tahun 2020, Perda RDTR tersebut masih dalam proses penyusunan. Keberadaan Perda ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung KEK Mandalika untuk mendorong masuknya investasi di sekitar Kawasan KEK Mandalika.

1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jumlah kerusakan rumah pada saat terjadi bencana gempa bumi pada tahun 2018 sebesar 24.218 unit dengan kriteria rusak berat 4.483, rusak ringan 3.096 unit dan rusak ringan sebesar 16.639 unit. Adapun Rehab rumah yang sudah dikerjakan sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 berjumlah 23.384 unit.

Tabel 2. 26 Jumlah Rumah yang Direhabilitasi Akibat Bencana

No	Kecamatan	Kriteria Kerusakan			Jumlah Kerusakan	Data 634 yang belum dikerjakan			Jumlah kerusakan	Sebaran yang sudah dikerjakan			Jumlah Kerusakan
		RB	RS	RR		RB	RS	RR		RB	RS	RR	
1	Batukliang	2002	1072	4705	7779	44	28	137	209	1958	1044	4568	7570
2	Batukliang Utara	1481	623	2737	4841	26	32	154	212	1455	591	2583	4629
3	Janapria	36	55	1545	1636	3	1	19	23	33	54	1526	1613
4	Jonggat	53	93	1329	1475	1	2	34	37	52	91	1295	1438
5	Kopang	269	375	1865	2509	4	6	33	43	265	369	1832	2466
6	Praya	23	64	299	386				4	23	64	295	382
7	Praya Barat	14	5	42	61				0	14	5	42	61
8	Praya Barat Daya	1	2	11	14				0	1	2	11	14
9	Praya Tengah	13	30	187	230				0	13	30	187	230
10	Praya Timur	12	6	76	94			1	1	12	6	75	93
11	Pringgarrata	549	717	3625	4891	8	14	82	104	541	703	3543	4787
12	Pujut	30	54	218	302		1		1	30	53	218	301
	Total kerusakan	4483	3096	16639	24218	86	84	464	634	4397	3012	16175	23584

Sumber: BPBD Kab. Lombok Tengah, 2020

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dari inventarisasi yang dilakukan Dinas Perkim pada tahun 2019 sebesar 32.280 unit. Pada Tahun 2019, penanganan RTLH yang dilakukan sebesar 1.739 unit yang bersumber dari dana APBD, DAK perumahan, BPS Strategi dan Reguler serta Aspirasi. Untuk Tahun 2020, penanganan RTLH ditargetkan sebesar 1.574 unit sehingga sisa RTLH yang belum tertangani adalah 28.967 unit. Pada tahun 2021 RTLH dilakukan dengan jumlah yang tertangani sebesar 456 dengan target sebesar 1000 ditahun 2021

Tabel 2. 27 Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lombok Tengah

Uraian	Jumlah RTLH (unit)
Data RTLH tahun 2019	32.280
RTLH yang ditangani tahun 2019	1.739
RTLH yang ditangani tahun 2020	1.574
RTLH yang tertangani tahun 2021	456
Sisa belum tertangani	28.967

Sumber: Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah, 2022

Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah berdasar atas tujuh aspek yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman. Tujuh aspek tersebut adalah kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Pada tahun 2020, pengurangan kawasan kumuh sebanyak 6,31 Ha sehingga total pengurangan kawasan kumuh sampai tahun 2020 sebanyak 58,16 Ha. Dengan demikian luas kawasan kumuh yang belum tertangani sebanyak 51.84 Ha.

Tabel 2. 28 Luas Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	110	60,14	69,43	58,15	51.84	37.75

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2022

Dalam perkembangan penangan kawasan kumuh, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan inventarisasi ulang kawasan kumuh dengan melakukan pendataan lebih luas dengan tujuan agar semua kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah dapat tertangani. Berdasarkan hasil pendataan tersebut dihasilkan delienasi kawasan kumuh seluas 815,37 ha di tahun 2020 dan ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah dengan SK Nomer 384.a Tahun 2020, sebagaimana peta dibawah ini.



Gambar 2. 19 Peta Kawasan Kumuh Lombok Tengah berdasarkan SK No.384.a Tahun 2020

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah, 2020

Pada tahun 2021 permukiman Kab. Lombok Tengah tergolong Kawasan kumuh mengalami penurunan sebesar 32,75 Ha, yang menandakan bahwa Kawasan kumuh mulai berkurang di wilayah Kab. Lombok Tengah.

1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama tahun 2016-2019 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Berdasarkan data capaian RPJMD 2016-2021, persentase penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah selalu berada di angka 100%. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah sudah melakukan upaya terbaik dalam mewujudkan trantib dan linmas yang kondusif.

Dari aspek keamanan, jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2016 sebanyak 1.024 kasus, pada tahun 2017 turun menjadi 987 kasus, pada tahun 2018

meningkat lagi menjadi 1.085 kasus dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 439 kasus. Jenis kejahatan yang dilaporkan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) selalu menjadi jenis kejahatan terbanyak di tiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah kejahatan yang dilaporkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 semula berjumlah 655 kasus menjadi 597 kasus.

Tabel 2. 29 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Kepolisian Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
Praya Barat	61	63	44	40	20
Praya Barat Daya	26	40	38	33	23
Pujut	126	167	109	36	64
Praya Timur	45	51	41	39	27
Janapria	44	58	49	43	23
Kopang	31	39	47	59	18
Praya	80	144	94	57	341
Praya Tengah	24	35	29	24	17
Jonggat	51	63	42	29	21
Pringgarrata	40	53	61	24	23
Batukliang	42	42	66	58	15
Batukliang Utara	32	52	35	20	5
Total	612	807	665	655	597

Sumber : Lombok Tengah Dalam Angka (2022)

Bencana merupakan ancaman paling nyata bagi eksistensi kehidupan manusia sehingga sebagai daerah yang masuk sebagai wilayah beresiko bencana, Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi sebagai upaya mengurangi dampak bencana yang dihadapi masyarakat. Jenis bencana yang terjadi dari tahun 2016-2019 menunjukkan fluktuasi angka sebagaimana ditunjukkan pada tabel.

Tabel 2. 30 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019

Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019
1. Bencana Alam	28	71	46	18
a. Banjir	2	22	6	3
b. Puting Beliung	21	33	23	7
c. Tanah Longsor	5	6	2	0
d. Gempa Bumi	0	1	7	0
e. Kekeringan	0	9	8	8
2. Bencana Non Alam	19	27	15	26
a. Kebakaran	19	27	15	26
b. Kegagalan Teknolog/Kontruksi	0	0	0	0
3. Bencana Sosial	0	0	0	0
a. Kerusakan Sosial/Politik	0	0	0	0
b. Konflik Sosial	0	0	0	0
Total	47	98	61	44

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2020; BPBD Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.1.6 Sosial

Menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urgensi pelaksanaan urusan sosial bagi pemerintah daerah ini adalah sebagai

perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan dasar penanggulangan masalah sosial bagi seluruh masyarakat di wilayah kabupaten. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai indikator pelaksanaan pelayanan sosial tersebut dapat dilihat pada tabel yang disajikan di bawah ini yaitu terkait dengan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dan program daerah sendiri.

Program pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka perlindungan sosial diantaranya adalah program keluarga harapan (PKH), program beras miskin, jaminan kesehatan dan beasiswa bagi masyarakat miskin. Selain itu ada juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Program ini memberikan dampak pada peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung pencapaian target pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Program daerah yang dilaksanakan mengacu pada target-target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dilihat capaian kinerjanya dalam tabel dibawah ini. Indikatornya terkait dengan PMKS yang memperoleh Bantuan sosial terkait pemenuhan kebutuhan dasar, PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Layanan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia, Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyandang cacat yang dilatih. Program-program pokok tersebut bersama pendukungnya memiliki dampak langsung untuk mengatasi persoalan dibidang sosial.

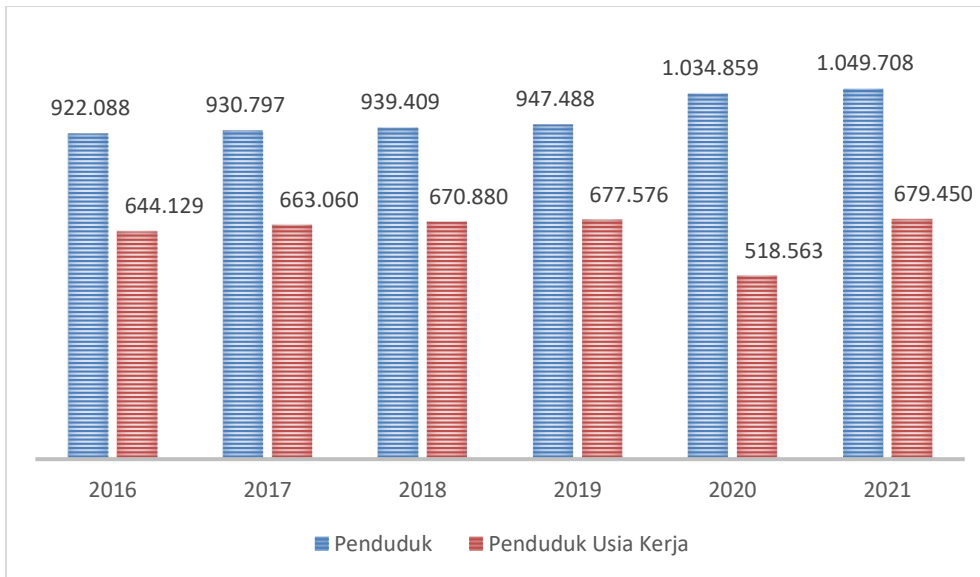
Tabel 2. 31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2019

Uraian Indikator kinerja	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Persentase PMKS Skala Kabupaten yg memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar	47,38	40,00	28,27	40,37

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.1.7 Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, maka pemerintah daerah perlu memperluas kesempatan kerja untuk menyerap tambahan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 sebanyak 679.450 orang.



Gambar 2. 20 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Penduduk Usia Kerja Tahun 2016-2021 (jiwa)

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Menurut BPS, tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi oleh tenaga kerja di sektor informal. Besarnya kesenjangan jumlah tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh sektor formal menunjukkan besarnya tantangan Pemerintah Daerah ke depan agar sumberdaya tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah dapat terserap lebih banyak di sektor formal.

Guna menyiapkan sumberdaya tenaga kerja terlatih, pelatihan keterampilan bekerja dilaksanakan melalui penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal maupun informal. Selain itu Pemerintah Daerah juga memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi pencari kerja bersertifikat di BLK dengan jenis pelatihan yang cukup beragam.

1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sampai dengan tahun 2019, tercatat ada 6 lembaga informal yang terbentuk sebagai respon terhadap isu perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah lembaga ini bertahan dari tahun 2016 yaitu LPA, PEKKA, KPI, JARPUK, GAGAS, dan SANTAI. Lembaga tersebut telah berdiri dari tahun 2008 dan masih aktif melaksanakan pendampingan dan advokasi terkait perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah.

Khusus mengenai perlindungan terhadap anak, Pemerintah kabupaten Lombok Tengah bersama DPRD telah menetapkan regulasi lokal yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

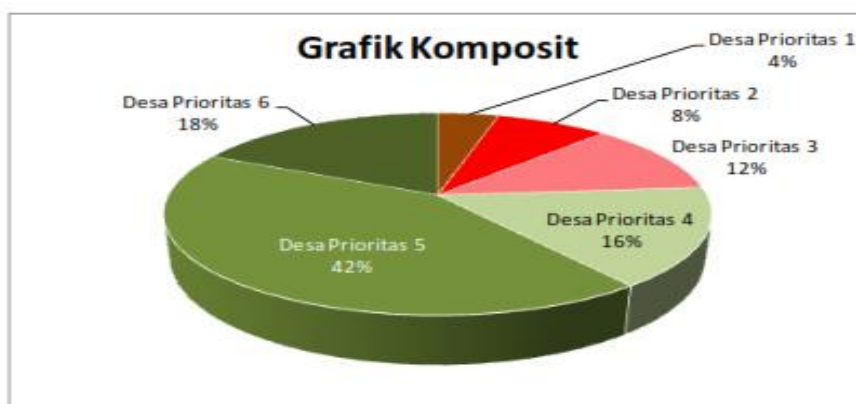
Tabel 2. 32 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Tertangani Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani
2016	72	72	80	80
2017	53	53	59	59
2018	84	84	41	41
2019	55	55	33	33
2020	43	43	44	44

Sumber : DP3AP2KB Kab. Lombok Tengah, 2021

1.3.1.9 Pangan

Konsepsi ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan analisis tiga pilar ketahanan pangan tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 menunjukkan bahwa ketahanan pangan berkinerja baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya desa di Kabupaten Lombok Tengah yang berstatus rawan pangan. Gambaran ketahanan pangan komposit dapat dilihat pada grafik berikut.

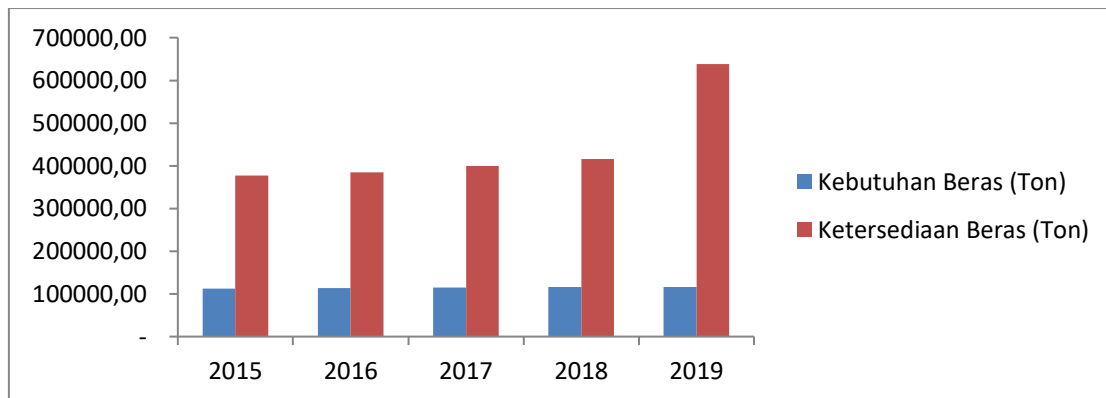


Gambar 2. 21 Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas Kerawanan dan Kerentanan Pangan
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah, 2019

Grafik di atas menunjukkan terdapat 4% desa di Lombok Tengah yang tergolong desa rentan tinggi terhadap kerawanan pangan (prioritas 1). Desa yang berkategori rentan sedang terhadap kerawanan pangan (prioritas 2) sebesar 8% dan 12% desa lain berkategori rentan rendah terhadap kerawanan pangan (prioritas 3). Grafik di atas juga menunjukkan sebanyak 76% desa memiliki status aman terhadap kerawanan pangan (prioritas 4 -6).

Secara aktual dari aspek ketersediaan pangan, indikator ketahanan pangan berupa tersedianya pangan utama bagi masyarakat. Ketersediaan pangan utama tersebut

harus terpenuhi dengan jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kinerja ketahanan pangan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja baik yang diindikasikan dengan tercukupinya kebutuhan pangan pokok masyarakat. Bahkan produksi pangan mengalami surplus dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan utama (beras) dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 22 Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (Beras) di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 - 2019

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah, 2020

Angka kecukupan konsumsi energi dan protein juga menunjukkan capaian yang baik, dimana tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat Lombok Tengah melebihi standar konsumsi energi protein dan energi yang telah ditetapkan. Pada aspek keragaman konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan kinerja yang baik pula dengan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Perkembangan konsumsi energi, konsumsi protein dan skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 33
Perkembangan Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021**

No	Komponen	Target/Standar	Capaian Skor PPH Kabupaten Lombok Tengah					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Konsumsi energi (Kkal/Kap/Hai)	2.000	2.317,0	2.518,9	2.440,67	2.565,36	2.588,63	2.469.6
2	Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	52	96,6	128,3	71,19	76,92	79.63	75.3
3	Skor PPH	85	85,9	86,2	85,5	90,7	-	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2022

1.3.1.10 Pertanian

Kegiatan pengadaan tanah pada Tahun 2016-2019 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan usulan dari SKPD. Selain itu pengadaan tanah juga difokuskan pada partisipasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2016, pemerintah daerah telah menyediakan tanah bagi pembangunan fasilitas dan atau

penyelenggaraan kepentingan umum seperti pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan umum.

Tabel 2. 34 Pemanfaatan Tanah untuk Fasilitas Umum Kab. Lombok Tengah

Tahun 2019	Luas (Ha)	Tahun 2020	Luas (Ha)
Pendopo Bupati	0,02	Puskesmas Awang	0,04
Rusus Nelayan Bilelando	1	Puskesmas Bagu	
Rusus Nelayan Selong Belanak	1	Pengganti SD Toner dan SMP 15 Pujut	1,1
Jalan BIL-Mandalika*	100	Spam Mandalika	2,3
		Puskesmas Bagu	2,85
		Pengganti Lapangan Sengkol	1
Jumlah	102,02		7,29

Sumber: Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah, 2020

Pada tahun 2017, pelaksanaan urusan pertanahan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan usulan dari SKPD terkait serta untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2018, pengadaan tanah dilaksanakan untuk pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan umum. Pada tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pembangunan pendopo Bupati Lombok Tengah, rusus nelayan di Bilelando dan Selong Belanak dan jalan BIL – Mandalika. Tahun 2020, pengadaan tanah oleh Pemda berupa lahan puskesmas Awang, puskesmas Bagu, pengganti SD Toner dan SMP 15 Pujut, lahan SPAM Mandalika dan pengganti lapangan umum Sengkol.

1.3.1.11 Lingkungan Hidup

(a) Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil penilaian indeks kualitas lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK pada tahun 2020, Kabupaten Lombok Tengah memiliki Indeks Kualitas Udara sebesar 93,964 point dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,48 point. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Lombok Tengah di tahun yang sama adalah sebesar 51,11 point.

Tabel 2. 35 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

IKA	IKU	IKTL
51,11 *	93,964	33,48

Sumber:Kementrian LHK, 2020

Pada tahun 2019, jumlah mata air berdasarkan hasil survey PDAM berjumlah 68 sumber mata air dengan debit air berjumlah 1.889 lt/detik. Adapun sumber mata air yang digunakan oleh PDAM dalam memerikan layanan air bersih berasal dari 6 sumber yakni mata air Tibu lempanas, Benang stokel, Benang Kelambu, Aik Bone, Tibu Nangklok, WTP dengan Debit kapasitas terpasang sebesar 916 ltr/dtk, namun kapasitas produksi hanya sekitar 516 ltr/detik.

Tabel 2. 36 Kondisi Sumber Air Baku PDAM Lombok Tengah

No	Sumber Air Baku	Nama Sumber	Kap Terpasang (l/dtk)	Kap Produksi	Daerah Pelayanan	Keterangan
1	Aik Bone	Mata Air	70	60	Kecamatan Praya, Kopang	Baik
2	Tibu Nangklok	Mata Air	160	160	Kecamatan Jonggat, Praya	Baik
3	Benang Stokel	Mata Air	60	60	Kecamatan Batuliang, Pringgarata	Baik
4	Nyeredep	Mata Air	26	-	-	Tidak Berfungsi
5	Sesere	Mata Air	200	80	Kecamatan Janapria, Praya Timur, Batukliang	Baik
6	Lempanas	Mata Air	200	50	Kecamatan Praya Tengah, Pujut	Baik
7	WTP	Danau	200	160	Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut	Baik
	Sub Total		916	516		

Sumber : PDAM Lombok Tengah, 2020

Pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yaitu tindak lanjut laporan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Di Bidang Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, telah dilakukan pemantauan, inventarisasi dan indentifikasi terhadap perusahaan atau kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan limbah dan telah mengolah air limbah serta membuang air limbah ke media lingkungan.

Disamping melaksanakan upaya-upaya di atas, pemerintah daerah juga telah melaksanakan kegiatan pemulihan lahan kritis dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2015 Luas lahan kritis yang dipulihkan sampai dengan Tahun 2015 seluas 2.000 Ha dan dilakukan secara bertahap selama 5 Tahun atau tiap tahun 400 Ha Lahan yang dikonservasi dengan cara penanaman pohon, sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

(b) Persampahan

Volume timbunan sampah perhari di Kabupaten Lombok Tengah dengan asumsi kontribusi sampah per orang per hari sebesar 2 liter/org/hr adalah sebesar 1.716 m³/hari dan dalam satu tahun sebesar 625.513 m³/tahun, dimana penyumbang sampah terbesar terdapat di Kecamatan Praya sebesar 83%. Kemampuan armada untuk pengangkutan sampah pada tahun 2018 sebesar 22% dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 25%. Adapun sampah yang terangkut masih di ibu kota Kecamatan.

Tabel 2. 37 Analisis Produksi Sampah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

No	Ibukota Kecamatan	Total Produksi Sampah		Sawah Terangkut								
				2018			2019			2020		
		m3/hari	m3/tahun	m3/hari	m3/tahun	%	m3/hari	m3/tahun	%	m3/hari	m3/tahun	%
1	Praya	203	74,083	168	61,320	83	168	61,320	83	174	63,510	86
2	Batunyalala	121	44,137	47	17,155	39	47	17,155	39	47	17,155	39
3	Ubung	177	64,525	37	13,505	21	37	13,505	21	37	13,505	21
4	Mujur	130	47,324	29	10,585	22	29	10,585	22	29	10,585	22
5	Kopang Rembiga	154	56,159	37	13,505	24	37	13,505	24	37	13,505	24
6	Sengkol	193	70,300	56	20,440	29	56	20,440	29	56	20,440	29
7	Penujak	138	50,241			0	25	9,125	18	25	9,125	18
8	Darek	103	37,673			0			0	4	1,460	4
9	Janapria	138	50,244			0	4	1,460	3	4	1,460	3
10	Pringgarata	121	44,254			0			0			0
11	Mantang	145	52,778			0	5	1,825	3	10	3,650	7
12	Teratak	93	33,795			0			0	4	1,460	4
	Jumlah	1,716	625,513	374	136,510	22	408	148,920	24	427	155,855	25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah, 2021

Kondisi sarana persampahan masih terbatas dimana jumlah truk sampah sebesar 10 unit dan hanya 5 unit saja dalam kondisi baik. Begitu juga dengan peralatan lainnya seperti *arm roll*, *pick up*, alat berat maupun roda tiga yang masih sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala dalam melayani persampahan di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 38 Jumlah dan Kondisi Sarana Persampahan Kab. Lombok Tengah

No	Jenis Sarana	Kondisi			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Truck sampah	5	4	1	10
2	Arm roll	4	4	-	8
3	Truck biasa	1	-	-	1
4	Pick Up	4	-	-	4
5	Alat berat	3	1	-	4
6	Roda tiga	21	5	1	27
7	Container sampah	19	5	3	27
8	TPA	1	-	-	1

Sumber: Dinas LH Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Jumlah petugas kebersihan adalah 221 orang yang terdiri dari pengawas kebersihan, petugas retribusi, tukang sapu sampai petugas jaga malam TPA. Adapun untuk tukang sapu berjumlah 108 orang, dimana ASN berjumlah 5 orang dan Honorer berjumlah 103 orang. Hal ini tentu saja masih sangat terbatas sehingga layanan yang sanggup diberikan masih terbatas berupa pembersihan ruas jalan di dalam kawasan Kota Praya.

Tabel 2. 39 Jumlah Petugas Kebersihan Tahun 2020

No	Jenis Petugas	Jumlah (Orang)		
		PNS	Honorer	Jumlah
1	Pengawas Kebersihan	11	-	11
2	Petugas Retribusi	7	-	7
3	Tukang Sapu	5	103	108
4	Pengangkut Sampah	11	33	44
5	Sopir Dump Truck	6	12	18
6	Operator Alat Berat	-	3	3
7	Operator Roda Tiga	1	14	15
8	Pencatat Volume Sampah TPA	-	1	1
9	Petugas Jaga Malam TPA	-	2	2

No	Jenis Petugas	Jumlah (Orang)		
		PNS	Honoror	Jumlah
10	Petugas PDU	-	12	12
	Jumlah	41	180	221

Sumber: Dinas LH Kabupaten Lombok Tengah, 2021

1.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pelayanan pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Pada kurun waktu 2016-2019 Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melayani pembuatan kartu penduduk sebanyak 681.774 orang atau 91,15% dari 747.929 penduduk wajib KTP. Perkembangan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Kepemilikan KTP di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase yang punya KTP
2016	1.029.170	70,96
2017	1.033.619	76,93
2018	1.041.664	89,52
2019	1.043.759	91,15
2020	1,034,859	91,93
2021	1.049.708	99,16

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lombok Tengah, 2022

1.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk peningkatan kapasitas keuangan pemerintah desa telah dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Lainnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 41 Jumlah ADD, DD dan Bantuan Keuangan Lainnya untuk Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

NO	TAHUN	ADD dan DD	BANTUAN KEUANGAN LAINNYA	TOTAL
1	2016	200.704.825.700	3.359.800.000	204.064.625.700
2	2017	224.955.767.464	4.987.000.000	229.942.767.464
3	2018	261.938.694.400	1.692.000.000	263.630.694.400
4	2019	303.772.9700.200	2.363.200.000	306.136.170.200
5	2020	322.044.237.700	5.456.400.000	327.500.637.700
6	2021	324.930.085.217	3.436.888.843	328.366.974.060

Sumber: DPMD Kabupaten Lombok Tengah, 2022

Untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan daerah tentang pemerintahan desa yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa

2. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes yang ditetapkan setiap tahun.
3. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan setiap tahun.
4. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan ADD yang ditetapkan setiap tahun
5. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa
6. Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Adat di setiap desa
7. Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8. Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Masyarakat Desa
9. Peraturan Bupati tentang Pilkades Serentak
10. Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Ekowisata
11. Rancangan Peraturan Bupati tentang Bumdes
12. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
13. Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa
14. Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Pemdes dan BPD
15. Peraturan Bupati tentang BPD.

1.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perbandingan antara jumlah akseptor aktif dan pasangan usia subur di Kabupaten Lombok Tengah berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2018, persentase akseptor aktif terhadap PUS mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya namun kembali meningkat tajam di tahun 2019. Tingkat partisipasi akseptor ditunjukkan juga oleh angka drop-out KB dan angka unmet need KB yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2016-2019. Peningkatan ini berakibat pada makin rendahnya partisipasi aktif penduduk pasangan usia subur menjadi akseptor KB. Perkembangan pasangan usiasubur dan akseptor aktif tahun 2016-2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 42 Tingkat Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Tahun	Pasangan Usia Subur	Akseptor Aktif	% Akseptor Aktif Terhadap PUS	Drop-out KB	Unmet need
2016	234.065	166.967	71,44	13.765	31.650
2017	234.065	166.967	71,44	18.944	33.250
2018	217.775	146.114	67,09	24.199	32.906
2019	161.073	139.642	86,7	24.976	36.333

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2020; DP3A2KB Kab. Lombok Tengah, 2019

1.3.1.15 Perhubungan

Sampai dengan tahun 2020 jumlah rambu jalan yang dimiliki sebanyak 2.316 buah. Pagar pengaman jalan telah terpasang di 532 m dan patok tikungan sebanyak 560 buah. Hal tersebut diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Tabel 2. 43 Fasilitas Keselamatan LLAJ (Rambu / RPPJ) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

No	Fasilitas	Satuan	Jumlah Terpasang					Jumlah
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Traffic Light	Unit	11	-	-	-	-	11
2	Warning Light	Unit	1	-	-	-	-	1
3	RPPJ	Buah	15	12	10	-	-	37
4	Marka Jalan	m2	4.075	1.531	1	-	-	6.606
5	Pagar Pengaman Jalan	M	472	-	60	-	-	532
6	Rambu Jalan	Buah	2.001	105	110	100	-	2.316
7	Patok Tikungan	Buah	390	40	100	30	-	560
9	Traffic Cone, Rambu Pengalih Arus, Road Barrier	Buah	-	42	140	40	-	222

Sumber : Dishub Kab. Lombok Tengah, 2020

Sampai tahun 2020 sudah tersedia 11 *traffic light* yang terpasang di tempat-tempat yang termasuk strategis meskipun beberapa diantaranya ada yang tidak bisa difungsikan karena rusak.

Dari 4 (empat) unit terminal yang ada hanya 1 unit yang berfungsi yaitu Terminal Mujur. Terminal Renteng sudah menjadi kewenangan provinsi dan Terminal Kopang sudah beralih fungsi menjadi pusat pertokoan. Terminal Sengkol juga telah berubah menjadi puskesmas dan belum ada terminal baru sebagai penggantinya. Realisasi cakupan layanan trayek sebanyak 80% hingga tahun 2019.

Cakupan layanan angkutan jalan yaitu jaringan angkutan jalan Dinas Perhubungan telah memiliki moda transportasi perdesaan sebanyak 8 unit untuk melayani wilayah strategis termasuk KSPN Mandalika. Di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan telah memiliki UPT PKB. Sedangkan cakupan layanan di bidang prasarana angkutan jalan telah memiliki sarpras jalan dan keselamatan jalan namun belum berfungsi baik.

Selain itu untuk mendukung kelancaran sarana transportasi untuk masyarakat terdapat 8 (delapan) jalur perintis yang tersebar di beberapa kecamatan baik di wilayah selatan, tengah maupun utara. Pembukaan trayek perintis ini diharapkan mampu mendukung aktifitas ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.

Tabel 2. 44 Trayek dan Trayek Perintis

No	Trayek Lama	Trayek Perintis
1	Renteng- Mantang – Aik Bukak	Mantang – Aik Bukak-Setiling
2	Renteng- Mantang – Pancor Dao	Mantang – Pancor Dao- Tratak
3	Renteng- Kopang – Mt. Gamang-Janapria-Ganti	Renteng –Darek-Batujangkih
4	Renteng-Kopang-Wajegeseng	Renteng-Pemepek-Rarung
5	Renteng- Mujur – Awang	Selong Blanak-Kuta –Awang
6	Renteng- Mujur – Janapria	Renteng- Sengkol-Kuta Gerupuk
7	Renteng- Mujur – Kruak	Sengkol-Teruwai-Awang
8	Renteng-Batunyale-Sengkol- Kuta	Puyung-KODIM-KPPRD-Pendopo-Banjar-Biao-Jontlak-RSUD-Rabitah-Toyang-Tengari-Tebero-Renteng-Puyung. (Bus angkot dalam Kota/angkutan Pelajar)
9	Renteng-Penujak-Sengkol- Kuta	
10	Renteng-Penujak-Mangkung- Selong Blanak	
11	Renteng-Darek- Pelambik	
12	Renteng- Puyung- Bunjeruk	

Sumber: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Dari 14 jalur trayek sesuai dengan SK Bupati Nomor 1075 Tahun 2001 tentang Jalur Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, semuanya sudah tidak beroperasi lagi. Hasil survey membuktikan rata-rata para pengemudi angkutan perdesaan adalah pemilik langsung dari armada yang dikemudikannya tersebut. Mereka mencari penumpang dengan karakter perjalanan dari pintu ke pintu (*door to door service*) tanpa melewati rute yang telah ditetapkan. Dengan kondisi lapangan tersebut, pelayanan angkutan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah dapat dikatakan menyimpang dari trayek yang telah ditetapkan. Saat ini angkutan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah hanya melayani 3 lintasan yaitu lintasan utara (LU), lintasan timur (LT), dan lintasan selatan (LS). Pada lintasan inilah terdapat ruas-ruas jalan yang sering dilalui oleh angkutan umum untuk melayani masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 45 Angka Kecelakaan Kab. Lombok Tengah 2017 - 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kecelakaan	160	210	201	157	138

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2022

Angka kecelakaan Kab Lombok Tengah mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021, tingkat kecelakaan yang terjadi di Kab. Lombo Tengah sebesar 138 kejadian pada tahun 2021.

1.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah berinvestai infrastuktur jaringan pada semua OPD dan Kecamatan

se-Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu untuk komunikasi data dan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah membangun situs resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yakni www.lomboktengahkab.go.id dengan rata-rata kunjungan pada tahun 2019 sejumlah 38.395 pengunjung atau meningkat 150% dari tahun 2018 sejumlah 15.375 pengunjung. dan terus mengembangkannya mengikuti teknologi informasi yang terus berkembang.

Di bidang pengelolaan *e-government* telah dimanfaatkan beberapa sistem informasi yang mendukung pelaksanaan urusan umum pemerintahan diantaranya SIPD-SIMDA Penganggaran, e-MONEV, SIMTASKIN, SIMPBB, SIMPEG, SIMKESDA, e-AUDIT, SIAK, e-PROUCEMENT, SIM pengadaan barang dan jasa, dalam proses pelaksanaan SIMDA Perencanaan dan 32 website OPD yang lokasi penyimpanan datanya sudah di server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Website untuk pelayanan publik yang sudah ada di Kabupaten Lombok Tengah antara lain :

- a. Website Korona untuk informasi covid -19 : <https://corona.lomboktengahkab.go.id/>,
- b. Website GIS Menara : <https://gis-menara.lomboktengahkab.go.id>
- c. Website Lombok Tengah : <https://lomboktengahkab.go.id/domain>
- d. Website Satu Data : <https://satudata.lomboktengahkab.go.id>
- e. Website PPID : <https://ppid.lomboktengahkab.go.id>

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan PPID akan menjadi media pelayanan publik agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi secara online. Kabupaten Lombok Tengah memiliki sistem informasi yang bisa memajemen permintaan informasi ke semua OPD secara online untuk selanjutnya disampaikan ke publik. Dalam upaya menciptakan dan menjamin kelancaran pelayanan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah telah disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

PPID utama Kabupaten Lombok Tengah telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik Menuju Informatif Katagori kabupaten/kota Provinsi NTB pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik "informatif".

Pengembangan sistem informasi di Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan dukungan penambahan server fisik dan virtual, penambahan infrastruktur jaringan, server aplikasi, dan peningkatan Storage server untuk menampung aplikasi dan

bandwidth dedicated. Selain itu diperlukan komitmen semua OPD untuk menjalankan dan mengupdate informasi pada website masing-masing, dan peningkatan HDD server yang masih kurang untuk menampung semua aplikasi pelayanan publik.

1.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan khususnya terhadap UMKM kategori usaha mikro. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bupati Lombok Tengah untuk menciptakan 10.000 wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pelatihan serta bantuan sarana usaha bagi para wirausaha baru.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja UMKM, melakukan fasilitasi kemitraan permodalan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Capaian realisasi fasilitasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat baik dari jumlah UMKM penerima KUR maupun dari jumlah dana yang terserap. Pada tahun 2020 perkembangan KUR mencapai peningkatan sebesar 121,6% dibandingkan dengan realisasi penyerapan KUR tahun 2017. Nilai aktual realisasi KUR 2020 sebesar Rp. 440.561.000.000,-.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah koperasi aktif yang tercatat di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebanyak 219 unit. Jumlah koperasi aktif terbanyak berada di Kecamatan Praya yaitu sebanyak 60 unit dan paling sedikit di Kecamatan Kopang sebanyak 7 unit. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah koperasi aktif di tahun 2019 mengalami penurunan dari semua 239 unit di tahun 2018 menjadi 219 unit di tahun 2019. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah terjadi penyusutan jumlah koperasi aktif mencapai 20 unit. Seiring dengan berjalannya waktu jumlah koperasi aktif di Kab. Lombok Tengah untuk setiap kecamatan sebagian besar mengalami peningkatan di tahun 2021.

Tabel 2. 46
Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2021

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
Praya Barat	12	15	16	23
Praya Barat Daya	7	9	9	10
Pujut	41	38	39	35
Praya Timur	23	15	18	25
Janapria	14	10	12	11
Kopang	11	7	8	12
Praya	64	60	65	71
Praya Tengah	10	9	9	12
Jonggat	19	15	17	20
Pringgarrata	15	18	18	21
Batukliang	13	13	14	16

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
Batukliang Utara	10	10	10	11
Jumlah	239	219	235	265

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2022

1.3.1.18 Penanaman Modal

Capaian kinerja urusan penanaman modal daerah selama kurun waktu 2016-2019 secara umum mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi ini antara lain didukung oleh pengembangan perizinan dan penanaman modal secara regional dan nasional serta adanya berbagai perbaikan dari sistem pelayanan dan proses penerbitan ijin investasi. Capaian ini juga didukung oleh pengembangan sistem informasi penanaman modal, *quick respon* pengaduan masyarakat terkait perijinan serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan perijinan. Hal tersebut berdampak positif terhadap jumlah ijin investasi yang diterbitkan serta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 47 Target & Realisasi investasi Kab. Lombok Tengah 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)
1	Nilai Investasi PM DN	Juta Rupiah	785096	281807 (970.851)	896000	71004 (1.041.854,91)	102104 (1.172.131)	130275,9 (1.172.131)	116404 (1.290.940)	118809 (1.290.940)	116404 (1.290.940)	1446171	132704 (6)	1844517
2	Nilai Investasi PM A	Ribu US Dollar	1239072	135350,68 (1.338.960,68)	1276091	67151,02 (1.406.111,70)	1315022 (1.475.916)	69804,5 (1.475.916)	1354067 (1.545.844)	69927,34 (1.545.844)	1354067 (1.545.844)	1617440	139503 (1)	14305

Sumber : DPMPTSP Kab. Lombok Tengah, 2020

Dari aspek regulasi telah ditetapkan pula Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan. Selain itu ditertibkan pula Peraturan Bupati tentang Insentif dan Disinsentif Penanaman Modal serta Peraturan Bupati tentang Perijinan Online.

1.3.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka pembinaan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembinaan melalui organisasi-organisasi induk, seperti Pramuka, KNPI, Karang Taruna, OSIS dan KONI dalam bidang keolahragaan. Pembinaan yang dilakukan berupa pemberian dana hibah dan pelaksanaan kompetisi-kompetisi untuk meningkatkan prestasi dalam kedua bidang tersebut.

Dalam kurun lima tahun terakhir bidang kepemudaan Kabupaten Lombok Tengah sering kali mengirimkan duta-dutanya dalam ajang pemuda pelopor dan karang taruna teladan tingkat nasional yang berhasil meraih juara I, II dan III.

Dalam bidang olahraga untuk kalangan pelajar pembinaan dan penjurangan bibit-bibit atlet potensial pada tingkat SD, SMP, SMA dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Selanjutnya untuk olahraga prestasi pembinaan dilaksanakan melalui KONI Kabupaten dengan tolok ukur kegiatan melalui pekan olahraga berjenjang yaitu Pekan Olahraga Kabupaten, Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Nasional.

Dalam rangka menunjang pola-pola pembinaan keolahragaan tersebut, untuk kalangan pelajar di masing-masing sekolah telah disediakan fasilitas olahraga minimal. Sedangkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Gedung olahraga sebanyak 2 unit di Kelurahan Praya dan Desa Puyung;
2. Lapangan dan fasilitas olahraga skala Kabupaten untuk cabang-cabang olahraga sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, bola basket, bola volly, sepak takraw dan panjat tebing;
3. Lapangan olahraga skala kecamatan sebanyak 12 unit di 12 Kecamatan.

Dengan pembinaan yang didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki, prestasi yang diraih oleh atlet-atlet Kabupaten Lombok Tengah secara perorangan maupun beregu dari beberapa cabang olahraga pada setiap multi event olahraga mengalami peningkatan, baik di level daerah, nasional dan internasional.

Prestasi pemuda di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditunjukkan dengan prestasi pemuda di bidang-bidang tertentu. Dari tahun 2016 hingga 2019, Lombok Tengah selalu mengutus duta paskibraka di tingkat Nasional bahkan di tahun 2017 sebanyak jumlah pemuda yang diutus sebagai paskibraka mencapai 3 orang.

1.3.1.20 Statistik

Dalam rangka penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan berbagai program dan kerjasama penyediaan data dan informasi pembangunan daerah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Dalam rangka menunjang layanan data di Kabupaten Lombok Tengah telah diperkenalkan aplikasi Satu Data berbasis web (<https://satudata.lomboktengahkab.go.id>), sehingga masyarakat diharapkan dapat mengakses data yang cepat tanpa alur birokrasi yang panjang. Bagi Pemerintah, aplikasi satu data ini mempermudah perangkat pemerintah daerah dalam mengakses data-data statistik sektoral. Beberapa

permasalahan dalam pengembangan Satu Data Lombok Tengah adalah pengelolaan data sektoral belum optimal, kapasitas SDM teknis belum memadai, koordinasi antara OPD/ instansi/lembaga terkait masih lemah.

Gambaran perkembangan hasil penyelenggaraan urusan Statistik Kabupaten Lombok Tengah seperti terlihat pada tabel berikut ini.

1.3.1.21 Persandian

Dalam rangka percepatan penyampaian informasi kebijakan kepala daerah telah dibangun SMS *gateway* sebagai media informasi dan komunikasi internal kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dan media komunikasi eksternal kepala daerah dengan masyarakat.

Pengamanan informasi daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak ada permasalahan yang berarti, karena selama ini pengamanan informasi daerah mencapai 100% atau tidak ada kebocoran informasi, tetapi ketersediaan sumber Daya Manusia Persandian perlu dipersiapkan karena tenaga yang ada saat ini terbatas dan akan segera purna tugas.

1.3.1.22 Kebudayaan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mendefinisikan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kabupaten Lombok Tengah memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang kaya ragam, corak dan bernilai adi luhung. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 48 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1.	Manuskrip	13
2.	Tradisi Lisan	3
3.	Adat Istiadat	5
4.	Ritus	11
5.	Pengetahuan Tradisional	9
6.	Teknologi Tradisional	48
7.	Seni	24
8.	Bahasa	1
9.	Permainan Rakyat	12
10.	Olah Raga Tradisional	5
11.	Cagar Budaya	43

Sumber : Dinas Budpar Kab. Lombok Tengah, 2020

Untuk meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan

pembinaan kebudayaan terhadap OPK. Capaian pemajuan objek kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 49 Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan atraksi budaya yang memadukan keanekaragaman	5	5	7	10	12
2	Pelestarian benda situs dan kawasan cagar budaya	16	16	16	16	16
3	Pembinaan sanggar seni yang aktif	11	14	17	21	27

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, 2020

1.3.1.23 Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca, Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki satu unit Perpustakaan Daerah dan dilengkapi dengan dua unit perpustakaan keliling. Disamping itu pembinaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat (masjid dan desa) terus dilakukan secara intensif. Untuk mengetahui tingkat kunjungan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 50 Jumlah Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2021

No	Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)	Jumlah Koleksi Buku (Eksemplar)
1	2016	22.169	74.567
2	2017	22.950	79.841
3	2018	24.706	32.234
4	2019	33.758	56.147
5	2020	8.083	-
6	2021	10.480	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2022

1.3.1.24 Kearsipan

Untuk meningkatkan kualitas kearsipan di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan data yang ada jumlah tenaga arsiparis di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 stagnan, dimana jumlah tenaga arsiparis hanya 2 (dua) orang.

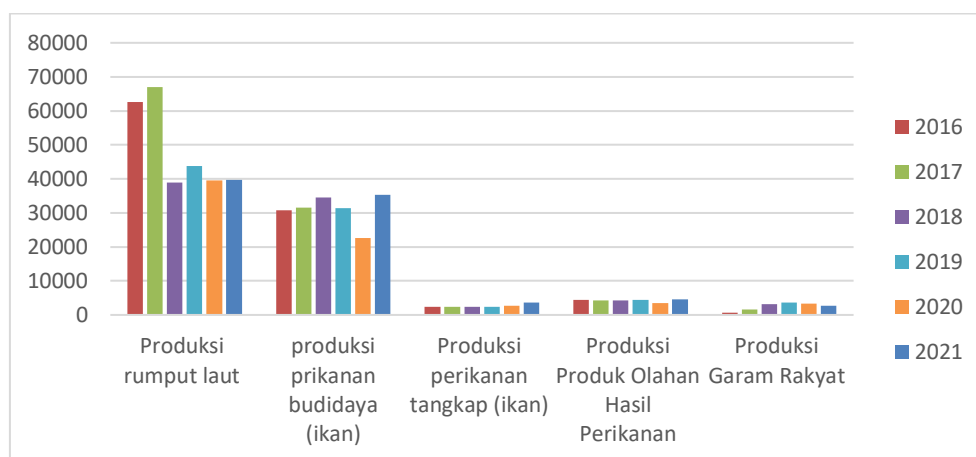
Pengelolaan arsip yang baik menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam penemuan kembali arsip saat diperlukan. Semakin cepat penemual kembali arsip menunjukkan semakin baik pengelolaan arsip yang ada. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah (2019),

nilai rata-rata kecepatan pencarian dan penemuan arsip di Lombok Tengah masih tergolong cepat yaitu antara 2-3 jam/arsip. Hal ini menunjukkan sampai tahun 2019, secara rata-rata penemuan arsip tidak sampai melebihi 3 jam.

1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1.3.2.1 Perikanan

Produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Lombok Tengah bersumber dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap meliputi penangkapan dilaut dan penangkapan di perairan umum daratan (PUD), sedangkan perikanan budidaya yang dikembangkan yaitu budidaya ikan di air tawar, air payau dan budidaya laut serta pengembangan rumput laut. Perkembangan produksi perikanan dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 23 Perkembangan Produksi Perikanan 2016 - 2021

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Tengah, 2022

Produksi perikanan khususnya produksi ikan didominasi dari hasil produksi perikanan budidaya. Produksi ikan dalam periode empat tahun terakhir rata – rata sebanyak 34.415 ton/tahun dimana kontribusi perikanan budidaya sebesar 93% dan hanya 7% dari perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya (ikan) mengalami kecenderungan meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pada tahun 2016 produksi sebanyak 30.723,81 ton menjadi 31.333,62 ton di tahun 2019. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan produksi olahan hasil perikanan cenderung konstan pada empat tahun terakhir. Produksi rumput laut cenderung menurun dari tahun ke tahun karena semakin sempitnya ruang untuk budidaya rumput laut, sedangkan produksi garam cenderung meningkat secara signifikan dari 712,18 ton pada tahun 2016 menjadi 3.708,98 ton pada tahun 2019 atau meningkat sekitar 420%.

1.3.2.2 Pariwisata

(a) Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Wilayah

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tahun 2009- 2019, pariwisata dunia terus mengalami peningkatan. Wisatawan internasional (*intemational tourist*) meningkat dari 892 juta orang pada saat masa krisis tahun 2009 menjadi 1.461 juta orang pada tahun 2019. Indikator kinerja lain menunjukkan nilai strategis dari pariwisata dunia tahun 2019 antara lain: pertumbuhan 4%; satu dari sepuluh lapangan kerja di dunia diisi pekerja dari sektor pariwisata; berkontribusi 7% dari ekspor global.

Berdasar laporan *World Travel and Tourism Council (WTTC)* pada tahun 2017 sumbangan pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia mencapai 10 persen. Sementara penerimaan dari kunjungan wisatawan internasional menyumbang tujuh persen dari total ekspor barang dan jasa dunia atau 30 persen dari total ekspor jasa dunia. Dilihat dari penciptaan lapangan kerja, satu dari 10 tenaga kerja diciptakan karena adanya kegiatan pariwisata (UNWTO, 2018).

Peranan pariwisata dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaan (sisi demand) dapat diidentifikasi melalui: (1) porsi konsumsi rumah tangga untuk kegiatan wisata dalam negeri dan pengeluaran wisatawan Indonesia ke luar negeri sebelum meninggalkan dan setelah tiba di Indonesia; (2) porsi pengeluaran konsumsi pemerintah, untuk berbagai kegiatan terkait pariwisata; (3) porsi ekspor yang mencakup pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berada di Indonesia; (4) porsi impor yang mencakup pengeluaran wisatawan Indonesia selama mereka berada di luar negeri; dan (5) porsi investasi untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata.

Tabel 2. 51 Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari Sisi Neraca Pengeluaran Tahun 2017 (triliun rupiah)

Komponen	Konsumsi rumah tangga	Konsumsi pemerintah	Investasi	Ekspor	Impor
Pariwisata	261,5	13,6	160	198,9	110,9
PDB Nasional	7.627,00	1.236,90	4.370,60	2.768,10	2.604,40
Share pariwisata (%)	3,43	1,1	3,66	7,19	4,26

Sumber : BPS, 2019

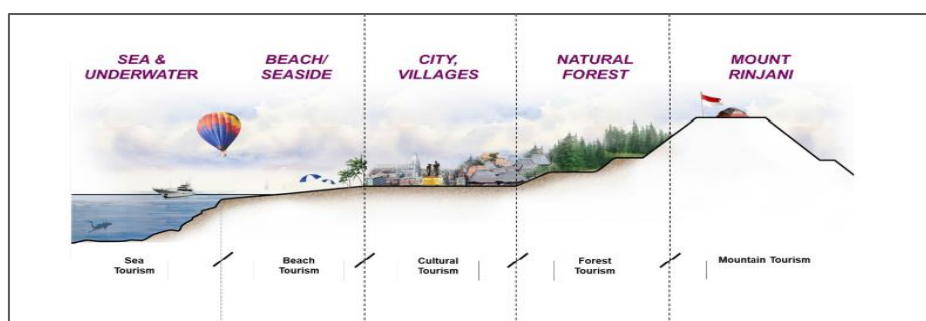
Sementara itu kontribusi pariwisata (hotel dan restoran) di Provinsi NTB terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 2,03 % (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019) sedangkan kontribusi sektor pariwisata (pajak hotel dan restoran) di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 terhadap PAD sebesar 10 %.

Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian

diseluruh dunia terkena dampak Covid-19. Dalam merespon wabah Covid-19, UNWTO telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional negatif 1% hingga 3%.

(b) Potensi Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

Salah satu potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Tengah, pengunjung dapat memiliki pengalaman akan banyaknya atraksi wisatawan, banyaknya karakteristik pariwisata, atau bahkan banyaknya aktivitas pariwisata di dalam satu Kabupaten. Hal ini menjadi sebuah pengalaman pariwisata yang lengkap dalam satu kabupaten. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi potensi yang besar untuk menangkap seluruh segmen pasar dan dapat menjadi diferensiasi dari destinasi lainnya di Indonesia maupun di Asia Tenggara.



Gambar 2. 24 Skema Konsep *Complete Tourism Experience*

Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019

(c) Jumlah Wisatawan

Wisatawan nusantara atau *domestic tourists* adalah seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial dan atau menginap di akomodasi komersial dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. Berdasarkan tabel berikut kunjungan wisatawan nusantara ke Lombok Tengah dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan dari 59.148 orang menjadi 113.959 orang, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 70.539 orang sebagai dampak bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok di tahun tersebut. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan turun drastis menjadi 44.559 orang sebagai dampak pandemi Covid19.

Tabel 2. 52 Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wisatawan Kategori Overnight Visitor (Orang)		Total	Rata -Rata Lama Tinggal (Hari)
	Asing	Domestik		
2016	49.769	59.148	108.917	3,25
2017	86.524	113.959	200.483	3,50
2018	83.176	70.539	153.715	3,00
2019	74.875	61.700	136.575	3,00
2020	17.849	26.710	44.559	3,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah, 2021

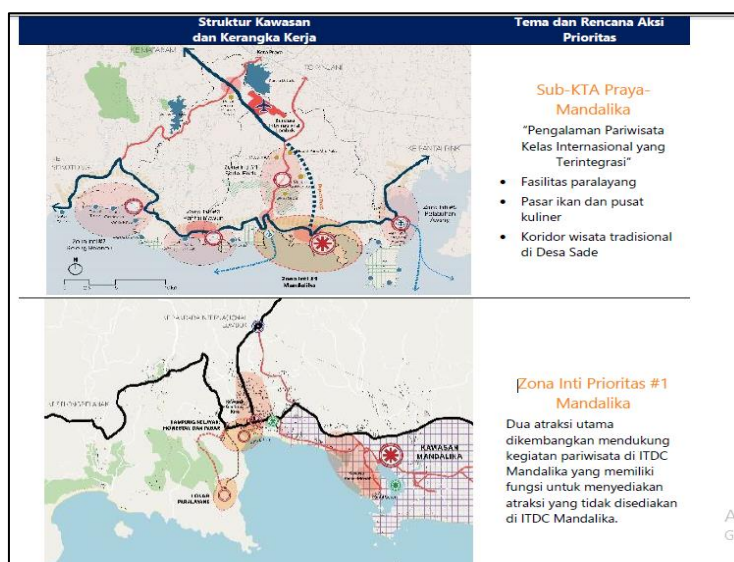
(d) Asal Wisatawan Asing

Sesuai dengan *International Recommendations Tourism Statistics* (IRTS) 2008 yang diterbitkan *United Nations Statistics Division* (UNSD) dan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), definisi wisatawan mancanegara (wisman) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi.

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lombok Tengah melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 berdasarkan tabel di bawah didominasi oleh wisatawan dari Malaysia, Australia, China, Inggris, Jerman, Singapura, dan Perancis.

(e) Key Destination Area Wisata

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Lombok Tengah, telah ditentukan beberapa lokasi kunci sebagai tujuan wisata yang tepat di Kecamatan Pujut dan Praya Barat. Key destination area di Kecamatan Pujut antara lain Pantai Mawun, sekitar Mandalika, Desa Sade-Ende, dan Teluk Awang. Sedangkan di Kecamatan Praya Barat antara lain Pantai Selong Belanak.

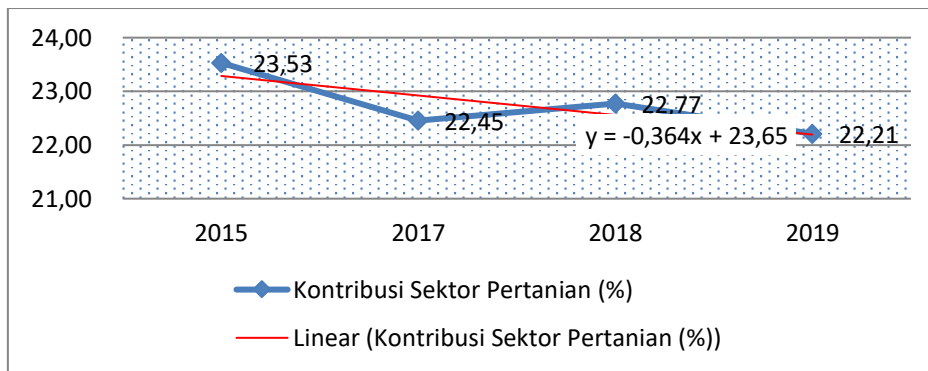


Gambar 2. 25 Tema dan Rencana Aksi Prioritas

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah, 2019

1.3.2.3 Pertanian

Pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Peran sektor pertanian tergambarkan dari kontribusinya terhadap PDRB. Pada periode tahun 2016-2020 sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi terhadap PDRB, meskipun tren kontribusinya menurun. Share pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada grafik berikut. 26,80 di tahun 2020.

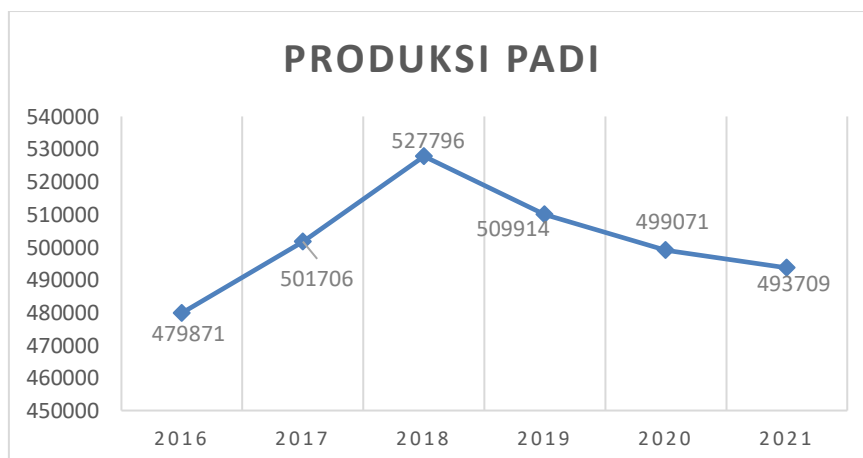


Gambar 2. 26 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Sumber : Bappeda Lombok Tengah, 2020

Adapun perkembangan produksi pertanian unggulan daerah adalah sebagai berikut:

(a) Padi

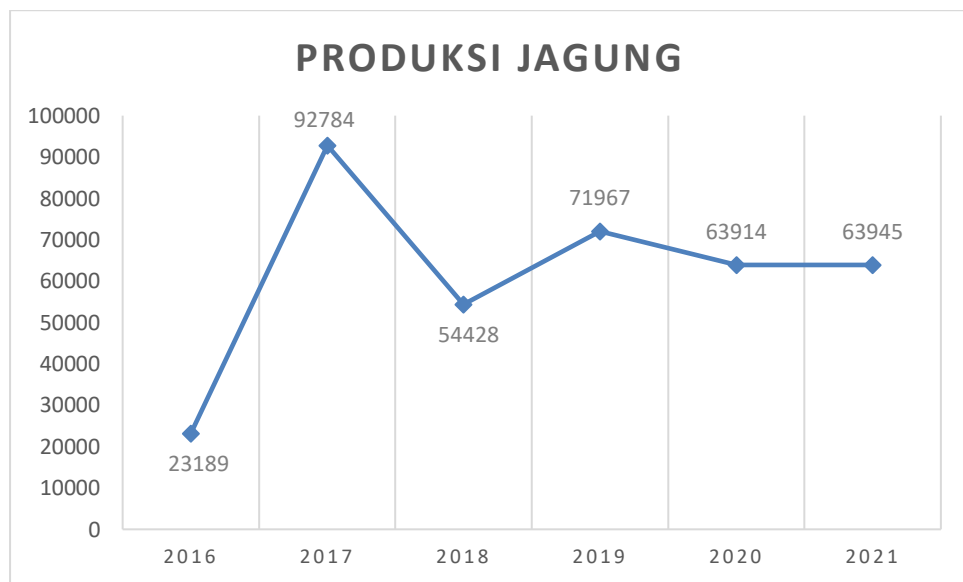
Produksi padi di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat dalam tiga tahun terakhir meskipun terjadi penurunan kembali di tahun 2019. Produksi padi di tahun 2019 sebanyak 509.914ton turun dari capaian tahun 2018 sebesar 527.796 ton. Turunnya produksi padi di tahun 2019 paralel dengan penyusutan luas lahan sawah dari 54.355 ha di tahun 2017 menjadi 49.253 ha di tahun 2018. Perkembangan produksi padi dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 27 Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2022

(b) **Jagung**

Jagung merupakan komoditi yang potensial dikembangkan menjadi bahan pangan pokok karena kandungannya yang kaya akan serat komponen fungsional. Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki produksi komoditas jagung potensial. Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB (2014), hasil evaluasi lahan secara fisik menunjukkan bahwa kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang tergolong sangat sesuai (S1) seluas 7.973 ha (6,99%), cukup sesuai (S2) seluas 64.226 ha(56,33%) dan sesuai marginal (S3) seluas 36.032 ha (31,60%).

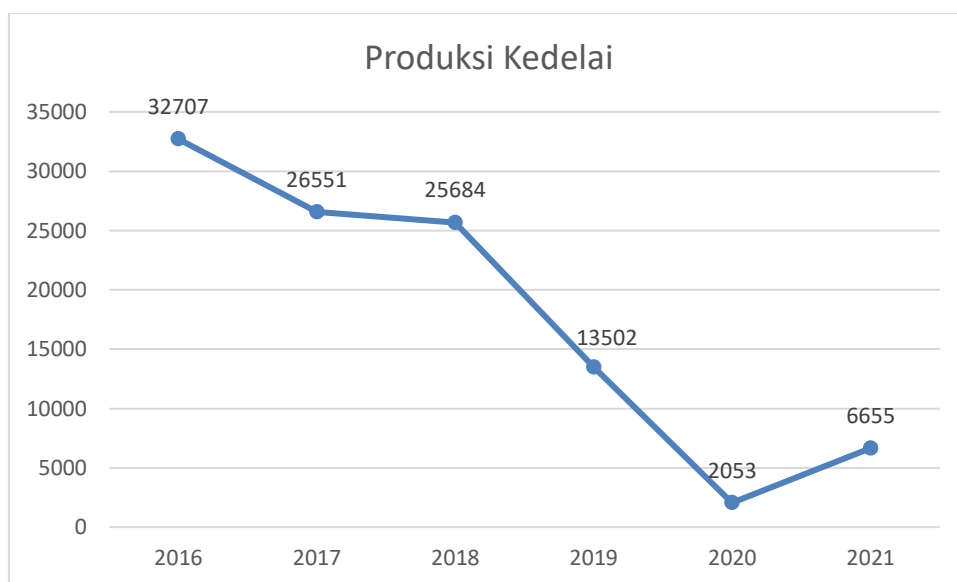


Gambar 2. 28 Produksi Jagung Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2022
Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2022

Produksi jagung dalam periode lima tahun berfluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh intervensi program dari pemerintah dan peningkatan preferensi masyarakat terhadap komoditas jagung. Semakin besar intervensi program maka akan meningkatkan produksi jagung. Perkembangan produksi jagung dapat dilihat grafik di atas.

(c) **Kedelai**

Produksi kedelai menurun dalam beberapatahun terakhir, pada tahun 2016produksi kedelai sebesar 32.708ton namundi tahun 2019produksinya hanya mencapai 13.502 ton atau menurunhingga mencapai59 persen. Penurunan produksi disebabkanberkurangnya luasan areal tanam akibat menurunnya preferensi petani terhadap komoditas kedelai dan produktivitas tanaman kedelai yang stagnan setiap tahunnya.Perkembangan produksi kedelai sebagai berikut.



Gambar 2. 29 Produksi Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016– 2021
 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2022

(d) Ternak Besar

Perkembangan peternakan khususnya ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) menunjukkan kinerja yang positif dalam periode tahun 2016-2019. Perkembangan populasi ternak besar dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2. 53
Populasi Ternak Sapi, Kerbau dan Kuda
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)			
		2017	2018	2019	2020
1	Sapi	168.220	173.266	176.982	179.189
2	Kerbau	20.457	21.132	21.545	21.772
3	Kuda	1.260	1.748	1.845	1.567

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

Populasi ternak besar meningkat jumlahnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Perkembangan jumlah populasi khususnya sapi merupakan dampak dari intervensi program dalam bidang peternakan. Upaya peningkatan jumlah ternak sapi dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah indukan dan optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) serta peningkatan layanan keswan.

1.3.2.4 Perkebunan

Pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan komoditas tanaman bernilai ekonomi. Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Komoditas tembakau khususnya tembakau virginia, pengembangan komoditas ini telah dilaksanakan secara baik yang menerapkan konsep agribisnis yang ditandai dengan adanya pola kemitraan antara

private sector dan petani sehingga komoditas tembakau virginia telah berkembang menjadi unggulan daerah dan berkontribusi secara nasional. Perkembangan produksi tanaman unggulan perkebunan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2. 54
Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

No	Tanaman	Jumlah Produksi (Ton)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tembakau Virginia	12.577	18.641	14.946	19.896	20.224	11.151
2.	Tembakau Rajangan/Rakyat	1.275	1.006	686	924	707	5738

Sumber : BPS, 2022

1.3.2.5 Perdagangan

Peran sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah sangat strategis yang dapat dilihat dari kontribusinya/share terhadap PDRB. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan *share* sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, perdagangan menyumbang 10,83% terhadap PDRB, tahun 2017 sebesar 11,09%, tahun 2018 sebesar 11,47% dan di tahun 2019 berkontribusi sebesar 11,84%.

Salah satu yang mendukung peningkatan *share* perdagangan terhadap PDRB adalah meningkatnya jumlah sarana distribusi perdagangan baik pasar, toko maupun kios. Ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang berkualitas khususnya pasar sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah, untuk itu rehabilitasi dan revitalisasi pasar menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing pasar.

1.3.2.6 Industri

Industri yang banyak berkembang di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh industri kecil yang terkonsentrasi pada olahan pangan dan kerajinan. Industri kecil khususnya kerajinan merupakan unggulan daerah, dengan produk unggulannya diantaranya tenun dan songket, anyaman bambu dan roket, perak dan gerabah.

Perkembangan IKM dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang membaik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha, jumlah tenaga terserap dan nilai produksi. Jumlah unit usaha tahun 2017 sebanyak 35.356 unit terus bertambah setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mencapai 35.942 unit usaha. Demikian halnya jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha IKM meningkat dari 57.768 orang pada tahun 2017 menjadi 58.549 orang pada tahun 2019.

Nilai produksi IKM pada tahun 2019 meningkat sebesar 22,53% dari nilai produksi tahun 2017. Nilai produksi aktual tahun 2019 sebesar Rp. 552.185.000.000,-

1.3.2.7 Transmigrasi

Dalam rangka penataan persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan RWPT dan RTSP di rencana Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) Desa Plambik dan Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya termasuk Kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi seluas 300 Ha dengan jumlah sasaran 300 KK. Sampai dengan tahun 2019, jumlah transmigran yang dibina sebanyak 5 KK.

Sedangkan untuk kawasan transmigrasi yang sudah ada yakni Desa Batu Jangkih dan Mekar Sari masih diarahkan pada pemberdayaan keluarga transmigran dengan rumah tangga sasaran sejumlah 270 KK dengan luas kawasan 270 ha.

1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitasi wilayah atau infrastruktur, iklim dan sumberdaya manusia.

1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1.4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 16,67 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 1,18 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 17,85 triliun rupiah. Menurunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha sebagai akibat dari terjadinya pandemi covid-19 dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 12,4 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,57 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2020 mengalami kontraksi sekitar 6,68 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2021, perekonomian daerah mampu tumbuh positif sebesar 4,03%.

1.4.1.2 Kemampuan Fiskal Daerah / Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program – program pembangunan menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016 APBD Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 1.930.329.082.305,70 menjadi Rp. 2.155.687.126.109,00 pada tahun 2019 atau meningkat menjadi 11,67% dalam lima tahun terakhir. Indeks kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah masih pada kategori belum mandiri (Rasio PAD terhadap

APBD masih dibawah 25%). Berdasarkan capaian RPJMD sebelumnya, di tahun 2019 tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah baru 9,65%. Meskipun menunjukkan trend realisasi PAD meningkat, rendahnya kemandirian fiskal ini menjadi tantangan di masa depan.

Tabel 2. 55 Target dan Realisasi PAD Tahun 2016 s/d 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	157.674.326.963,00	166.443.247.023,43	105,56
2	2017	280.671.302.747,73	286.691.384.414,65	102,14
3	2018	194.640.639.337,17	187.324.721.970,60	96,24
4	2019	199.768.850.000,00	204.512.599.142,12	102,37
5	2020	204.496.050.000	203.926.708.187	99,72
6	2021	209.339.730.000	154.088.985.754,09	73,61

Sumber : BPKAD Kab. Lombok Tengah, 2022

1.4.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

RTRW sebagai salah satu rencana tata ruang merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan polaruang wilayah daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis. Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki RTRW melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031.

Dari tahun 2016 hingga 2019 tidak terjadi perubahan realisasi luasan kawasan lindung di Kabupaten Lombok Tengah yaitu seluas 18.188,45 hektar. Luasan ini telah mendekati rencana peruntukan kawasan lindung dalam RTRW sebesar 18.198,45 hektar dengan rasio realisasi mencapai 99 persen.

1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kejahatan yang dilaporkan yang dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 mengalami penurunan dari 1.024 kasus dilaporkan pada tahun 2016 menjadi 439 kasus di tahun 2019. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.31, selama kurun waktu 2016-2019 jenis kejahatan terbanyak adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang jumlahnya tetap tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi tantangan terbesar dalam upaya menciptakan keamanan wilayah demi terwujudnya iklim berinvestasi yang kondusif. Berdasarkan capaian RPJMD 2016-2021 sampai dengan tahun 2019 dengan target indikator kinerja daerah sebanyak 275 kasus, realisasi masih lebih besar dari target yaitu sebanyak 295 kasus angka kriminalitas. Data yang

disampaikan Satpol PP ini juga memperkuat anggapan bahwa persoalan keamanan masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Lombok Tengah.

1.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

1.5.1 Realisasi RKPD Tahun 2021

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dilakukan dengan menganalisis capaian pelaksanaan program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah yang meliputi realisasi kinerja maupun realisasi keuangan. Realisasi keuangan dihitung dengan menggunakan satuan persen (%) yang dilakukan melalui pembagian besaran realisasi keuangan terhadap total anggaran dikali seratus. Nilai persentase realisasi keuangan kemudian diberikan predikat berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 pada tabel T-E.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 56 Skala Nilai Peringkat Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PREDIKAT NILAI REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 76%	Sedang
51% ≤ 66%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, skala nilai peringkat kinerja dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah dan sangat rendah

Gradasi ini menunjukkan realisasi kinerja belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan capaian kinerja yang diraih oleh perangkat daerah dalam memenuhi target indikator di tahun 2021, sampai dengan triwulan IV dari 44 perangkat daerah seluruhnya memperoleh predikat Sangat Tinggi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 57 Predikat Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
1	Dinas Pendidikan	97.35%	SANGAT TINGGI	106.34%	SANGAT TINGGI

No	Perangkat Daerah	Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
2	Dinas Kesehatan	140.65%	SANGAT TINGGI	89.10%	SANGAT TINGGI
3	Rumah Sakit Umum Daerah	110.98%	SANGAT TINGGI	90.22%	SANGAT TINGGI
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107.22%	SANGAT TINGGI	95.38%	SANGAT TINGGI
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	98.35%	SANGAT TINGGI	96.15%	SANGAT TINGGI
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92.65%	SANGAT TINGGI	97.08%	SANGAT TINGGI
7	Satuan Polisi Pamong Praja	178.52%	SANGAT TINGGI	99.27%	SANGAT TINGGI
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	107.01%	SANGAT TINGGI	97.19%	SANGAT TINGGI
9	Dinas Sosial	60.91%	TINGGI	96.88%	SANGAT TINGGI
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	90.84%	SANGAT TINGGI	92.13%	SANGAT TINGGI
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	70.44%	SANGAT TINGGI	90.22%	SANGAT TINGGI
12	Dinas Ketahanan Pangan	104.77%	SANGAT TINGGI	97.68%	SANGAT TINGGI
13	Dinas Lingkungan Hidup	108.96%	SANGAT TINGGI	99.03%	SANGAT TINGGI
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	SANGAT TINGGI	95%	SANGAT TINGGI
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86.11%	SANGAT TINGGI	98.29%	SANGAT TINGGI
16	Dinas Perhubungan	98.84%	SANGAT TINGGI	97.20%	SANGAT TINGGI
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	227.00%	SANGAT TINGGI	97.93%	SANGAT TINGGI
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	399.00%	SANGAT TINGGI	99.06%	SANGAT TINGGI
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	113.72%	SANGAT TINGGI	91.37%	SANGAT TINGGI
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	113.00%	SANGAT TINGGI	96.54%	SANGAT TINGGI
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	64.39%	TINGGI	99.24%	SANGAT TINGGI
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	90.65%	SANGAT TINGGI	96.21%	SANGAT TINGGI
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	42.14%	RENDAH	86.61%	SANGAT TINGGI
24	Dinas Pertanian	172.53%	SANGAT TINGGI	94.66%	SANGAT TINGGI
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100%	SANGAT TINGGI	96%	SANGAT TINGGI
26	Sekretariat Daerah	83.99%	SANGAT TINGGI	93.49%	SANGAT TINGGI
27	Sekretariat DPRD	117.72%	SANGAT TINGGI	97.35%	SANGAT TINGGI
28	Kantor Camat Praya	63.06%	TINGGI	97.46%	SANGAT TINGGI
29	Kantor Camat Praya Tengah	95.97%	SANGAT TINGGI	99.57%	SANGAT TINGGI
30	Kantor Camat Praya Barat	37.23%	RENDAH	95.92%	SANGAT TINGGI

No	Perangkat Daerah	Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
31	Kantor Camat Praya Barat Daya	659.08%	SANGAT TINGGI	98.58%	SANGAT TINGGI
32	Kantor Camat Praya Timur	4.02%	SANGAT RENDAH	99.05%	SANGAT TINGGI
33	Kantor Camat Pujut	89.61%	SANGAT TINGGI	98.42%	SANGAT TINGGI
34	Kantor Camat Janapria	34.25%	SANGAT RENDAH	99.61%	SANGAT TINGGI
35	Kantor Camat Kopang	81.09%	SANGAT TINGGI	97.82%	SANGAT TINGGI
36	Kantor Camat Batukliang	77.57%	SANGAT TINGGI	98.52%	SANGAT TINGGI
37	Kantor Camat Batukliang Utara	72.41%	SANGAT TINGGI	98.48%	SANGAT TINGGI
38	Kantor Camat Pringgarata	198.94%	SANGAT TINGGI	99.00%	SANGAT TINGGI
39	Kantor Camat Jonggat	70.18%	SANGAT TINGGI	96.20%	SANGAT TINGGI
40	Inspektorat Daerah	105.01%	SANGAT TINGGI	99.47%	SANGAT TINGGI
41	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	SANGAT TINGGI	97.64%	SANGAT TINGGI
42	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	93.59%	SANGAT TINGGI	95.97%	SANGAT TINGGI
43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80.45%	SANGAT TINGGI	96.62%	SANGAT TINGGI
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	72.60%	SANGAT TINGGI	96.77%	SANGAT TINGGI

1.5.2 Realisasi RPJMD

Dalam Perubahan RPJMD 2016-2021, struktur RPJMD terdiri dari 5 (lima) tujuan, 13 (tiga belas) sasaran, 13 (tiga belas) indikator kinerja utama (IKU) dan 130 indikator kinerja daerah. Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 telah memperhatikan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada setiap periode pelaksanaan RPJMD dapat dicapai.

Rincian rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Daerah lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 58
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021
Terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET 2021	REALISASI 2021
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI				
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.67	6.61	-6.68*
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	3.21	4.68	-3.05*
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	9.54	8.81	20.43*
	Angka Kemiskinan	%	15.8	13.86	13.44
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.9	2.83	2.33
	Indeks Gini	Poin	0.352	0.332	0.331
	Indeks Williamson	Poin	0.42	0.39	0.36*
B	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL				
	IPM	Poin	63.22	67.87	66.72
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5.6	6.88	6.29
	Harapan lama sekolah	Tahun	12.83	14.15	13.85
	Persentase melek huruf usia 15-55 tahun	%	79.67	92.8	89.61
	PAUD terakreditasi A	%	0.31	1.53	0
	SD terakreditasi A	%	3.01	6.86	5.19
	SMP terakreditasi A	%	1.68	13.97	7.73
	Usia Harapan Hidup	Tahun	65.01	66.06	66.38
	Angka PMKS	Orang	9,319	1,092	1805
C	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA				
	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	%	5	5	15
	Jumlah atlet berprestasi	Orang	13	20	8

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET 2021	REALISASI 2021
	(Provinsi, nasional dan internasional)				
ASPEK PELAYANAN UMUM					
I	URUSAN WAJIB				
A	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				
1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN				
	APK PAUD	%	63.27	81.99	73.07
	APK SD/MI	%	112.28	106.99	109.06
	APK SMP/MTs	%	104.66	100	107.43
	APM SD/MI	%	95.71	100	98.4
	APM SMP/MTs	%	96.42	100	77.6
	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi	%	64.98	85.5	80.14
	% PTK PAUD bersertifikasi	%	84.2	92.86	93.66
	% PTK SD bersertifikasi	%	85.25	97.57	77.99
	% PTK SMP bersertifikasi	%	78.22	95.01	81.99
2	BIDANG URUSAN KESEHATAN				
	Indeks Kepuasan layanan kesehatan dasar	Poin	62.51	70.71	77.78
	Angka morbiditas	%	28.35	12	8.45
	Indeks Kepuasan layanan kesehatan rujukan	Poin	62.52	68.02	75.16
3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	60.62	79.11	79.11
	Cakupan Layanan jaringan Irigasi	Ha	49,517	49,517	49.517
	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	%	82.52	95.67	65.54
	Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan	%	76.92	82.52	81,43

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET 2021	REALISASI 2021
4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	110	11.65	32.75
	Spot kawasan kumuh dan rawan bencana	Spot	13	1	5
	Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit	236	1	456
	Persentase kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, pju)	%	21.4	54.1	64.37
5	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Indeks Toleransi	Poin	NA	3.45	3.61
	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0
	Angka kejadian konflik antar etnis	Kejadian	0	0	0
	Angka partisipasi pemilih pada pilpres, pileg dan pilkada	%	0	70	0
	Konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100
	Penyakit masyarakat	Kasus	57	36	47
	Angka pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	288	270	204
	Desa tangguh bencana	Desa	3	23	27
	Persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100	100
	Rata-rata Kecepatan dan ketepatan waktu penanganan kebakaran	Menit	15	15	15
6	BIDANG URUSAN SOSIAL				
	Penanganan PMKS	%	13.1	42.56	19.37

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET 2021	REALISASI 2021
	Lembaga sosial yang aktif	%	30.96	50.2	15.04
B	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA				
	Pencari kerja terdaftar yang terserap	%	92.58	95.31	55.2
	Sengketa ketenagakerjaan	Kasus	14	14	18
2	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100
3	BIDANG URUSAN PANGAN				
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	83	81	75.3
	Konsumsi Energi	Kilokalori/kapita/hari	2,436.00	2,300.00	2469.6
4	BIDANG URUSAN PERTANAHAN				
	Cakupan fasilitasi pembuatan sertifikat tanah	%	100	100	100
5	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	45.17	53.5	65.72
	Sumber mata air yang debit airnya terjaga	Titik	4	12	18
	Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	M3/hari	17.54	20.82	27.3
6	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Tingkat kepemilikan KTP elektronik	%	70.96	96.93	99.16

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET 2021	REALISASI 2021
	Tingkat kepemilikan akta kelahiran	%	63.7	93.41	89.75
	tingkat kepemilikan kartu keluarga	%	71.21	97.23	102.66
7	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	15	35	73
	Rata-rata unit usaha BUMDes	Unit	NA	2.3	2.06
	Jumlah desa wisata	Desa	1	4	1
	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif	Lembaga	NA	45	350
	Jumlah lembaga adat aktif	Lembaga	2	45	80
	Penetapan APBDes Tepat waktu	%	3.15	26.77	0
	Rata-rata Realisasi APBDes	%	90.78	97.9	90.6
8	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur	%	59.25	69.7	71.05
	Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	%	40	68	49.6
9	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				
	Angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	184	110	138
	Rasio kendaraan per jumlah penumpang	Ratio	1:40	1:40	1:08
10	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	%	10	36.36	72.73
11	BIDANG URUSAN KOPERASI,				

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET 2021	REALISASI 2021
	USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%	0.33	0.33	2
	Koperasi berkualitas berkualitas dan sangat berkualitas	Buah	116	171	148
12	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL				
	Nilai investasi PMA	US \$ 000	1,203,061	1,395,031	14.305
	Nilai investasi PMDN	Rp (juta)	689,044	1,327,046	1.844.517
13	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	0	5	3
	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	3	5	6
14	BIDANG URUSAN STATISTIK				
	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100	100	100
15	BIDANG URUSAN PERSANDIAN				
	Persentase pengamanan informasi daerah	%	100	100	100
16	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				
	Persentase situs budaya yang dilestarikan	%	10	10	16
17	BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN				
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Orang/Tahun	22,149	29,964	10480
18	BIDANG URUSAN KEARSIPAN				
	Indeks Kecepatan layanan permintaan kebutuhan arsip	Poin	3	3	1.5
	Persentase dokumen arsip yang terselamatkan	%	100	100	100
II	URUSAN PILIHAN				
1	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET 2021	REALISASI 2021
	Produksi Perikanan Budidaya - Ikan	ton/tahun	33,792.53	35,515	35271
	Produksi Perikanan Budidaya - Rumput Laut	ton/tahun	38,106.47	40,049	39682
	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	2,363	2,482	3584.9
	Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton/tahun	4,084.03	4,509.09	4505.09
	Produksi garam rakyat	ton/tahun	1,214	3,407	2763.24
2	BIDANG URUSAN PARIWISATA				
	Angka kunjungan wisatawan asing	Orang/Tahun	59,148	119,907	1173
	Angka kunjungan wisatawan domestik	Orang/tahun	49,769	83,782	18747
	Rata-rata lama tinggal	hari	3	4.25	3
3	BIDANG URUSAN PERTANIAN				
	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan				
	- Padi	Ton/tahun	475	511,597	493709
	- Jagung	Ton/tahun	39,322	43,396	63945
	- Kedelai	Ton/tahun	42,387	48,337	6655
	Produksi Hasil Perkebunan Unggulan				
	- Tembakau virginia	Ton/tahun	12,577	20,712	11151
	- Tembakau rajangan	Kw/tahun	547	1,176	5738
	- Melon	Kw/tahun	11,444	12,631	5718
	- Kopi	Ton/tahun	434.1	408.32	142.43
	Populasi ternak sapi	Ekor	163,962	172,521	182.773
4	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN				
	Nilai omset perdagangan/nilai transaksi	Rupiah	10,250,310	11,679,227	11,500,000
	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang menempati ruang sesuai peruntukannya	%	13.8	17.8	16.9
5	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN				
	Nilai Produksi IKM	Rupiah	40,550,421	54,773,765	52,165,000
6	URUSAN TRANSMIGRASI				

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET 2021	REALISASI 2021
	Jumlah keluarga transmigrasi yang difasilitasi	KK	25	39	234
III	URUSAN FUNGSI PENUNJANG				
1	PERENCANAAN				
	persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD	%	100	100	100
2	KEUANGAN				
	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	2	2	2
	Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Poin	4	4	4
	Indeks rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Poin	3	3	3
	Validitas data aset daerah	%	79	90	75
	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	8.6	9.35	8.88
	Target Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	165,997,900,000	209,339,730,000	154,088,985,754
3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	Persentase PNS yang kompeten	%	58.7	66	69
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	%	61.51	70.71	83.68
4	PENGAWASAN				
	Persentase tindaklanjut hasil temuan pengawasan	%	82	90	92.98
	Kapabilitas APIP	level	2	3	3
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan	%	100	100	100
6	PEMERINTAHAN UMUM				
	Nilai EKPPD	Poin	31.269	31.545	30.479
	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	CC
	Persentase rumah ibadah yang aktif dalam	%	2	19	65.67

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET 2021	REALISASI 2021
	pemberdayaan masyarakat				
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	Tercukupinya kebutuhan kedinasan KDH	%	100	100	100
	Perda yang ditetapkan	%	36.84	57	133.33
	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
A	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH				
	Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp (ribu)/tahun	9,079	10,252	9962
	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	104.36	105.69	106.88
	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85	86	94.3
B	FOKUS FASILITAS WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR				
	Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap)	%	72.47	75.79	65.42
	Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR	%	8.33	33.33	66.6
	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	%	67.5	82	78.74
C	FOKUS IKLIM INVESTASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	Tingkat Kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	99.01	81.63	56.36
	Ketaatan terhadap RTRW	%	77.32	86.71	86.71
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan	poin	75	80	75.67
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71.81	74.65	75.04

1.6 Capaian Pelaksanaan SPM 2021

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri.

Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Berikut disajikan capaian SPM tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
SPM BIDANG PENDIDIKAN				
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).			0,965
Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	172.808	166.767	6041	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Buku Teks Pelajaran	166767	166767	0	1
Perlengkapan Belajar	166767	166767	0	1
Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	812	717	95	0,88
Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	586	537	49	0,92
jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	6020	5,13	323	0,94
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	112,926,590,000	101,863,600,000	11,062,990,000	0,9
Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	8,033	7,373	660	0,92
satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	812	0	0	0,54
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang			0,7348

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	16026	11775	4251	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Modul Belajar	11,775	11,775	0	1
jumlah rombongan belajar di PKBM	589	589	589	1
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	17,662,500,000	6,605,300,000	11,057,200,000	0,37
Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	254	165	89	0,65
Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	47	36	11	0,77
Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	14	14	0	1
Perlengkapan Belajar	11,775	11,775	0	1
PKBM Terakreditasi minimal C	83	0	0	0,14
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			92.62 %
Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	39692	36763	2929	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Buku Gambar	39692	39692	0	1
Alat Mewarnai	39692	39692	0	1

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	34,299,600,000	25,309,800,000	8,989,800,000
Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	776	602	174	0,78
Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2,46	1,465	995	60 %
jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	44,588	2,202	42,386	0,05
satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	323			0,35
SPM BIDANG KESEHATAN				
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan			1,03
Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	20058	20609	0	
	Jumlah yg harus dilayani	Jumlah yg terlayani	Jumlah Yang Belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
Buku KIA	20058	20609	0	1,03
Tablet Tambah Darah	20058	20609	0	1,03
Vaksin Tetanus Difetri (Td)	20058	20609	0	1,03
Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	20058	20609	0	1,03
Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	20058	20609	0	1,03
Pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar di fasilitas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			1,02
Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	19146	19525	0	
	Jumlah yg harus dilayani	Jumlah yg terlayani	Jumlah Yang Belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	19146	19525	0	1,02
Buku KIA	19146	19525	0	1,02
Formulir Fotograf	19146	19525	0	1,02
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan			1,05
Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	18234	10168	9155	
	Jumlah yg harus dilayani	Jumlah yg terlayani	Jumlah Yang Belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
Vaksin Hepatitis BO	18234	19229	0	1,05
Vitamin K1 Injeksi	18234	19229	0	1,05
Salep/Tetes Mata Antibiotik	18234	19229	0	1,05
Formulir Bayi Baru Lahir	18234	19229	0	1,05
Formulir MTBM	18234	19229	0	1,05
Buku KIA	18234	19229	0	1,05
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan			0,81
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yg terlayani	*yang belum Terlayani	
	72076	58122	13954	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Formulir DDTK	72076	58122	13954	0,81
Buku KIA	72076	58122	13954	0,81
Vitamin A Biru	72076	58122	13954	0,81
Vitamin A Merah	72076	58122	13954	0,81
Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT - HB -Hib * Campak Rubella	72076	58122	13954	0,81
Jarum Suntik dan BHP	72076	58122	13954	0,81
Peralatan Anafilaktik	72076	58122	13954	0,81
Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	72076	58122	13954	0,81
Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen	72076	58122	13954	0,81

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
Standart lain yang berlaku				
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan			0,206
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani		*yang belum Terlayani	
	149079	30695	118384	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Buku Raport Sehatanku	149079	30695	118384	0,206
Buku Pemantauan Kesehatan	149079	30695	118384	0,206
Kuesioner Skrining Kesehatan	149079	30695	118384	0,206
Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	149079	30695	118384	0,206
Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	149079	30695	118384	0,206
Pelayana Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			2.1 %
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	625672	13024	612648	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	625672	13024	612648	2.1 %
Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi	625672	13024	612648	2.1 %

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes				
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			50.5 %
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	100706	50829	49877	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	100706	50829	49877	50.5 %
Buku Kesehatan Lansia	100706	50829	49877	50.5 %
Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	100706	50829	49877	50.5 %
Pelayan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan			1
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani		*yang belum Terlayani	
	58731	58731	0	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	58731	58731	0	1
Tensimeter	58731	58731	0	1
Formulir Pencatatan dan	58731	58731	0	1

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM				
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Warga Negara penderita diabetesmellitus yang mendapatkan layanan kesehatan mendapatkan layanan kesehatan			96.2 %
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	9879	9505	374	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
* Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	9879	9505	374	96.2 %
Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	9879	9505	374	96.2 %
Pedoman dan Media KIE	9879	9505	374	96.2 %
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan			45.8 %
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	2560	1172	1388	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	2560	1172	1388	45.8 %
Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	2560	1172	1388	45.8 %
Media KIE	2560	1172	1388	45.8 %
Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa	2560	1172	1388	45.8 %

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
terbaru (bila sudah tersedia)				
Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan			0,21
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	16765	3537	13228	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	16765	3537	13228	0,21
Reagen Zn TB	16765	3537	13228	0,21
Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	16765	3537	13228	0,21
Catridge Tes Cepat Molekuler	16765	3537	13228	0,21
Formulir Pencatatan dan Pelaporan	16765	3537	13228	0,21
Pedoman/Standar Operasional Prosedur	16765	3537	13228	0,21
Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	16765	3537	13228	0,21
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapatkan layanan kesehatan			19.0 %
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	51100	9720	41380	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Media KIE Berupa Lembar Balik,	51100	9720	41380	19.0 %

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
Leaflet, Poster, Banner				
Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	51100	9720	41380	19.0 %
Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	51100	9720	41380	19.0 %
SPM BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM				
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari			78.64 %
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	947488	745099	202389	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	947488	246943	700545	26.06 %
Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	947488	495667	451821	52.31 %
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			1
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	1359	1359	0	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Pelayanan SPALD-S dengan kualitas	1201	1201	0	1

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha				
Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	158	158	0	1
Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	-	-	- %
SPM BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			1
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	2294	2294	0	

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	0
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	2294	2294	0	1
Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0
Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	0	0	0	0
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			100.00 %
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	120	120	0	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	120	120	0	100.00 %
Subsidi Uang Sewa	0	0	0	0
Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0	0
SPM BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan			1

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
elayanan ganti rugi	hukum perda dan perkara			
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	37565	37565	0	
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	37565	37565	0	1
warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	37565	37565	0	1
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara			0
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	270	0	270	
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
Penegakan Perda sesuai SOP	270	93	177	34.44 %
Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	270	93	177	34.44 %
Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	270	93	177	34.44 %
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			1
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	462	462	0	

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	462	462	0	1
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			1
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	355	355	0	
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1
Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1
Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	0	0
Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	355	355	0	1
Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan			1

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	terhadap bencana			
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	132	132	0	
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	132	132	0	1
Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0	0	0
SPM BIDANG SOSIAL				
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti			0,1292
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	2143	277	1866	
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-
Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-
Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru				
Penyediaan Permakanan	199	199	-	1
Penyediaan Sandang	-	-	-	-
Penyediaan Alat Bantu	78	78	-	1
Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	-	-	-	-
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	-	-	-	-
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-	-	-
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-	-	-
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-
Layanan Rujukan	-	-	-	-
Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan				
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti			0,2266
• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	3336	756	2580	
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-
Penyediaan Permakanan	664	664	-	1
Penyediaan Sandang	-	-	-	-
Penyediaan Alat Bantu	-	-	-	-
Penyediaan Perbekalan Kesehatan	2	2	-	1
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	24	24	-	1

1.7 Permasalahan Pembangunan Daerah

1.7.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1.7.1.1 Urusan Pendidikan

Masih rendahnya pendidikan di Lombok Tengah ditandai dengan capaian rata-rata lama sekolah yang hanya sebatas tamat SD (6,28 tahun). Jika dibandingkan dengan capaian provinsi 7,31 tahun, hal ini menunjukkan capaian Lombok Tengah ini masih rendah. Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan rata-rata lama sekolah :

1. APM SMP/MTs di Lombok Tengah tahun 2021 sebesar 77,6. Jika dibandingkan dengan APM SMP/MTs Provinsi NTB di tahun 2021 sebesar 85,28, APM SMP/Mts Lombok Tengah berada 7,68 poin lebih rendah di bawah Provinsi NTB.

2. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan masih rendah dibandingkan laki-laki ditandai dengan angka melek huruf perempuan berdasarkan penduduk 15 tahun sebesar 77,1 persen dibandingkan laki-laki sebesar 87,2 persen di tahun 2021 dengan total secara keseluruhan penduduk dengan partisipasi Pendidikan diatas 15 tahun atau angka melek huruf sebesar 81.7 persen.
3. Dari aspek tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan persentase guru yang tersertifikasi di pendidikan dasar masih di bawah 50 persen.

1.7.1.2 Urusan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat secara umum dapat dilihat dari angka morbiditas. Tahun 2019 angka morbiditas 31,67 persen sementara provinsi NTB 22,69 persen. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat masih rendah dengan tingginya angka keluhan terkena penyakit tertentu.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor kesehatan antara lain :

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak masih belum optimal yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu pada tahun 2021 sebesar 89 persen dari 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sebesar 9,4 per 1.000 kelahiran hidup jika dibandingkan provinsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup.
2. Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2021 belum bisa terbebas dari gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2021 mencapai 23 kasus.
3. Walaupun terjadi penurunan angka stunting dari tahun 2018 sebesar 31,05 persen menjadi 27,79 persen di tahun 2021, stunting masih merupakan masalah yang harus diperhatikan.
4. Prevalensi penyakit menular menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. HIV/AIDS dari tahun 2021 sebesar 21 kasus HIV dan 187 orang menderita AIDS . Pandemi COVID yang terjadi juga berdampak kepada menurunnya derajat kesehatan masyarakat.
5. Prevalensi penyakit tidak menular masih didominasi hipertensi dan diabetes masing-masing 32.6% persen dan 9.7 persen di tahun 2021. Sedangkan penyakit tidak menular lainnya rata-rata kurang dari 2 persen.
6. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan masih dibawah SPM antara lain rasio puskesmas dengan jumlah penduduk baru mencapai 1:33.000 dan jumlah puskesmas PONEB baru mencapai 39 persen.

1.7.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi Tantangan bidang kebinamargaan adalah mempertahankan umur teknis jalan agar tetap dalam kondisi mantap dan memenuhi target kondisi mantap 100 persen untuk lima tahun kedepan.

1. Masih adanya ruas jalan kabupaten dengan kondisi tidak mantap sebesar 34,97 persen;
2. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan masih perlu ditingkatkan agar umur jalan sesuai dengan umur teknis
3. Cakupan layanan air minum masih 77,28 persen di tahun 2020
4. Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar 56,1 masih di bawah standar sebesar 60.
5. Masih terdapat 18,4 persen rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak punya fasilitas BAB.
6. Belum semua kawasan strategis kabupaten memiliki Perda Rencana Detil Tata Ruang.

1.7.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Masih terdapat 28.967 unit rumah tidak layak huni yang belum tertangani
2. Terdapat kawasan kumuh seluas 815,37 ha di tahun 2020
3. Persentase sampah yang tertangani baru 25%
4. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau.

1.7.1.5 Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Persentase kriminalitas yang dilaporkan mengalami penurunan dari 88.5 persen di tahun 2020 menjadi 81,63 persen di tahun 2021, namun masih perlu ditekan untuk mendukung stabilitas pembangunan terutama di kawasan-kawasan strategis untuk tetap mengurangi angka kriminalitas;
2. Pelanggaran Peraturan Daerah relatif masih tinggi

b .Bencana

1. Kualitas mitigasi dan penanganan kebencanaan belum optimal;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan kebencanaan terbatas;
3. Kuantitas dan kualitas tenaga kebencanaan perlu ditingkatkan;
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum optimal ;

1.7.1.6 Sosial

1. Cakupan layanan PMKS baru mencapai 40,37%;
2. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal;
3. Pembinaan dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial (SKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal;
4. Penanganan pasca bencana alam dan sosial belum optimal

1.7.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1.7.2.1 Tenaga Kerja

1. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja sektor formal baru 19,17 persen
2. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja;
3. Kesempatan/peluang kerja terbatas;
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dan pekerja migran;
5. Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan BLK masih belum optimal;
6. Database ketenagakerjaan belum tersedia.

1.7.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rata-rata usia kawin pertama perempuan mengalami penurunan dari 19,57 tahun menjadi 19,18 tahun dan masih lebih rendah dari provinsi sebesar 20,27 tahun.
2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 43 kasus di tahun 2020 dan kekerasan terhadap anak sebesar 44 kasus.
3. Pembinaan dan peran lembaga formal dan informal dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan
4. Implementasi regulasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal;
5. Belum optimalnya upaya pengarusutamaan gender (PUG) dilihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam penentuan jabatan eselon baru sebesar 22,42 %

1.7.2.3 Pangan

1. Masih terdapat 24% desa yang tergolong rawan pangan dengan kategori rentan tinggi (4%), rentan sedang (8%) dan rentan rendah (12%)

1.7.2.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Belum semua wajib KTP yang memiliki KTP yaitu dari 747.929 orang wajib KTP di tahun 2019 baru 681.774 orang (91,5%) yang sudah memiliki KTP, terjadi peningkatan prang wajib KTP pada tahun 2021 sebesar 96.16 persen.
2. Persentase penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran sebesar 16,3 %
3. Belum semua data kependudukan belum bisa di akses secara luas oleh masyarakat.

1.7.2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu baru mencapai 30%
2. Kapasitas aparatur (Sumber Daya Manusia) penyelenggara pemerintahan desa perlu ditingkatkan;
3. Pengelolaan keuangan dan penataan aset desa belum optimal;
4. Penguatan lembaga kemasyarakatan desa belum optimal. Jumlah BUMDes sebanyak 127 lembaga yang aktif sebanyak 114 lembaga (89,76%)
5. Kuantitas dan kualitas infrastruktur desa perlu ditingkatkan.

1.7.2.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,80% jika dibandingkan laju pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 1,03%.
2. Cakupan layanan Keluarga Berencana belum optimal. Dari 161.073 pasangan usia subur baru 86,7 % yang menjadi akseptor KB aktif. Angka dropout KB juga masih tinggi yaitu sebanyak 24.976 PUS. Jumlah pasangan usia subur unmeet need masih tinggi yaitu 36.333 PUS.

1.7.2.7 Perhubungan

1. Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan masih 65%

1.7.2.8 Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik. Hingga saat ini jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (sesuai PM Kominfo No. 5/2015) baru mencapai 6 layanan.

1.7.2.9 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih lambannya perkembangan UMKM Skala Kecil dan Menengah. Pada tahun 2017 jumlah UMKM Skala Kecil adalah 394 unit dan bertambah menjadi 400 unit di tahun 2019;
2. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari 239 unit di tahun 2018 menjadi 219 unit di tahun 2019. Pada tahun 2021 koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 265 unit.
3. Persentase koperasi sehat tahun 2020 2 koperasi dari 635

1.7.2.10 Penanaman Modal

1. Realisasi investasi PMA cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2016 realisasi PMA sebesar US\$ 135.350,68 Ribu menjadi US\$ 69.927,34 Ribu di tahun 2019, pada tahun 2021 realisasi Investasi PMA mencapai US\$ 14,305;
2. Rata-rata pertumbuhan investasi di Lombok Tengah terhadap pertumbuhan realisasi investasi Provinsi NTB 2016-2020

1.7.2.11 Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina masih terbatas. Dari 93 lembaga organisasi kepemudaan yang di di Lombok Tengah tahun 2020, yang dibina baru sebanyak 11 lembaga (11,83%).
2. Jumlah atlet berprestasi sampai dengan tahun 2021 masih terbatas yaitu 8 orang.

1.7.2.12 Statistik

Belum optimal penyediaan data sektoral yang valid dan berkualitas

1.7.2.13 Persandian

Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.

1.7.2.14 Kebudayaan

1. Jumlah tradisi dan situs yang lestari masih terbatas
2. Jumlah/frekwensi event budaya perlu ditingkatkan
3. Kurangnya implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017

1.7.2.15 Perpustakaan

1. Minat baca masyarakat masih rendah

1.7.2.16 Kearsipan

1. Pengelolaan arsip belum optimal.

1.7.3 Urusan Pemerintah Pilihan

1.7.3.1 Kelautan dan Perikanan

1. Peningkatan produksi perikanan cenderung stagnan.

1.7.3.2 Pariwisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan berjumlah 200.483 orang, turun menjadi 44.559 orang pada tahun 2020.
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Rata-rata lama tinggal sebesar 3,5 hari, turun menjadi 3,00 hari pada tahun 2020.

1.7.3.3 Pertanian

1. Rata-rata produktivitas padi masih 71,4% dari potensi varietas benih
2. Skala usaha peternakan ternak besar mayoritas berskala kecil.

1.7.3.4 Perdagangan

1. Persentase pasar baik masih rendah dibandingkan jumlah pasar
2. Penataan pedagang kaki lima belum optimal.

1.7.3.5 Perindustrian

Perkembangan unit usaha IKM tumbuh lambat dari 35.356 unit di tahun 2017 menjadi 35.942 unit di tahun 2019 atau tumbuh 1,7%.

1.7.4 Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan

1.7.4.1 Sekretariat Daerah

Permasalahan pada urusan ini adalah penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) masih perlu ditingkatkan. Nilai SAKIP masih CC.

1.7.4.2 Perencanaan

Permasalahan pada urusan ini adalah kualitas perencanaan dan sinergitas antar dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan.

1.7.4.3 Keuangan

1. Tingkat kemandirian fiskal masih rendah tahun 2019 baru mencapai 9,3 persen, serta terjadi penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 73,61 persen dari target yang tercapai

2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Validasi aset belum mencapai 100%.

1.7.4.4 Kepegawaian

1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian;

1.7.4.5 Pendidikan dan Pelatihan

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

1.7.4.6 Penelitian dan Pengembangan

1. Belum optimalnya pengelolaan kelitbangan sebagai salah satu rujukan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah.

1.7.5 Unsur Pengawas

1.7.5.1 Inspektorat Daerah

1. Tindak lanjut pemeriksaan masih perlu ditingkatkan.

1.7.6 Unsur Pemerintahan Umum

1.7.6.1 Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

1. Kurangnya pemahaman dan penyelenggaraan serta pembinaan organisasi kemasyarakatan tentang wawasan kebangsaan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH



3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2023. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Lombok Tengah serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disusun secara teknokratis dengan pendekatan kajian internal dan eksternal daerah. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah disusun dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan pencapaian kinerja perekonomian daerah tahun 2021. Untuk menjamin keserasian perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, arah kebijakan ekonomi harus mengacu dan sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Tujuan dari internalitas dan eksternalitas ini adalah agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan, serta menjaga kesinambungan perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2023

a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi ekonomi tahun 2021 adalah pengembangan kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya maupun variabel yang melingkupinya yang diuraikan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 17,69 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan 1,02 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 16,67 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktifitas pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus termasuk beberapa infrastruktur pendukung lainnya. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 12,4 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,57 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2020 mengalami kontraksi sekitar 6,68 persen, menurun dibandingkan tahun

sebelumnya. Namun di tahun 2021, perekonomian daerah mampu tumbuh positif sebesar 4,03%.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010
Tahun 2016-2021 (juta rupiah)

Tahun	Berlaku	Konstan 2010
(1)	(2)	(3)
2016	14.423.751,17	10.854.980,04
2017	15.779.240,00	11.551.693,67
2018	16.702.140,00	11.916.530,00
2019	17.853.810,00	12.400.270,00
2020*	16.670.400,00	11.571.990,00
2021**	17.689.609,49	12.037.664,55

* angka sementara

** angka sangat sementara

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2016-2021 (persen)

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	6,37	2,24	1,55	-0,42	1.01
B Pertambangan dan Penggalian	9,36	7,12	6,53	9,36	1,08	6.64
C Industri Pengolahan	3,19	4,69	1,55	3,6	-3,05	0.20
D Pengadaan Listrik dan Gas	9,85	5,39	1,14	9,59	9,72	8.23
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,72	3,95	0,32	-0,43	-1,78	1.43
F Konstruksi	8,68	7,03	5,49	3,04	8,68	16.74
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	7,93	5,73	6,33	-5,57	2.69
H Transportasi dan Pergudangan	5,74	6,23	-1	-5,6	-45,02	-5.58
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	7,01	1,86	1,78	-20,43	2.24
J Informasi dan Komunikasi	8,62	8,02	5,34	4,24	12,92	5.02
K Jasa Keuangan dan Asuransi	11,11	10,48	6,87	1,49	14,2	6.48
L Real Estat	6,54	6,81	4,94	4,98	1,42	1.52
M,N Jasa Perusahaan	6,72	5,34	5,08	5,16	-2,87	0.41
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,56	0,76	3,43	2,96	2.64
P Jasa Pendidikan	6,01	5,62	5,53	6,96	1,6	1.46
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	6,02	7,54	6,18	0,72	8.01
R,S,T,U Jasa lainnya	6,25	6,81	5,06	5,36	-5,41	2.26
PDRB	5,65	6,42	3,17	4,07	-6,68	4,03

* angka sementara

** angka sangat sementara

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (source of growth). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.3
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2021 (persen)

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,76	1,66	0,58	0,43	(0,001)	0,27
B Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,31	0,21	0,57	0,001	0,35
C Industri Pengolahan	0,19	0,26	0,08	0,20	(0,002)	0,01

	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,000	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,00	0,00	(0,000)	0,00
F	Konstruksi	1,07	0,90	0,62	1,95	0,004	2,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,87	0,87	0,62	0,72	(0,006)	0,32
H	Transportasi dan Pergudangan	0,99	1,06	(0,02)	(0,92)	(0,067)	(0,49)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,08	0,02	0,03	(0,002)	0,02
J	Informasi dan Komunikasi	0,15	0,14	0,09	0,08	0,002	0,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,21	0,14	0,03	0,003	0,17
L	Real Estat	0,22	0,23	0,17	0,17	0,001	0,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	(0,000)	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,12	0,13	0,09	0,17	0,001	0,14
P	Jasa Pendidikan	0,26	0,25	0,23	0,32	0,001	0,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,15	0,20	0,17	0,000	0,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,16	0,12	0,13	(0,001)	0,05
PDRB		5,65	6,42	3,17	4,01	(6,68)	4,03

* angka sementara

** angka sangat sementara

Pada tabel 3.3 di atas dapat dilihat sumber pertumbuhan terbesar ekonomi Lombok Tengah di tahun 2021 sektor pertanian telah kembali memberikan sumber pertumbuhan yang positif sebesar 0,27% dan sumber pertumbuhan terbesar adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 2,70%. Sementara itu sektor industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum juga telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun relatif kecil yaitu masing-masing sebesar 0,01% dan 0,02% yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam.

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami fluktuasi kurun waktu 2016-2021 dari Rp. 11.772.000 pada tahun 2016 menjadi Rp 13.087.000 pada tahun 2019. Namun di tahun 2020, Pendapatan per kapita mengalami penurunan menjadi Rp. 12.112.000. Pada tahun 2021, pendapatan perkapita masih mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di tahun 2021 sebesar 1,43%. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2016	15.642.000	11.772.000
2017	16.952.000	12.412.000
2018	17.779.000	12.685.000
2019	18.843.000	13.087.000
2020*	17.448.000	12.112.000
2021**	16.851.000	11.467.000

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2022

3. Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2016-2020 baik secara absolut maupun relatif. Namun, di tahun 2021 jumlah penduduk miskin secara absolut meningkat dari 128.000 jiwa menjadi 131.940 jiwa. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2011-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2016	145.370	15,80
2017	142.142	15,31
2018	130.002	13,87
2019	128.822	13,63
2020	128.100	13,44
2021	131.940	13,44

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

B. Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2023

Berdasarkan kondisi perekonomian domestik dan regional dan kondisi wabah covid-19 di tahun 2020 dan adanya pertumbuhan positif di tahun 2022 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah akan terus dalam tren positif dan diharapkan akan mengali pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di tahun 2023. Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,17 – 5,12%
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran, 12,31 – 12,72%
3. Gini ratio pada kisaran 0,339 – 0,335 point
4. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,11 – 2,06%
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 67,17 poin

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi regional daerah yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai peluang yang harus diraih dengan aksi nyata. Beberapa peluang tersebut antara lain:

- a) Konsumsi masyarakat diperkirakan terus tumbuh sebagai cerminan pola hidup normal baru pasca pandemi mengingat terjadinya peningkatan aktivitas masyarakat di tengah peralihan dari masa pandemik ke endemik.
- b) Sektor konstruksi telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, dan hal ini diperkirakan masih akan berlangsung dengan adanya proyek pembangunan di kawasan KEK Mandalika, pembangunan infrastruktur pendukung sirkuit dan investasi pembangunan infrastruktur lainnya.
- c) Sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan dapat menjadi pendorong pertumbuhan di 2023 mengingat terdapat berbagai even bertaraf nasional maupun internasional akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah.

Disamping peluang-peluang tersebut, di tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut:

- a) Akselerasi proses digitalisasi ekonomi dan layanan publik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan.
- b) Penguatan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi khususnya terhadap tenaga kerja dan angkatan kerja.
- c) Mendorong adanya transfer teknologi dalam hilirisasi industri pada skala mikro, kecil maupun menengah.
- d) Perlunya penguatan investasi pemerintah dalam infrastruktur digital, insentif fiskal, dan reformasi regulasi

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah pada umumnya menjadi arah utama Kebijakan pengembangan keuangan daerah yang dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Namun demikian, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya masih bergantung dana transfer dari pusat meskipun pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : (a) Kebijakan pemerintah, (b) Pendapatan masyarakat, (c) Fluktuasi harga komoditas andalan, dan (d) Kondisi daerah yang cukup aman.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja daerah masih tertata dengan baik dan untuk tahun-tahun ke depan diupayakan akan semakin baik.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan mengenai pendapatan daerah diharapkan dapat mendukung pembiayaan belanja daerah.

- **Pendapatan Asli Daerah.**
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut :
 - (1) Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
 - (2) Ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi khususnya perkembangan hotel baru baik yang dibangun di dalam KEK maupun di luar kawasan sekitar KEK.
- **Pendapatan Transfer.**
Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi hasil pendapatan (revenue sharing policy). Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Strategi, arah dan kebijakan terhadap Dana Perimbangan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mengoptimalkan target dan capaian realisasinya yaitu melakukan upaya peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga perolehan pendapatan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan alokasi yang direncanakan. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya yang bersumber dari Dana Insentif Daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta upaya melakukan perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan yang meliputi peningkatan Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas Pelayanan dasar publik bidang Pendidikan, peningkatan pelayanan dasar publik bidang kesehatan, peningkatan pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, penurunan kemiskinan dan perbaikan indeks pembangunan manusia, perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perbaikan kualitas perencanaan daerah, inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan meningkatkan kemudahan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
 - (1) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi guna meningkatkan penerimaan sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.6
Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	APBD 2022	RKPD 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	2.282.408.069.286	2.275.608.069.286
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	315.849.210.525	315.849.210.525
4.1.01	Pajak Daerah	190.144.753.248	200.369.470.598
4.1.02	Retribusi Daerah	34.368.888.421	32.689.670.777
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.507.005.000	8.579.190.491
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	79.828.563.856	74.210.878.659
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.924.286.896.507	1.924.286.896.507
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.816.938.435.000	1.816.938.435.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.348.461.507	107.348.461.507
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.271.962.254	35.471.962.254
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.102.000.000	302.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.169.962.254	35.169.962.254
	Jumlah Pendapatan	2.282.408.069.286	2.275.608.069.286

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2022

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD tahun kedua dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya..

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Strategi, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2023 adalah :

- 1) Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja gaji/tunjangan dan belanja pembayaran pokok utang pinjaman
- 2) Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka otonomi daerah Negara kesatuan Republik Indonesia
- 3) Mendukung percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
- 4) Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah
- 5) Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 3.7
Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	APBD 2022	RKPD 2023
5	BELANJA	2.466.845.277.286	2.216.003.861.358
5.1	BELANJA OPERASI	1.685.382.672.244	1.670.018.498.085
5.1.01	Belanja Pegawai	1.040.279.533.602	1.017.675.644.835
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.217.231.883	585.833.003.454
5.1.03	Belanja Bunga	13.767.062.477	12.639.461.500
5.1.05	Belanja Hibah	45.441.588.296	44.193.588.296
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.677.255.986	9.676.800.000
5.2	BELANJA MODAL	388.306.041.495	172.830.683.001
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.132.225.319	5.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	370.024.338.228	382.758.888.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.451.364.168	23.305.914.140
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.572.974.060	359.452.974.060
	Jumlah Belanja	2.466.845.277.286	2.230.608.069.286
	Total Surplus/(Defisit)	(184.437.208.000)	45.000.000.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2022

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 adalah Alokasi pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang.

Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 -2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	APBD 2022	RKPD 2023
6	PEMBIAYAAN	184.437.208.000	(45.000.000.000)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	204.437.208.000	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.437.208.000	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	204.437.208.000	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	45.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000	45.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	45.000.000.000
	Pembiayaan Netto	184.437.208.000	(45.000.000.000)

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2023



4.1 Tema Pembangunan Daerah 2023

Tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2023 mengacu dan memperhatikan Konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tema pembangunan dalam RKPD tahun 2023 adalah: *“Rurung Lempek Gumi Paer Untuk Pemulihan Ekonomi”* yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Jalan dan irigasi kondisi baik
- 2) Produk UMKM berkualitas
- 3) Desa wisata bertaraf internasional
- 4) Integrasi pelayanan publik
- 5) Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan
- 6) Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar
- 7) Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya

Penetapan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2023 adalah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun Kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan tahun transisi sehubungan dengan belum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan visi dan misi calon kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang berlaku, maka RKPD tahun 2023 mengacu pada sasaran pokok dan arahan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah. RKPD tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun Kedua RPJMD, dengan Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2021–2026 yaitu : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**.

Makna dari visi tersebut adalah:

- a. Beriman merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- b. Sejahtera menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;

- c. Bermutu merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- d. Maju memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- e. Berbudaya dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (The Heart of Lombok).

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah:

- a. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba.
- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri.
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efisien.
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah.
- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.
Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi sampai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 dijabarkan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Penjabaran Misi dalam RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat
		Meningkatnya moderasi beragama
Misi 2: Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul	Meningkatnya kualitas SDM	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Misi 3: Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah,	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Misi	Tujuan	Sasaran
Cepat dan Bersih		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Misi 4: Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial
		Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif
	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
		Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten
		Meningkatnya akses air minum aman
		Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman
		Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH
		Meningkatnya ketahanan bencana
Misi 5: Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPd yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPd mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (d) kontribusi PDB industri pengolahan, (e) nilai devisa pariwisata, (f) kontribusi PDB pariwisata, (g) penyediaan lapangan kerja, (h) pertumbuhan investasi, (i) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (k) rasio perpajakan terhadap PDB.

2. Prioritas Nasional 2

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

3. Prioritas Nasional 3

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

- b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
 - c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) prevalensi stunting, (b) insiden tuberkulosis, (c) angka kematian ibu, (d) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (e) persentase merokok usia 10-18 tahun, (f) meningkatkan nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (g) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, serta (h) harapan lama sekolah;
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.
4. Prioritas Nasional 4
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
 - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
 - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks kerukunan Umat Beragama;
 - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) media usia kawin pertama perempuan;
 - f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.
5. Prioritas Nasional 5
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif persen), (c) luas daerah irigasi premium yang di modernisasi (kumulatif persen), dan (d) mendorong penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010);
 - b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);

- c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
 - d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi dan (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita);
 - e. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).
6. Prioritas Nasional 6
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
 - c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK dan (b) peningkatan porsi bauran energi baru terbarukan dalam energi nasional.
7. Prioritas Nasional 7
Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran:
- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
 - b. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
 - c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
 - d. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan mendorong persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota);
 - e. Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

4.3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode terakhir dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta reformasi struktural sosial dan ekonomi yang mencakup antisipasi dan penanganan pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa

Tenggara Barat Gemilang”, serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana,
2. Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Sektor Unggulan,
3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik
4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM,
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM,
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan,
7. Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi,
8. Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi,
9. Industrialisasi Produk Unggulan,
10. Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Masing-masing Prioritas Daerah Provinsi NTB dijabarkan ke dalam Program Strategis dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB yang merupakan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023. Program Strategi dan Program Unggulan ini merupakan wujud dari visi dan pencapaian misi untuk mengatasi permasalahan ditengah masyarakat. Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis serta visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis dan 75 (tujuh puluh lima) program unggulan.

Tabel 4. 2 Target Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

Indikator	Target Nasional	Target Nasional untuk Nusa Tenggara Barat	Target Daerah
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9	4,9 – 5,5	4,5 – 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0	2,54 – 2,90	3,17
Angka Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	11,85 – 13,00	11,92
Rasio Gini (Indeks)	0,375 – 0,378	-	0,297
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29 – 73,35	-	70,09

Sumber : Rancangan RKP 2023 dan Rancangan RKPD 2023 Provinsi NTB

Upaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Perumusan program prioritas tahun 2023 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2023 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Untuk selanjutnya keselarasan tema, prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 3
Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD)
Tahun 2023

Tema Nasional	Tema Daerah
"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan "	"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"
Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)
PN 1	PD 6
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir agribisnis dalam mendukung investasi
	PD 7
	Optimalisasi pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19
	PD 8
	Industrialisasi produk unggulan daerah
PN 2	PD 2
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
PN 3	PD 3
Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pendidikan
	PD 4
	Meningkatkan kualitas kesehatan
PN 4	PD 3
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan
PN 5	PD 2
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6	PD 1
Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
	PD 5
	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
PN 7	PD 9
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik
	PD 10
	Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

4.3.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB, dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. prioritas pembangunan tahun 2023 adalah:

Tabel 4.4.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan 2023

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi	Target
				2021	2023
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	100	100
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.592	0.599
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.714	0.721
Integrasi pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	CC	B
Integrasi pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	80	90
Produk UMKM berkualitas	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.29	2.11
Produk UMKM berkualitas	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	0,43	2,53
Desa wisata bertaraf internasional	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	0,65	2,75
Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1.06	1.26
Jalan dan irigasi kondisi baik	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas	Poin	66,28	79,764
Jalan dan irigasi kondisi baik	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	58,6	63,6

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi	Target
				2021	2023
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	77,78	78,78
Jalan dan irigasi kondisi baik	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/Tahun	805,37	785,37
	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,9	60,6
	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	166,12	166,02
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krame adat aktif	Persen	75	77

Prioritas pembangunan daerah yaitu tema/agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJPD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah yang berisi program atau gabungan program prioritas.

4.4 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Berikut disajikan arah kebijakan pada tujuh prioritas pembangunan tahun 2023:

Tabel 4.5.
Penjabaran Prioritas Daerah dalam Arah Kebijakan Pembangunan

Prioritas	Sasaran	Arah Kebijakan
Akhlakul karimah dan penanaman nilai budaya	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Koordinasi, kerjasama dan perumusan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
		Penegakan peraturan daerah
		Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya
		Pencegahan kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak
Akhlakul karimah dan penanaman nilai budaya	Meningkatnya moderasi beragama	Pelibatan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menjaga harmonisasi sosial
		Mencegah berkembangnya paham radikal
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
		Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Pemerataan sumberdaya dan

Prioritas	Sasaran	Arah Kebijakan
		kualitas pendidikan
		Pemberian stimulus pendidikan
		Pemenuhan SPM Pendidikan
		Meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan
		Pemanfaatan TIK dalam pelayanan pendidikan
		Meningkatkan minat baca
		Pengembangan mitra perpustakaan
		Pengembangan pemuda dan atlet berprestasi
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
		Pemenuhan SPM Kesehatan
		Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
		Peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Integrasi pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, penelitian dan inovasi daerah
		Penyediaan data dan informasi pembangunan
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
		Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Optimalisasi pendapatan daerah
		Peningkatan profesionalisme ASN
		Peningkatan tata kelola pemerintahan desa
		Peningkatan sarana prasarana aparatur
Integrasi pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pengembangan sentra pelayanan publik
		Digitalisasi pelayanan publik
		Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik
		Penyesuaian regulasi pelayanan publik
		Menciptakan iklim ramah investasi
		Peningkatan pelayanan dan promosi investasi
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
		Penyiapan tenaga siap kerja dari kelompok masyarakat miskin
		Peningkatan cakupan perlindungan sosial masyarakat miskin
		Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin
		Peningkatan bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin
		Verifikasi, validasi dan pemanfaatan data kemiskinan
Produk UMKM berkualitas	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Standarisasi mutu produk unggulan daerah
		Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
		Penguatan mutu bahan baku dan integrasi hulu hilir
		Penguatan pemanfaatan ekonomi digital

Prioritas	Sasaran	Arah Kebijakan
		Peningkatan akses pasar dan permodalan
Desa wisata bertaraf internasional	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Memperkuat citra kepariwisataan daerah melalui media promosi
		Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
		Peningkatan kualitas dan kuantitas objek destinasi tujuan wisata
		Pengembangan dan penguatan desa wisata tematik
		Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan
Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Peningkatan volume dan mutu produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Perlindungan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Penguatan ketersediaan, distribusi dan diversifikasi pangan
		Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
Jalan dan irigasi kondisi baik	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan kualitas aksesibilitas jalan menuju kawasan strategis
		Peningkatan kapasitas SDM jasa konstruksi
		Peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan jalan
Jalan dan irigasi kondisi baik	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Peningkatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi
		Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengelola irigasi
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Meningkatnya akses air minum aman	Peningkatan kualitas sistem penyediaan air minum daerah
		Peningkatan dan perlindungan sumber air
		Pembinaan dan pengembangan SDM dan kelembagaan
		Pengembangan jaringan air bersih
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan kumuh
		Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin
		Peningkatan kualitas dan cakupan sanitasi di kawasan kumuh
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Penanaman nilai budaya luhur
		Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah
		Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam

mendukung prioritas nasional dan provinsi guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Berikut disajikan keselarasan tema, prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel

Tabel 4.6
Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN), Prioritas Provinsi dan
Prioritas Daerah (PD) Tahun 2023

Tema Nasional	Tema Provinsi	Tema Daerah
"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"	"Rurung Lempek Gumi Paer Untuk Pemulihan Ekonomi"
Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Provinsi (PP)	Prioritas Daerah (PD)
PN 1	PD 6	PD 2
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir agribisnis dalam mendukung investasi	Produk UMKM berkualitas
	PD 7	PD 3
	Optimalisasi pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19	Desa wisata bertaraf internasional
	PD 8	PD 5
	Industrialisasi produk unggulan daerah	Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan
PN 2	PD 2	PD 1
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Jalan dan irigasi kondisi baik
PN 3	PD 3	PD 6
Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pendidikan	Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar
	PD 4	
	Meningkatkan kualitas kesehatan	
PN 4	PD 3	PD 7
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan	Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya
PN 5	PD 2	PD 1
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Jalan dan irigasi kondisi baik
PN 6	PD 1	PD 6
Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar
	PD 5	PD 6
	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar
PN 7	PD 9	PD 4
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Integrasi pelayanan publik
	PD 10	PD 7
	Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya

4.5 Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

kinerja pembangunan ekonomi di Lombok Tengah di berbagai sektor sebagai akibat dari terjadinya Pandemi COVID-19. Penurunan kinerja diberbagai sektor tersebut mulai nampak di tahun 2020. Namun demikian, beberapa sektor seperti konstruksi, informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi mampu bertahan dan tumbuh pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah terus digalakan oleh Pemerintah melalui beragam program pemulihan ekonomi dan upaya tersebut telah menampakkan hasil dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2021 sebesar 4,03%. Sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan didorong menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi di 2023 mengingat terdapat berbagai even bertaraf nasional maupun internasional akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah.

Penguatan stabilitas kondisi kamtibmas dan layanan investasi yang mudah dan cepat untuk mendukung keberlangsungan proyek pembangunan di kawasan KEK Mandalika, pembangunan infrastruktur pendukung sirkuit dan berbagai investasi pembangunan infrastruktur lainnya. Akselerasi proses digitalisasi ekonomi dan layanan publik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan sangat dibutuhkan di era normal baru. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi khususnya terhadap tenaga kerja dan angkatan kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja termasuk fokus pada upaya transfer teknologi dalam hilirisasi industri pada skala mikro, kecil maupun menengah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas dan indikator kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 yang mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Prioritas Daerah	Kegiatan	Program
Jalan dan irigasi kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Jalan dan irigasi kondisi baik	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
Jalan dan irigasi kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Produk UMKM berkualitas	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Produk UMKM berkualitas	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Produk UMKM berkualitas	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Produk UMKM berkualitas	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Produk UMKM berkualitas	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Produk UMKM berkualitas	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Desa wisata bertaraf internasional	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Desa wisata bertaraf internasional	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Integrasi pelayanan publik	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Integrasi pelayanan publik	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Prioritas Daerah	Kegiatan	Program
Integrasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Integrasi pelayanan publik	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Integrasi pelayanan publik	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Integrasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Integrasi pelayanan publik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Integrasi pelayanan publik	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Integrasi pelayanan publik	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan	Pembangunan Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pembangunan sumber daya	Pembinaan dan Pengawasan	PROGRAM PEMBINAAN DAN

Prioritas Daerah	Kegiatan	Program
manusia dan layanan dasar	Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Prioritas Daerah	Kegiatan	Program
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel 5.2
Program dan Target Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
A	TERKAIT PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
10.1.1.1.2	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Poin	64.88	70.07

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
		APK SD	Poin	110.7	105.51
		APK SMP/MTs	Poin	110.36	105.17
		PAUD Terakreditasi	Persen	34.6	39.10
		SD Terakreditasi A	Persen	13.6	19.60
		SMP Terakreditasi A	Persen	10.2	16.20
		Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	98.24	98.96
10.90.1.1.3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	45	50
		Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	5	25
10.90.1.1.4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi	Persen	89.63	94.63
		Persentase PTK SD tersertifikasi	Persen	70.46	77.96
		Persentase PTK SMP tersertifikasi	Persen	70.18	77.68
10.90.1.1.5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	1030	26
10.90.1.1.6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100
		Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
2	KESEHATAN				
7.2.1.2.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita stunting	Persen	27,79	25,29
		Angka Kematian Ibu	Kasus/10 0.000 KH	141	125
		Angka Kematian Bayi	Kasus/1.0 0 KH	10	9.20
		Indeks Kepuasan Layanan Rujukan	Poin	74	81
7.90.1.2.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase nakes yang kompeten di pelayanan dasar	Persen	80	100
		Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan	Persen	80	95
7.1.1.2.4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase PIRT yang diterbitkan	Persen	70	85
7.3.1.2.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan posyandu keluarga aktif	Persen	14	80
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
		Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
4.4.1.3.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Persen	45.72	81.81
6.3.1.3.3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	Persen	77.28	81.92
4.7.1.3.8	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah terbangun	Unit	2	3
4.7.1.3.9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan bangunan dan lingkungan yang tertata	m2	0.00	15
4.8.1.3.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap	Persen	65.03	79.88
4.7.1.3.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih & bersertifikat	Persen	0.00	0.35
5.5.1.3.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan	Regulasi	1	2
5.1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi layak dan aman	Persen	79.43	100
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
6.1.1.4.2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100	3.50
		Pengelolaan/pemeliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus dan perumahan komersil)	Unit	1	3
6.1.1.4.3	Program Kawasan Permukiman	Penurunan luasan kawasan kumuh	Ha	815.37	10
6.2.1.4.4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang ditangani	Persen	24.37	30,52
6.2.1.4.5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU	Persen	N/A	5.48
6.2.1.4.6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan yang sudah terfasilitasi	Persen	N/A	-
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
3.3.1.5.2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda yang ditegakkan	Persen	33.33	60
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
3.2.1.5.3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana	Persen	16.55	20.86
3.2.1.5.4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan	Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Menit	15	15

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
	Non Kebakaran				
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
6	SOSIAL				
11.2.1.6.2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang dibina	Persen	37.65	61.64
11.8.1.6.3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Orang	768	200
11.1.1.6.4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	52, 61	70,43
11.4.1.6.5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	Orang	230	530
3.2.1.6.6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Persen	100	100
11.90.1.6.7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP Daerah yang dikelola	TMP Daerah	1	1
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
B	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR				
7	TENAGA KERJA				
4.2.2.7.2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen database ketenagakerjaan	Dokumen	N/A	1
4.2.2.7.3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terlatih	Persen	87.36	90
4.2.2.7.4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar terserap	Persen	86.45	95
4.2.2.7.5	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persen	100	100
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
11.5.2.8.2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	Persen	53.85	69.23
11.5.2.8.3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	100	100
11.5.2.8.4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	Persen	32.41	67.13
11.5.2.8.5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Data gender dan anak	Dokumen	N/A	1
11.5.2.8.6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	Predikat	Madya	Utama
11.5.2.8.7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100	100
9	PANGAN				
4.3.2.9.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif	Persen	N/A	77
4.3.2.9.3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi	Kkal/Kap/Hari	2.588.63	2.558,63
		Konsumsi protein	Gram/Ka	79.60	76.6

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
			p/Hari		
4.3.2.9.4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio desa rawan pangan yang ditangani	Persen	0.30	0.51
4.3.2.9.5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase cakupan layanan pengawasan keamanan pangan	Persen	100	100.00
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
10	PERTANAHAN				
5.5.2.10.5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	N/A	100
5.5.2.10.8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase permukiman baru yang terbangun	Persen	N/A	100
5.5.2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Dokumen penatagunaan tanah	Dok	N/A	1
11	LINGKUNGAN HIDUP				
5.1.2.11.2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan LH	Dokumen	N/A	-
5.3.2.11.3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	Persen	56.15	56.45
5.1.2.11.4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luasan taman kehati	Ha	N/A	5
5.2.2.11.5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase tingkat ketaatan pengelolaan limbah B3	Persen	100	100
5.2.2.11.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	Persen	5	5
5.1.2.11.8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah tenaga fungsional yang dilatih	Orang	N/A	4
5.1.2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas	Persen	100	100
5.1.2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani	Persen	25.30	31.30
		Persentase pengurangan sampah	Persen	16	19
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.3.2.12.2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	Persen	97.13	98.54
		Persentase penerbitan KIA	Persen	9,92	39,92
		Persentase penerbitan surat pindah	Persen	N/A	100
1.3.2.12.3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	95.90	97.50
1.3.2.12.4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah melaksanakan kerjasama	Persen	4	10
1.3.2.12.5	Program Pengelolaan Profil	Persentase OPD yang	Persen	0	3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
	Kependudukan	memanfaatkan data kependudukan			
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1.6.2.13.2	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	7.87	14.96
1.6.2.13.3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	Persen	73.94	78.87
1.6.2.13.4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	19.69	31.50
1.6.2.13.5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga adat desa yang aktif	Persen	39.37	46.46
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
7.4.2.14.2	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.80	2.70
7.4.2.14.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS akseptor KB	Persen	58.50	61.50
7.4.2.14.4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	Persen	62.65	65.65
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
15	PERHUBUNGAN				
4.8.2.15.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	Persen	41.87	55.96
4.8.2.15.3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut		N/A	40
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
4.9.2.16.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	Persen	72.73	83.63
4.9.2.16.3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	Persen	60	85
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
4.1.2.17.2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam (unit)	Unit	245	20
4.1.2.17.3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang patuh perundang-undangan	Persen	12	48
4.1.2.17.4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Laporan tingkat kesehatan KSP/USP (dokumen)	Dokumen	1	1
4.1.2.17.5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang dilatih	Persen	24,49	61,22
4.1.2.17.6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Omset Aset Koperasi	Persen	0.19	0.57

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
4.1.2.17.7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan omset aset UMKM	Persen	0	30
4.1.2.17.8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Unit	0	2
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
18	PENANAMAN MODAL				
4.90.2.18.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN	Rupiah	583,136,792,100	586,293,000,000
		Nilai investasi PMA	Rupiah	1,288,573,501,709	1,291,670,000,000
4.90.2.18.3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas Rp. 1M	Proyek	253	274
4.90.2.18.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	Persen	100	100
4.90.2.18.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Wajib Laport LKPM yang melapor	Persen	35,95	36,51
4.90.2.18.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data base Sistem Informasi Perijinan Penanaman Modal	Database	1	1
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
10.10.2.19.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi	Orang	6	5
10.10.2.19.3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	Orang	39	49
10.10.2.19.4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang dilatih	Persen	20	40
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
20	STATISTIK				
1.3.2.20.2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data	Instansi	55	58
21	PERSANDIAN				
4.9.2.21.2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase informasi daerah yang diamankan	Persen	100	100
22	KEBUDAYAAN				
10.11.2.22.2	Program Pengembangan Kebudayaan	jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	Event	23	38
10.11.2.22.3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif	Persen	100	100
10.11.2.22.5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah situs yang dilestarikan	Buah	10	10
23	PERPUSTAKAAN				
10.4.2.23.2	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	-76.06	80
10.4.2.23.3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Naskah Kuno	0	3
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
24	KEARSIPAN				
1.90.2.24.	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan pengelolaan	Persen	70	80

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
2		kearsipan			
1.90.2.24.3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pesentase arsip terselamatkan	Persen	60	75
1.90.2.24.4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	Izin	0	3
C	PILIHAN				
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
4.3.3.25.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3,039.30	3,589.21
4.3.3.25.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Benih Ikan	Ekor	7,100,000	8,242,643
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42,409.90	49,235.16
4.3.3.25.5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pelanggaran usaha perikanan tangkap dan budidaya yang ditangani	Persen	-	100
4.3.3.25.6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi olahan	Ton	4,405.45	4,675.10
		kelautan dan perikanan			
		Produksi garam rakyat	Ton	3,438.15	3,542.33
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
26	PARIWISATA				
8.1.3.26.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	20	60
8.1.3.26.3	Program Pemasaran Pariwisata	Media promosi online yang aktif	Media	1	1
8.1.3.26.5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	240	100
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
27	PERTANIAN				
4.3.3.27.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas pertanian unggulan :			
		- Padi (GKG)	Ton/Tahun	318,322	324,37
		- Tembakau	Ton/Tahun	20,224	21,461.87
		- Melon	Kw/Tahun	15,32	13,151
		- Sapi	Ekor/Tahun	179,189	193,53
4.3.3.27.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	Poin	50	50
4.3.3.27.4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kenaikan prosentase penerapan biosecurity budidaya ternak	Persen	30	34
4.3.3.27.5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan tingkat serangan penyakit hewan/tanaman	Persen	30	25
4.3.3.27.6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan	Rekomendasi	260	260
4.3.3.27.7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi	Persen	5	5
	Program Penunjang Urusan	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
1.1.X.XX.1	Pemerintahan Daerah				
28	PERDAGANGAN				
4.1.3.30.2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	N/A	70
4.1.3.30.3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	nilai omset perdagangan	Juta Rupiah	114,502.22	116,002.22
4.1.3.30.4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Operasi Pasar	Kali	N/A	2
4.1.3.30.5	Program Pengembangan Ekspor	Nilai transaksi pameran	Rp	0	400,000,000
4.1.3.30.6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pasar tertib ukur	Pasar	0	7
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
29	PERINDUSTRIAN				
4.7.3.31.2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	Persen	100	100
30	TRANSMIGRASI				
11.90.3.32.3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang difasilitasi	Persen	100	100
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
31	SEKRETARIAT DAERAH				
1.1.4.1.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persen	100	100
		Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan	Persen	100	100
1.1.4.1.3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan pada bidang perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100	100
		Persentase kebijakan pada bidang pembangunan yang dilaksanakan	Persen	100	100
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	50	60
1.1.4.1.1	Program Administrasi Umum	Persentase kebijakan Administrasi umum dan Tata Usaha Pimpinan serta kerumahtanggaan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100
		Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	Persen	100	100
		Persentase kebijakan pelaksanaan acara pemerintah daerah yang dilaksanakan.	Persen	100	100
		Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
32	SEKRETARIAT DPRD				
1.1.4.2.1	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Dokumen Laporan Keuangan dan Perencanaan	Dokumen	39	43

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
	Kabupaten/Kota				
		Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
1.1.4.2.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	Persen	60	67.50
		Jumlah berita yang dipublikasikan	Berita	733	750
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
33	PERENCANAAN				
1.3.5.1.2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPd	Persen	100	100
1.3.5.1.3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPd	Persen	100	100
		Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPd	Persen	100	100
		Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPd	Persen	100	100
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
34	KEUANGAN				
1.1.5.2.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Ketepatan	Tepat waktu	Tepat waktu
		Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Hari kerja	2	2
1.1.5.2.3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Validasi data aset	Persen	96	97.50
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
1.1.5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Rupiah	203,926,708,187.53	274,656,988,932
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
35	KEPEGAWAIAN				
1.3.5.3.2	Program Kepegawaian Daerah	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	0.00	35
		Prosentase layanan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu	Persen	70	95
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1.90.5.4.2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	Persen	60	66
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1.4.5.5.2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
38	INSPEKTORAT DAERAH				
1.90.6.1.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada pemerintah daerah	Persen	95	95
1.90.6.1.3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur	Persen	72.73	84.09
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
G	UNSUR KEWILAYAHAN				
39	KECAMATAN				
1.6.7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan publik	Persen	100	100
1.6.7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	Persen	15	15
1.6.7.1.4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	Persen	100	100
1.6.7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	Persen	100	100
1.6.7.1.6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Persen	85	93
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1.1.8.1.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	Persen	100	100
1.1.8.1.3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Angka partisipasi pemilih dalam PEMILU	Persen	74	-
		Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	Persen	100	100
		Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	Persen	10	50
1.1.8.1.4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	Persen	85	90
1.1.8.1.5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba"	Persen	N/A	46.15
1.1.8.1.6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase penyelesaian konflik sosial	Persen	100	100

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2023
	Sosial				
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Salah satu metode pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan melihat ketercapaian indikator kinerja utama daerah yang bertujuan memberi gambaran atas pencapaian visi misi kepala daerah selama periode masa jabatan. Indikator kinerja utama daerah menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada setiap periode pelaksanaan RPJMD dapat dicapai. Realisasi indikator kinerja utama daerah sampai dengan tahun 2021 serta target di tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Realisasi 2021 & Target Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Realisasi 2021	Target 2023
1	Indeks Toleransi	Poin	3,58	3,61	3,66
2	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100	100
3	IPM	Poin	66.43	66.72	67.17
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	B
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-6.68	4,03	4.17
6	Angka Kemiskinan	Persen	13.44	13.44	12.72
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.74	2.33	2.11
8	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	NA	65.05	68.05
9	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	NA	100	100
10	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	(20.43)	0.65	2.75

BAB VII PENUTUP



Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas perencanaan juga sangat ditentukan oleh komitmen para pengelola program pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implementasi tujuan di atas disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 yang merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2023 berdasarkan RKPD 2023.

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI